

2024

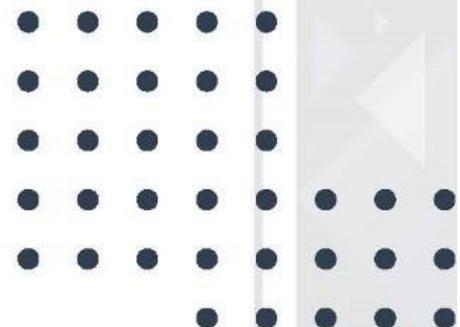
**JASA KONSULTASI
PENELITIAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KABUPATEN BELU NUSA
TENGGARA TIMUR**



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



PEMERINTAH
KABUPATEN BELU



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Sasaran.....	6
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan	6
1.4.1. Pengumpulan Data	7
1.4.2. Pengolahan, Analisis, dan Evaluasi Data	9
1.4.3. Penyusunan Hasil Kajian	9
1.4.4. Pelaporan.....	9
1.5. Lokasi Kegiatan.....	9
1.6. Jangka Waktu dan Jadwal Kegiatan.....	11
1.7. Susunan Tim Peneliti.....	11
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	12
2.1. Pengumpulan Data Sekunder	12
2.1.1. Konsep Kemiskinan Ekstrem	12
2.1.2. Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia	13
2.2. Seminar Awal.....	17
2.2.1. Deskripsi Peserta.....	17
2.2.2. Persiapan	17
2.2.3. Pelaksanaan.....	17
2.2.4. Evaluasi	18
2.2.5. Dokumentasi.....	18
2.3. Observasi Lapangan.....	19
2.4. Wawancara Mendalam	19
2.4.1. Deskripsi Informan.....	19
2.5. Diskusi Terpimpin/FGD	20
BAB III Profil Kabupaten Belu	23
3.1. Geografi dan Topografi.....	23

3.2.	Demografi.....	24
3.3.	Sumber Daya Manusia.....	26
3.4.	Pemerintahan Daerah.....	29
3.5.	Lingkungan dan Tata Ruang Wilayah.....	33
3.6.	Ekonomi Makro.....	34
BAB IV	PROFIL PENDUDUK MISKIN DAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN BELU..	38
4.1.	Penduduk Miskin dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu.....	38
4.2.	Kemiskinan di Kelurahan Fatubena, Kota Atambua.....	40
4.3.	Kemiskinan di Desa Faturika Kecamatan Raimanuk.....	40
4.4.	Kemiskinan di Desa Tohe, Kecamatan Raihat.....	40
4.5.	Kemiskinan di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak.....	41
4.6.	Perspektif Masyarakat Terkait Kemiskina Ektrem di Kabupaten Belu.....	41
BAB V	FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN EKSTREM.....	43
5.1.	Faktor Lingkungan.....	43
5.1.1.	Kondisi Lahan Tandus dan Tidak Subur.....	43
5.1.2.	Keterisolasian Kampung.....	44
5.2.	Faktor Sumber Daya Manusia.....	45
5.2.1.	Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Pendidikan.....	46
5.2.2.	Tingkat Kesehatan.....	47
5.3.	Faktor Ekonomi.....	49
5.3.1.	Mata Pencaharian dan Aset (Tanah, Ternak, Modal, Keterampilan).....	49
5.3.2.	Tingkat Pendapatan.....	50
5.3.3.	Tingkat Pengeluaran/Konsumsi.....	51
5.3.4.	Tingkat Pengangguran.....	53
5.3.5.	Tingkat Ketersediaan Pasar dan Akses Pemasaran.....	54
5.4.	Faktor Sosial.....	55
5.4.1.	Tingkat Kriminalitas dan Perjudian.....	55
5.4.2.	Dinamika Migrasi Warga Baru.....	56
5.4.3.	Kelompok Marjinal (Anak, Perempuan, Lansia, Difabel).....	58
5.5.	Faktor Budaya.....	59
5.5.1.	Relasi Extended Family dan Klan.....	59
5.5.2.	Kebiasaan Pesta Adat Yang Boros.....	60
5.5.3.	Relasi Gender.....	62

5.6.	Responsivitas Pemda, Desa, dan Stakeholder Lainnya dalam Program Pemberdayaan Masyarakat.....	62
5.6.1.	Bidang Kesehatan	64
5.6.2.	Bidang Pendidikan.....	64
5.6.3.	Bidang Ekonomi	64
5.6.4.	Fasilitas Umum, Fasilitas Khusus, dan Layanan Dasar	66
BAB VI	PEMIKIRAN DAN ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM	68
6.1.	Rangkuman Permasalahan Kemiskinan Ekstrem	68
6.2.	Rangkuman Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	68
6.2.1.	Bidang Pendidikan dan Kesehatan	68
6.2.2.	Bidang Sosial dan Ekonomi	69
6.2.3.	Kolaborasi Dengan Stakeholder	69
6.2.4.	Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Layanan Umum.....	69
6.3.	Alternatif Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....	69
6.3.1.	Program Quick Win dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....	69
6.3.2.	Program Jangka Pendek dan Menengah Untuk Meningkatkan Penghidupan Masyarakat.....	70
6.3.3.	Kepemimpinan dan Pendekatan Berbasis Komunitas.....	70
6.3.4.	Fokus Program Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	71
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	72
7.1.	Rangkuman Kajian.....	72
7.2.	Rencana Tindak Lanjut.....	74
REFERENSI		80

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur	9
Gambar II.1 Dokumentasi Kegiatan FGD	18
Gambar II.2 Dokumentasi Kegiatan FGD	19
Gambar II.3 Kegiatan FGD di Kelurahan Fatubena	21
Gambar II.4 Kegiatan FGD di Kantor Desa Faturika	21
Gambar II.5 Kegiatan FGD di Kantor Desa Tohe	22
Gambar II.6 Kegiatan FGD di Desa Kanebibi	22
Gambar III.1 Piramida Penduduk Kabupaten Belu 2023	26

Daftar Tabel

Tabel I.1 Linimasa Kegiatan Penelitian	11
Tabel III.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Belu 2020-2024	24
Tabel III.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	24
Tabel III.3 Perbandingan Angka Partisipasi Murni dan Kasar di Kabupaten Belu	27
Tabel III.4 Angka Melek Huruf Kabupaten Belu	28
Tabel III.5 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Belu	30
Tabel III.6 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu	33
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Belu	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Angka kemiskinan di Kabupaten Belu pada periode 2018 – 2021 mengalami fluktuasi sebesar 5,70% (Dinas Sosial Kabupaten Belu, 2022). Pada tahun 2018, persentase kemiskinan mencapai puncaknya, yaitu 14,78%. Dalam profil Kabupaten Belu, tercatat angka kemiskinan pada 2021 terpusat di 5 wilayah kecamatan dengan penyumbang kemiskinan tertinggi yakni Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Kota Atambua, Raimanuk, dan Kakuluk Mesak. Selain lima kecamatan di atas, kemiskinan juga terjadi di sejumlah kecamatan seperti Atambua Selatan, Raihat, Lamaknen, Atambua Barat, Lamaknen Selatan, Lasiolat, dan Nanaet Duabesi.

Selama ini, data penduduk miskin di Kabupaten Belu berasal dari dua sumber yakni BPS dan P3KE. Merujuk pada data yang dikeluarkan BPS, tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu pada tahun 2022 sebesar 14,84% atau 33.980 jiwa. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Belu pada tahun 2021 mencapai 69.506 jiwa atau 13.134 KK. Perbedaan parameter antara BPS dan P3KE menyebabkan banyak perbedaan data eksisting penduduk miskin di berbagai wilayah. Namun, kedua lembaga tersebut masih menggunakan parameter kemiskinan yang teknokratik baik dari kemampuan belanja maupun pendapatan secara umum. Hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut tentang parameter dan realita sosio, ekonomi, politik, kultural yang lebih holistik untuk menggambarkan isu kemiskinan ekstrem.

Sebelumnya, telah ada penelitian terkait kemiskinan di NTT yang dilakukan oleh LAURA UGM dan The Smeru Research Institute. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Antropologi Untuk Riset dan Aksi (LAURA) UGM (2018), tingginya angka kemiskinan di Sumba Barat, NTT berkaitan dengan isu dinamika sosial-budaya setempat. Kelindan moralitas ekonomi pertukaran dengan ekonomi pasar yang sifatnya transaksional, menghasilkan ketimpangan atau friksi sosial dan memunculkan kekerabatan semu, eskalasi serta perubahan nilai/ valorisasi upacara adat. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan (resiprositas negatif) yang menyebabkan “pemborosan-adat” dan gejala sosial lainnya, seperti; tingginya kriminalitas hewan ternak (terutama kerbau), jual-beli lahan, dan lilitan hutang lintas generasi. Kaum marginal, yaitu perempuan dan anak menjadi pihak yang paling tereksplotasi dari adanya resiprositas negatif ini.

Berdasarkan hasil penelitian The Smeru Research Institute (2022), pada periode 1996–2006 terjadi peningkatan kesejahteraan di setiap desa/ komunitas di Timor Barat. Namun, ambivalensi eskalasi kesejahteraan tersebut tidak selalu diikuti dengan keberhasilan komunitas dan rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Belenggu kemiskinan terjadi karena berbagai faktor, yaitu: (1) gagal panen akibat cuaca ekstrem musim kering berkepanjangan, (2) kriminalitas aset terutama hewan ternak, (3) sistem adat yang mengikat, (4) berkurangnya produktifitas karena usia senja, dan (5) peralihan pekerjaan dari sektor jasa ke pertanian (Fillaili dan Marianti, 2022: 112–113). Berdasarkan hasil studi tersebut, jalan keluar dari belenggu kemiskinan perlu ditunjang dengan berbagai faktor, yaitu: (1) tingkat kapasitas sumber daya manusia yang memadai, (2) struktur peluang yang tersedia, seperti ketersediaan kesempatan kerja dan informasi yang inklusif, serta (3) kapasitas organisasi lokal (idem: ii).

Oleh karena itu, perlu adanya kajian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu untuk mendalami persoalan kemiskinan ekstrem yang kompleks menjadi lebih terukur dan terorganisir

dalam menetapkan konsep, permasalahan utama, peluang relevansi program dan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu ini dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni 2025 – 2030.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penelitian kemiskinan ekstrem, yaitu:

- a. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam penyusunan program kerja di daerah;
- b. Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, swasta, perguruan tinggi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belu;
- c. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan dari kegiatan penelitian kemiskinan ekstrem, yaitu:

- a. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan ekstrem saat ini;
- b. Menghasilkan usulan arah dan tujuan penanggulangan ekstrem jangka pendek dan jangka menengah (lima tahun ke depan);
- c. Memetakan peran serta berbagai stakeholder dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu;
- d. Menghasilkan parameter monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini, yaitu:

- a. Tersusunnya profil umum kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu;
- b. Tersusunnya usulan arah dan tujuan penanggulangan kemiskinan ekstrem jangka pendek dan jangka menengah (lima tahun ke depan);
- c. Terpetakannya peran serta berbagai stakeholder dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu;
- d. Tersusunnya parameter monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk menyelesaikan kegiatan “Jasa Konsultasi Penelitian Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Tahun 2024” diperlukan rangkaian penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data guna memperjelas dan mempertegas data-data penting yang relevan, yaitu:

1.4.1.1 Observasi Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan situasi dan kondisi di lokasi penelitian dengan melihat obyek yang relevan dengan indikator kemiskinan ekstrem, seperti di ranah rumah tangga, desa, dan aktivitas keseharian komunitas. Pertama, pengamatan rumah tangga terkait kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, tempat tinggal. Kedua, pengamatan di ranah desa terkait sarana dan prasarana pendidikan, layanan kesehatan (posyandu, puskesmas pembantu), pasar desa, kondisi jalan, penerangan, sinyal, transportasi umum, dll. Ketiga, aktivitas keseharian komunitas seperti ekonomi rumah tangga (tanah, pertanian, ternak, usaha tenun) dan ekonomi desa (bumdes, koperasi, UB, kelompok arisan). Observasi lapangan dilakukan di 4 (empat) desa, masing-masing desa selama 1 (satu) hari. Dalam melaksanakan kegiatan, peneliti didampingi oleh pendamping lokal.

1.4.1.2 Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti melakukan penghimpunan data-data yang relevan dengan isu kemiskinan, seperti:

- a. profil desa;
- b. profil kecamatan;
- c. profil kabupaten;
- d. program-program penanggulangan kemiskinan di Perangkat Daerah terkait;
- e. program-program penanggulangan kemiskinan di desa;
- f. profil keluarga miskin menurut BPS dan P3KE;
- g. program-program penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. program-program penanggulangan kemiskinan skema Bansos;
- i. program-program penanggulangan stunting;
- j. program-program untuk kelompok rentan (lansia, perempuan, difabel, anak terlantar);

Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari di lapangan bersamaan dengan kegiatan *fieldwork*, dan dilengkapi secara berkala selama proses pengolahan data dan penulisan laporan. Pengumpulan data sekunder ini peneliti akan dibantu oleh pendamping lokal. Data sekunder ini untuk mengidentifikasi, pemetaan peluang serta tantangan dalam perencanaan pengentasan kemiskinan. Data sekunder ini juga akan menyimak data-data kuantitatif terkait kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu.

1.4.1.3 Wawancara Mendalam

Indepth interview atau wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti dengan informan seperti anggota keluarga atau komunitas, kepala desa dan perangkat kelurahan, lembaga swadaya dan lembaga desa dan kelurahan lain. Data kualitatif ini penting untuk memahami kondisi demografi dari sudut pandang dan tafsir masyarakat itu sendiri (Spradley, 2007). Wawancara mendalam dilakukan pada sejumlah informan, yaitu:

- a. Pengelola program penanggulangan kemiskinan di level desa
- b. Pengelola program penanggulangan kemiskinan di level kecamatan
- c. Pengelola program penanggulangan kemiskinan di level kabupaten
- d. Kelompok-kelompok keluarga miskin (misal dasawisma di Jawa)
- e. Pengurus kelompok keluarga miskin
- f. Kader Posyandu
- g. Pengelola perkumpulan PKK dan sejenisnya
- h. Pengelola Kelompok Pemuda
- i. Kelompok-kelompok usaha ekonomi desa
- j. Pengelola BUMDes
- k. Lembaga Swadaya Manusia/ NGO
- l. Pengelola program air bersih
- m. Pengelola program listrik masuk desa
- n. Pengelola jejaring keamanan sosial di desa
- o. Tokoh adat

Peneliti melakukan wawancara mendalam di 4 (empat) lokasi penelitian, masing-masing lokasi selama 2 (dua) hari dengan pendamping lokal. Pengarsipan wawancara mendalam dengan cara merekam dan mencatat untuk kebutuhan analisis.

1.4.1.4 Diskusi Terpimpin

FGD atau diskusi terpumpun adalah metode untuk berdialog dengan masyarakat guna menggali data melalui diskusi terbatas, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti perangkat kelurahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pengurus PKK, dan para pemangku kepentingan lainnya di kelurahan dan desa. Data hasil FGD mampu mengungkapkan aspirasi yang berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan komunitas di masyarakat (Krueger dan Casey, 2015). Data ini penting untuk menyusun strategi *community development* yang partisipatoris untuk memperdalam potensi dan tantangan peningkatan kesejahteraan di komunitas/ desa.

Adapun tema-tema FGD yang akan didiskusikan, yaitu: (1) pemetaan masalah kemiskinan di komunitas/ desa, (2) pemetaan solusi atas masalah kemiskinan di komunitas/desa, dan (3) pemetaan peluang pengembangan jaring kemitraan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem (Pemda, Perguruan Tinggi, NGO, Lembaga Keagamaan,dll.). FGD juga mengeksplorasi tema khusus antara lain: karakteristik kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayah, kelompok masyarakat mana yang paling rentan dan menjadi korban kemiskinan ekstrem, program-program penanggulan kemiskinan yang berjalan efektif dan sebaliknya yang kurang efektif, tema penghidupan (*livelihood*) seperti keberadaan jaring *social security* lokal dan lumbung paceklik, keberadaan dan dampak kemiskinan ekstrem pada kelompok rentan dan usulan-usulan rekomendasi ke depan.

Kegiatan FGD dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di tingkat Kabupaten Belu 2 (dua) kali dan di tingkat kelurahan dan desa sebanyak 1 (satu) kali pada tiap lokasi penelitian. Masing-masing FGD akan melibatkan 10–15 orang peserta dengan minimal 50% keterlibatan perwakilan perempuan atau kelompok rentan lainnya. Para peserta FGD di antaranya merupakan perwakilan yang berasal dari berbagai kelompok sebagai berikut:

- a. Organisasi pemerintah (kabupaten/kecamatan/kelurahan/desa)
- b. Kelompok perempuan rumah tangga miskin
- c. Kepala rumah tangga miskin
- d. Kelompok marginal (manula, difabel, dan anak)
- e. Tokoh pemangku adat/kultural
- f. Tokoh lembaga keagamaan
- g. Organisasi non-pemerintah (NGO/LSM)
- h. Pengelola/pengurus program-program pengentasan kemiskinan

1.4.2. Pengolahan, Analisis, dan Evaluasi Data

Kegiatan pengolahan dan analisis data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Pendekatan analisis data
 - Metode yang digunakan harus berdasarkan metode yang relevan untuk mendeskripsikan data dan program yang ada
 - Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

1.4.3. Penyusunan Hasil Kajian

Menyusun hasil kajian Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis data maupun pembahasannya.

1.4.4. Pelaporan

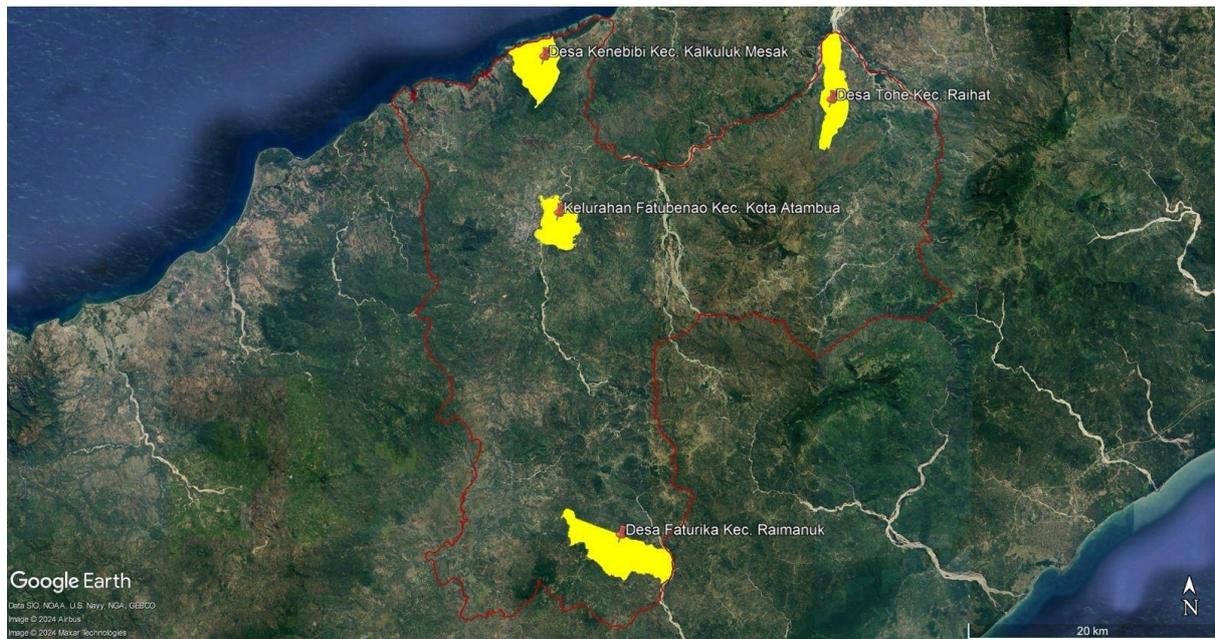
Hasil kajian yang telah disusun, kemudian dilaporkan dalam bentuk: (1) Laporan Pendahuluan, dan (2) Laporan Akhir Penelitian Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu Tahun 2024.

1.5. Lokasi Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penelitian Kemiskinan Ekstrem dilakukan di 4 (empat) kecamatan, masing-masing kecamatan dilakukan penelitian pada 1 (satu) kelurahan dan 3 (tiga) desa. Berikut rincian lokasi penelitian berdasarkan karakteristik wilayah:

- a. Wilayah pesisir di Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak
- b. Wilayah dataran hijau di Desa Tohe Kecamatan Raihat
- c. Wilayah kering di Desa Faturika Kecamatan Raimanuk
- d. Wilayah Kota di Kelurahan Fatubeno Kecamatan Kota Atambua

Gambar I.1 Peta Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur



Sumber: Tim Penelitian Kemiskinan Ekstrem Belu, NTT Universitas Gadjah Mada

1.6. Jangka Waktu dan Jadwal Kegiatan

Tabel I.1 Linimasa Kegiatan Penelitian

No	Aktivitas	Juli				Agustus				September				Oktober				November				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
i	Pilkada 2024																					
ii	Potensi Jadwal Kegiatan Lapangan																					
1	Koordinasi Persiapan Kerja Sama / MoU																					
2	Proses Administrasi Proyek																					
3	Penyusunan instrumen penelitian																					
4	Desk study & Panel Ahli																					
5	Studi pustaka																					
6	Coaching instrumen penelitian																					
7	Persiapan kegiatan lapangan																					
8	Observasi partisipan																					
9	Focus Group Discussion																					
10	Indepth Interview																					
11	Analisis Data																					
12	Draft Laporan																					
13	Presentasi Laporan																					
14	Diseminasi dan Workshop RTL																					

Jangka waktu pelaksanaan Jasa Konsultasi Penelitian Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu dikerjakan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

1.7. Susunan Tim Peneliti

- Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Bambang Hidayana, M.A.
- Anggota Peneliti : Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand. Oecon., Ph.D.
- : Mohammad Ghofur, S.Sos, M.Sc.
- : Olga Aurora Nandiswara, S.Ant., M.A.
- Asisten Peneliti : Rizqyansyah Fitramadhana, S.Sos.
- Manajemen Penelitian : Sealvy Kristianingsih, SE. MSc

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pengumpulan Data Sekunder

2.1.1. Konsep Kemiskinan Ekstrem

Definisi dan konsep kemiskinan ekstrem didominasi oleh bidang ilmu ekonomi. Pada level global, kemiskinan ekstrem mulai mendapat perhatian pada akhir tahun 80-an ketika World Bank mempublikasikan laporan *World Development Report*. Dalam dokumen tersebut, World Bank memperkenalkan pengukuran tunggal kemiskinan ekstrem yang ditujukan untuk membandingkan tingkat kemiskinan ekstrem di berbagai negara. Saat itu, World Bank mendefinisikan kemiskinan ekstrem dari indikator kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) dalam mata uang dollar. Dengan menggunakan pemahaman itu, seseorang atau penduduk dapat dimasukkan ke dalam kategori miskin ekstrem jika daya beli per harinya kurang dari indikator kemampuan daya beli yang ditetapkan oleh World Bank. Misalnya, pada awal kemunculannya, World Bank menetapkan batas minimal indikator daya beli di angka 1 (satu) dolar per hari; maka, berdasarkan indikator itu, setiap individu yang daya belinya di bawah 1 (satu) dolar dapat dikategorikan ke dalam kelompok miskin ekstrem.

Pada perkembangannya, indikator itu terus diubah oleh World Bank karena adanya kritik dari berbagai pihak. Keberatan utama terhadap indikator World Bank menasar pada penetapan batas minimal daya beli yang dianggap terlalu kecil. Selain itu, indikator daya beli yang dipakai oleh World Bank dinilai terlalu universal, tidak memperhatikan keunikan kondisi wilayah-wilayah di negara berkembang. Merespon gugatan itu, World Bank kemudian menaikkan indikator batas minimal daya beli ke angka \$1.08. Beberapa tahun setelahnya, World Bank kembali menaikkan batas minimal daya beli itu menjadi \$1.90. Sekarang, World Bank menetapkan indikator daya beli di angka \$2.15 (Nanga et al., 2018). Artinya, apabila menggunakan perspektif ekonomi World Bank, seseorang bisa dikatakan miskin ekstrem apabila daya beli hariannya di bawah \$2.15. Dengan demikian, kemiskinan ekstrem dapat didefinisikan sebagai kondisi atau situasi di mana seseorang tidak memiliki daya beli di atas \$2.15. Melalui penetapan tersebut, setiap orang yang daya belinya di bawah \$2.15 akan didata oleh Badan Pusat Statistik di pemerintah nasional atau daerah terkait, lalu kemudian diagregatkan. Agregat itulah yang pada taraf selanjutnya muncul dalam bentuk persen, misalnya jumlah kemiskinan ekstrem di kabupaten A pada tahun 2024 adalah 5 persen, angka kuantitatif 5 persen itu merupakan hasil agregasi dari penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Pendekatan ekonomi World Bank, meskipun banyak dipakai oleh pemerintah (termasuk di sini Pemerintah Indonesia), dinilai tidak memadai untuk melihat kompleksitas kemiskinan. Ketergantungan pada dimensi ekonomi dan kuantitatif membuat pengertian konseptual kemiskinan ekstrem yang diciptakan oleh World Bank mengabaikan aspek-aspek kualitatif seperti akses dan kapasitas. Pengabaian itu mendorong Amartya Sen menciptakan pendekatan baru yang sekarang dikenal dengan *capability approach*. Pendekatan ini secara ringkas menaruh fokus pada aspek kapasitas individu. Dengan menggunakan *capability approach*, seseorang dapat dikatakan sebagai miskin bukan karena daya beli atau kemampuan konsumsinya berada di bawah \$2.15, tapi lebih karena tidak adanya upaya untuk mengakomodasi kepentingan pengembangan diri dari kelompok miskin (Adji et al., 2020, 2022; Hidayat & Asmanto, 2020). Konsep pengembangan diri ini

berkaitan dengan kualitas individu. Dengan kata lain, ketika aktor pembangunan mengalihkan fokus ke aspek pengembangan diri, kelompok miskin berpotensi memiliki kapasitas untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pendekatan kapasitas yang diinisiasi oleh Amartya Sen menjadi landasan bagi United Nations Development Programme (UNDP) guna mengembangkan *Human Development Index* (HDI). Berbeda dari perspektif ekonomi World Bank, HDI mencoba melihat kemiskinan dari sudut pandang multi-dimensi yang meliputi indikator-indikator penting seperti pendapatan per kapita, ekspektasi hidup, angka partisipasi pendidikan dan literasi. Ragam indikator itu tidak hanya memuat aspek ekonomi semata, namun melibatkan faktor-faktor penting lain yang menjadi bagian integral dari kualitas hidup. Ekstensifikasi indikator itu merupakan bagian tak terpisahkan dari pandangan pembangunan yang dipakai oleh UNDP, yakni pembangunan yang menekankan pada pengembangan kapasitas manusia. Pandangan pembangunan itu menggarisbawahi nilai dasar dan universal bagi kehidupan seperti hak untuk terus sehat, hak untuk berpengetahuan, dan hak untuk mendapatkan akses kepada sumber daya yang penting bagi keberlanjutan penghidupan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua definisi dan konsep mengenai kemiskinan ekstrem di tingkat global. Pertama, kemiskinan ekstrem yang didasarkan pada indikator daya beli sebesar \$2.15 per orang per hari. Definisi atau konsep ini diciptakan oleh World Bank pada akhir tahun 1980-an, dan menekankan pada kemampuan seseorang membiayai konsumsi dalam setiap harinya. Dengan menggunakan konsep tersebut maka seseorang bisa dikategorikan ke dalam miskin ekstrem apabila daya belinya tidak melebihi \$2.15 per hari. Sementara itu, pandangan kedua yang diinisiasi oleh Amartya Sen dan UNDP fokus pada pengembangan diri dan kapasitas individu. Menurut perspektif ini, kemiskinan ekstrem mesti dilihat dari sudut pandang yang lebih luas meliputi pendapatan per kapita, ekspektasi hidup, dan angka partisipasi pendidikan serta literasi. Berbeda dari definisi konseptual kemiskinan ekstrem milik World Bank, indikator-indikator yang diimplementasikan UNDP banyak menyinggung aspek-aspek kualitatif seperti hak untuk terus sehat, hak untuk berpengetahuan, dan hak untuk mendapatkan akses kepada sumber daya yang penting bagi keberlanjutan penghidupan. Dengan menyimak dua konsep itu, maka kajian ini memandang perlu untuk memadukannya. Di satu sisi kemiskinan nampak dari tingkat pendapatan dan konsumsinya, tetapi di sisi lain juga nampak dari akses mereka pada pelayanan publik, dan hak-hak dasar lainnya.

2.1.2. Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Keseriusan itu tampak dalam pembentukan Tim Nasional Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2010 dalam masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Secara legal, TNP2K diresmikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. TNP2K memiliki dua mandat utama: (a) menetapkan sistem penargetan nasional yang berisi daftar nama dan alamat penerima bantuan sosial dan (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai macam kebijakan pengentasan kemiskinan agar dapat mencapai penerima bantuan sosial. Kedua mandat itu diimplementasikan melalui koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bersinggungan dengan isu kemiskinan. Lebih lanjut, TNP2K mendapat tiga tugas utama, yakni (a) mengembangkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, (b) mensinergikan kebijakan dan program kemiskinan diantara kementerian melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi, dan (c) melakukan supervisi serta mengontrol implementasi aktivitas dan program penghapusan kemiskinan.

Mandat dan tugas utama itu relatif tidak berubah meskipun pemimpin berganti. Pada periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), TNP2K masih menjadi tulang punggung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Bedanya, target penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan Jokowi lebih ambisius ketimbang SBY. Dalam masa kepemimpinan keduanya, misalnya, Jokowi memasang target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Untuk mencapai target besar tersebut, TNP2K telah membuat kerangka utama penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kerangka itu dibagi menjadi dua, yakni kerangka kebijakan makro dan kerangka kebijakan mikro.

Dalam kerangka kebijakan makro terdapat tujuh unsur kebijakan, yakni menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal. Kerangka kebijakan mikro dapat dibagi menjadi dua strategi utama: menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Instrumen kebijakan yang terlibat dalam agenda penurunan beban pengeluaran adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (PKH), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat, dan Bantuan Tunai Pendidikan Kartu Indonesia Pintar. Sementara itu, perangkat teknokratis yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan adalah akses permodalan, peningkatan aset produktif, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, dan pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan.

Di tingkat nasional, dua kerangka kebijakan itu termanifestasikan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian terkait. Kerangka kebijakan makro dieksekusi oleh badan atau kementerian yang berhubungan dengan urusan ekonomi makro seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berbagai kementerian itu berperan menjalankan kebijakan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas, pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi di level mikro. Sementara itu, bentuk konkret dari kerangka kebijakan mikro dapat diamati dari ragam program perlindungan sosial dan program kewirausahaan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (ATENSI, PKH, PENA), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kartu Indonesia Pintar), Kementerian Kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (pelatihan UMKM).

Selain pemerintah pusat, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian besar bagi pemerintah di level daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi. Program pengentasan kemiskinan di provinsi dan daerah mengikuti model tata kelola dan strategi kebijakan yang dijalankan di level nasional. Pada aspek tata kelola, pemerintah di daerah diminta untuk membuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Di level provinsi dan kabupaten, TKPKD berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. Idealnya, setiap daerah membentuk TKPKD agar koordinasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan lancar. Namun, dalam kasus tertentu, masih ada pemerintah level daerah yang belum membentuk model tata kelola kolaboratif seperti TKPKD. Dalam konteks strategi kebijakan, TKPKD atau pemerintah daerah juga menggunakan strategi kebijakan makro dan mikro yang diaplikasikan oleh pemerintah pusat. Kerangka kebijakan makro yang dipakai oleh pemerintah level daerah meliputi pengendalian inflasi, pembukaan lapangan kerja, dan investasi. Selanjutnya, untuk kerangka kebijakan mikro, TKPKD atau pemerintah di daerah mendayagunakan strategi penguatan perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan melalui kegiatan pemberdayaan serta

kewirausahaan. Untuk memperjelas bagaimana dinamika penerapan program dan kebijakan ekstrem di setiap daerah, di bawah ini disajikan beberapa contoh konkret ragam program dan kebijakan yang telah diterapkan di berbagai daerah. Pemilihan daerah didasarkan pada kemiripan konteks geografi dan ekonomi dengan Kabupaten Belu agar dapat dijadikan pertimbangan dalam proses rekomendasi kebijakan.

Program atau kebijakan yang paling umum dilakukan oleh pemerintah pada level daerah adalah membentuk *collaborative governance*. Berbagai daerah di Indonesia, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten, telah membentuk tata kelola kolaboratif sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Bentuk *collaborative governance* yang paling umum diimplementasikan adalah TKPKD. Pembentukan TKPKD ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menentukan bahwa hadirnya TKPKD merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah di level provinsi, kabupaten, dan kota. Berlandaskan peraturan legal tersebut, banyak pemerintah di level daerah yang langsung merespon dengan membuat TKPKD. Salah satu yang berinisiatif membentuk TKPKD adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. Melalui TKPKD, Pemerintah Kabupaten Ngada mencoba merumuskan kebijakan pengurangan kemiskinan lewat proses-proses kolaboratif yang melibatkan berbagai OPD di wilayahnya (Niki et al., 2020). Perumusan kebijakan itu dilakukan lewat Musyawarah Perencanaan Pengembangan Daerah (Musrenbang) yang dikerjakan di level kabupaten. Meskipun telah berjalan, tata kelola itu belum berjalan maksimal karena alasan berikut: (a) TKPKD tidak memainkan perannya secara optimal karena hanya dianggap formalitas belaka untuk memenuhi permintaan dari pemerintah pusat dan provinsi, (b) aktor yang terlibat dalam proses perencanaan program kebijakan kemiskinan di daerah didominasi oleh pemerintah di level daerah, (c) banyak program yang tidak mencerminkan kontekstualitas wilayah karena program sudah ditentukan dari atas, (d) pemerintah pada level daerah kurang memiliki ruang untuk membuat kebijakan atau program yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

Strategi kebijakan kedua adalah menguatkan perlindungan sosial bagi kelompok miskin ekstrem. Program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah di level daerah, atau bahkan pemerintah desa, seringkali berfungsi sebagai komplementer dari bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (ATENSI, BPNT, PKH), Kementerian Kesehatan (KIS), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KIP). Pemerintah Kabupaten Belu, misalnya, memiliki program Beras Sejahtera (Rastra) yang ditujukan kepada warga yang tergolong ke dalam keluarga miskin ekstrem. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Belu juga memberikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada penduduknya yang memang sangat membutuhkan akses layanan kesehatan. Dalam urusan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Belu juga sudah dan sedang bekerja sama dengan UNICEF untuk menangani anak putus sekolah. Bersama UNICEF, Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat dukungan advokasi, pembentukan peraturan, pembuatan kelompok kerja, mengadakan gerakan kembali bersekolah.

Kebijakan pengentasan kemiskinan ketiga yang jamak dieksekusi oleh pemerintah di level daerah adalah upaya perluasan peluang ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat atau pemberian modal usaha. Di Kabupaten Buton, misalnya, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan cara memberi bantuan modal usaha kepada nelayan dan peternak. Pemerintah Kabupaten Buton membagikan bantuan sarana produksi kepada nelayan seperti perahu, karamba, kainting, sedangkan untuk peternak pemerintah kabupaten menghibahkan ternak kambing, ternak ayam, dan mesin pengering (Rahim et al., 2014). Bergeser ke Provinsi Papua, di Kabupaten Yahukimo pemerintah daerah pernah membuat program bernama

Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) pada tahun 2007. Skema program tersebut sangat sederhana: pemerintah di level daerah memberikan bantuan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000 kepada setiap kampung; ketua kampung bersama masyarakat diharapkan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan kemajuan wilayah kampung seperti pengembangan usaha ekonomi produktif, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, pendidikan dasar serta pembangunan infrastruktur (Sawir & Maradona, 2023). Dengan dana dan ragam aktivitas yang dilakukan oleh warga kampung, Pemerintah Kabupaten Yahukimo berharap kemiskinan dapat teratasi. Terakhir, di Kabupaten Tuban, pemerintah kabupaten mencoba menciptakan program kemiskinan yang fokus pada kegiatan ekonomi di sektor pertanian dan bersifat *end-to-end* (Kurniawan et al., 2014). Pada tahapan awal atau hulu, pemerintah di level daerah memberikan paket bantuan sarana produksi bagi kelompok masyarakat keluarga miskin. Kemudian, pada tahap proses pertanian, kelompok masyarakat keluarga miskin didampingi oleh tenaga pendamping yang bertugas transformasi Program Anti Kemiskinan bidang pertanian dan melakukan sosialisasi program. Pada tahap hilir, hasil pertanian yang diproduksi oleh petani dari kelompok keluarga miskin akan ditampung oleh mitra usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga kesimpulan sementara (hipotesis) yang bisa diajukan mengenai program penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Stimulasi legal berupa Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pembentukan TNP2K menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kedua, strategi pengentasan kemiskinan di level nasional dan daerah bersandar pada dua kerangka kebijakan, yakni kebijakan makro dan kebijakan mikro. Kerangka kebijakan makro berhubungan dengan urusan-urusan penting seperti kebijakan investasi, penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas, pembangunan infrastruktur. Pada praktiknya, kebijakan makro ini lebih banyak diputuskan dan dijalankan oleh kementerian-kementerian di level pusat. Sementara itu, untuk kerangka kebijakan mikro, fokus utamanya adalah penguatan perlindungan sosial dan peningkatan kemampuan ekonomi. Aspek perlindungan sosial dikontrol dan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (ATENSI, BPNT, PKH), Kementerian Kesehatan (KIS), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KIP). Jangkauan program perlindungan sosial yang diimplementasikan oleh tiga kementerian itu sangat luas sehingga dalam perkembangannya pemerintah di level daerah tidak terlalu banyak terlibat pada aspek ini. Pemerintah di level daerah, baik yang ada di provinsi dan kabupaten, lebih banyak mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui bantuan modal usaha, program pemberdayaan, dan pendampingan usaha.

Ketiga, agenda penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dilaksanakan melalui kerangka *collaborative governance* yang memiliki hierarki yang runtut dan jelas. Pada level pusat, program pengurangan kemiskinan ekstrem dipimpin oleh TNP2K yang bertugas sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar lintas kementerian. Di tingkat provinsi dan kabupaten, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kebijakan pengentasan kemiskinan dipimpin oleh TKPKD yang tanggung jawabnya sama dengan TNP2K, yakni melakukan koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kaitan dengan agenda penghapusan kemiskinan ekstrem. Tata kelola kolaboratif serta hierarki yang runtut dan jelas itu diharapkan mampu mewujudkan konsistensi program penghapusan kemiskinan ekstrem dari pusat hingga ke daerah. Ringkasnya, dengan pengaturan jenjang yang ketat tersebut, pemerintah nasional ingin kebijakan-kebijakan yang sudah menjadi prioritas di level pusat bisa diterapkan juga di tingkat provinsi dan kabupaten agar program dapat

berjalan efektif dan berlangsung serentak. Adapun agenda wacana penghapusan kemiskinan ekstrem di Belu dipaparkan pada Bab V, khususnya pada sub-bab responsivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

2.2. Seminar Awal

Kegiatan seminar awal terdiri dari dua agenda. Pertama, paparan proposal penelitian dan temuan penelitian lapangan selama 12 hari di lapangan. Temuan lapangan itu terdiri dari hasil observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan FGD di desa. Kedua, FGD tingkat Kabupaten dengan mengundang sejumlah Perangkat Daerah, LSM, Tim Pengendali Mutu, Akademisi, dan tokoh masyarakat. Agenda awal, seminar awal dan FGD tingkat Kabupaten dijadwalkan sebelum tim peneliti melakukan penelitian lapangan di 1 (satu) kelurahan dan 3 (tiga) desa. Namun, karena beberapa pertimbangan waktu dan agenda BP4D Belu dan OPD lainnya, seminar awal dijadwalkan di akhir kegiatan lapangan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Waktu : 09.00 – 16.00
Tempat : Aula BP4D Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

2.2.1. Deskripsi Peserta

Peserta kegiatan dari berbagai latar belakang. Berikut rincian peserta FGD, yaitu perwakilan PD, LSM, Tim Pengendali Mutu Kabupaten Belu, Akademisi, Perangkat Kelurahan, Kepala Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jumlah peserta sejumlah 30 orang.

2.2.2. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh tim peneliti setelah melakukan kegiatan penelitian lapangan. Materi yang disampaikan terkait tiga hal, sebagai berikut: 1) Latar belakang dan Tujuan Kajian; 2) Temuan awal hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan FGD kelurahan dan desa di 4 lokasi penelitian; dan 3) FGD tingkat kabupaten terkait program-program yang telah dijalankan untuk pengentasan kemiskinan.

2.2.3. Pelaksanaan

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Belu (Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM). Kemudian dilanjutkan oleh Kepala BP4D Belu (Rine Bere Baria, ST), memaparkan kondisi dan situasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu, NTT. Kemudian kegiatan dilanjutkan oleh Tim Peneliti UGM (Mohammad Ghofur, S.Sos, M.Sc dan Olga Aurora Nandiswara, S.Ant., M.A), menyampaikan pemaparan: 1) latar belakang dan tujuan kajian dan 2) temuan awal hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan FGD kelurahan dan desa di 4 lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Fatubena, Desa Faturika, Desa Tohe, dan Desa Kenebibi. Penyampaian materi dan paparan temuan lapangan dengan metode *story telling*. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah FGD Kabupaten. Pada kegiatan ini, tim peneliti sebagai fasilitator bertugas sebagai pemantik diskusi secara kritis dan mendetail. Fasilitator lebih banyak mendengar masukan dan kisah-kisah dinamika terkait upaya melalui program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belu dalam kurun 3-5 tahun terakhir.

2.2.4. Evaluasi

Kegiatan berlangsung dengan kondusif. Masing-masing perwakilan stakeholder mendapat kesempatan mengutarakan pengalaman dan pendapat. Dari kegiatan ini, dapat mencatat isu-isu masalah utama dalam program pengentasan kemiskinan.

2.2.5. Dokumentasi

Gambar II.1 Dokumentasi Kegiatan FGD



Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti, 2024

Gambar II.2 Dokumentasi Kegiatan FGD



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

2.3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. Observasi lapangan pada kegiatan hidup keseharian masyarakat sebagai berikut:

- a. Observasi di wilayah pemukiman miskin ekstrem tiap lokasi penelitian;
- b. Observasi di rumah keluarga miskin ekstrem;
- c. Observasi kegiatan budidaya hortikultura;
- d. Observasi kegiatan budidaya tanaman bahan pangan (padi dan jagung);
- e. Observasi usaha ternak sapi;
- f. Observasi usaha ternak babi.

2.4. Wawancara Mendalam

2.4.1. Deskripsi Informan

2.4.1.1 Keuskupan Atambua

Peneliti bertemu dengan Romo Lusius Tae Mau, Pr dan Romo Edo Oeiu, Pr. Romo Lusius dari Seminari Menengah Lalian Keuskupan Atambua memberikan informasi tentang kondisi umum masyarakat di Kabupaten Belu dari segi sosio-kultural. Romo Lusius berpesan bahwa diperlukan sinergitas antara program pemerintah dengan NGO termasuk organisasi keagamaan. Keuskupan Atambua pernah memiliki program 3Ber yakni Berpendidikan (kesadaran kritis), Berpengaruh (partisipasi/keterlibatan), Berkedudukan (berdaya, memiliki power, berdaulat).

Romo Edo, sebagai pengurus PSE (Pengembangan Sosial Ekonomi) Keuskupan Atambua, memberikan informasi terkait aspek ekonomi dan penghidupan Kabupaten Belu yang terkenal

sebagai salah satu pusat penyumbang Pekerja Migran Indonesia, dan rawan human trafficking. Budaya merantau punya dampak besar ke penghidupan keluarga. Memberi kiriman, tapi minus di pola asuh dan kerentanan keluarga. Koperasi harian dan hutang piutang memunculkan masalah serius.

Tantangan krisis iklim memunculkan inisiatif program pertanian organik di PSE dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan pakan ternak alternatif. Selain itu PSE melakukan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan bersama Credit Union (CU) melalui program pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan melalui Komunitas Basis (Kombas). Kombas maksimal anggota 20 orang. Setahun sekali PSE mengadakan pameran Ekonomi Kreatif. Dilaksanakan oleh 67 paroki + para suster = total 90an stan. Romo Edo bercerita bahwa umat ini sesungguhnya kaya dan kreatif, tapi butuh bantuan promosi dan branding.

2.4.1.2 Credit Union Kasih Sejahtera

Program *Credit Union Kasih Sejahtera* terdiri dari simpan pinjam, literasi keuangan, dan pemetaan potensi usaha. Dalam satu kelompok terdiri dari 1-20 anggota. Simpan pinjam untuk bantuan modal usaha, pendidikan, perumahan/ tempat tinggal, simpanan masa sulit, dan kematian. CU Kasih Sejahtera ada program pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha. Pelatihan dan pendampingan tersebut untuk menjamin keberlanjutan sirkulasi simpan-pinjam CU Kasih Sejahtera. Kegiatan CU Kasih Sejahtera secara informal terintegrasi dengan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat, seperti program PKH. CU Kasih Sejahtera mendampingi dalam penguatan literasi untuk manajemen keuangan keluarga, termasuk mengatur dan mengelola dana subsidi dari pemerintah. Selain itu, program-program penguatan potensi usaha anggota CU Kasih Sejahtera bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk sistem irigasi tetes.

2.5. Diskusi Terpimpin/FGD

Kegiatan FGD di tingkat kelurahan dan desa dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. Tiap kelurahan dan desa dilakukan FGD satu kali guna menghimpun data masalah-masalah utama dari kemiskinan ekstrem dari berbagai sektor, yaitu lingkungan, fasilitas umum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya. Selain menghimpun data terkait masalah dasar dari kemiskinan ekstrem di desa, FGD tingkat kelurahan dan desa juga menghimpun data terkait upaya yang telah dilakukan atau peluang rencana tindak lanjut untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

Berikut rincian alokasi waktu pelaksanaan FGD di tingkat kelurahan dan desa:

- a. FGD I di Kelurahan Fatubenao dilaksanakan pada Kamis, 22 Agustus 2024 di Posyandu Sorosikun, Kelurahan Fatubenao.

Gambar II.3 Kegiatan FGD di Kelurahan Fatubenao



- b. FGD II di Desa Faturika Kecamatan Raimanuk dilaksanakan pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di Kantor Desa Faturika.

Gambar II.4 Kegiatan FGD di Kantor Desa Faturika



- c. FGD III di Desa Tohe Kecamatan Raihat dilaksanakan pada Senin, 26 Agustus 2024 di Kantor Desa Tohe.

Gambar II.5 Kegiatan FGD di Kantor Desa Tohe



- d. FGD IV di Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak dilaksanakan pada Selasa, 27 Agustus 2024 di Kantor Desa Kenebibi.

Gambar II.6 Kegiatan FGD di Desa Kanebibi



BAB III Profil Kabupaten Belu

3.1. Geografi dan Topografi

Kabupaten Belu merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2024, Kabupaten Belu memiliki luas wilayah sebesar 1.125,14 km², dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT – 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS. Menurut pembagian wilayahnya, Kabupaten Belu terdiri dari 12 kecamatan, 69 desa, serta 12 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas daerah 223,914 km² atau 19,50 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 km² atau 0,98 % dari luas wilayah Kabupaten Belu.

Secara geografis, Kabupaten Belu terletak di daratan Pulau Timor. Secara umum, Kabupaten Belu memiliki empat batas administrasi: di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Ombai, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malaka, di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), di sebelah Timur berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL). Pada batas administrasi terakhir, Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Timor Leste sepanjang 149,1 km. Jumlah wilayah yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan RDTL sebanyak 7 kecamatan dan 28 desa. Selain 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, dan Kecamatan Atambua Selatan.

Kondisi topografi didominasi oleh wilayah dataran rendah dan perbukitan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kemiringan lahan di Kabupaten Belu dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis: 1) kemiringan lahan 0-8% (tanah dengan kemiringan lereng yang dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil), 2) kemiringan lahan 8-15% (dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi), 3) kemiringan lahan 15-25% (memungkinkan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya), 4) kemiringan lahan 25-45% (jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi), kemiringan lahan di atas 45% (kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya).

Letak geografis dan topografi Kabupaten Belu membuat wilayah ini cukup sulit diakses, sehingga menimbulkan ketimpangan yang tinggi. Kondisi geografis yang ekstrem, yang membedakan antara wilayah kering dan subur, berpotensi menciptakan ketimpangan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat mengakses sumber daya alam, seperti air, kesuburan lahan, dan hasil-hasil sumber daya alam lainnya. Ketimpangan yang sangat ekstrem ini menyebabkan keterisolasian suatu komunitas dalam menjalankan produktivitas sehari-hari. Semakin besar jurang ketimpangan, semakin parah pula kondisi kemiskinan ekstrem di suatu daerah. Kemiskinan tersebut juga terlihat melalui aksesibilitas wilayah yang sulit, seperti di Papua,

Papua Barat, NTT, dan Maluku. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi wilayah yang terisolasi oleh perbukitan dan lereng curam. Keterisolasian tersebut menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta penyelenggaraan layanan dasar bagi komunitas masyarakat.

3.2. Demografi

Tingginya tingkat kepadatan penduduk pada suatu daerah, biasanya bersamaan dengan tingginya tingkat ketergantungan penduduk. Meskipun demikian, tidak dipungkiri juga pada tingkat kepadatan penduduk yang rendah, terdapat kondisi yang rentan terhadap kemiskinan atau tingginya tingkat ketergantungan masyarakat. Dinamika komposisi demografi berdasarkan usia dan jenis kelamin pun juga dapat dianalisis untuk memetakan tren kerentanan berdasarkan keterbatasan fisik karena usia dan jenis kelamin pada sektor ekonomi, sosial, dan kultural. Dengan demikian, merumuskan wacana strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Belu dapat dilakukan secara lebih inklusif dan adaptif.

Pada tahun 2023, terdapat 231.008 orang yang tinggal di Kabupaten Belu, dengan komposisi gender yang relatif seimbang antara laki-laki (115.654 orang) dan perempuan (115.354 orang) serta tersebar di 12 (dua belas wilayah) kecamatan yang masuk ke dalam teritori Kabupaten Belu. Jumlah penduduk di Kabupaten Belu bertambah sebanyak 4.701 orang menjadi 235.709 orang pada tahun 2024. Secara umum, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tren perkembangan penduduk di Kabupaten Belu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021 ketika jumlah penduduk berkurang. Secara umum, tren perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Belu 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Belu	223.176	220.764	224.306	231.008	235.709

Sumber: Data BPS Kabupaten Belu, 2024

Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Belu berjumlah 223.176 orang, satu tahun setelahnya angka itu menurun menjadi 220.764 orang. Tahun 2022, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 6.702 orang pada tahun 2023 menjadi 231.008 orang, dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 235.709 orang.

Persebaran penduduk di Kabupaten Belu relatif tidak merata. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu tinggal di wilayah yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Belu, terdapat enam kecamatan yang memiliki penduduk lebih dari dua puluh ribu orang. Enam kecamatan tersebut adalah Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, dan Kakuluk Mesak. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (ribu)
Rai Manuk	17.768
Tasifeto Barat	25.598

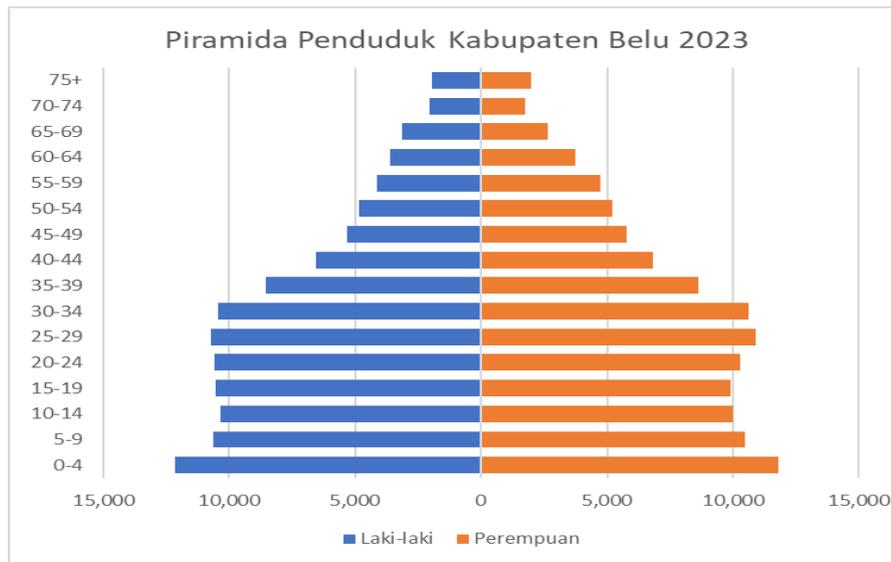
Kakuluk Mesak	23.806
Nanaet Duabesi	5.112
Atambua	32.747
Atambua Barat	25.358
Atambua Selatan	27.733
Tasifeto Timur	28.275
Raihat	14.897
Lasiolat	7.503
Lamaknen	13.149
Lamaknen Selatan	9.062

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Belu, 2024

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, penduduk di Kabupaten Belu tersentral di enam kecamatan. Di pusat kabupaten, lebih tepatnya di Kota Atambua, Atambua Barat, dan Atambua Selatan, terdapat 85.838 orang yang menetap di wilayah tersebut. Sementara itu, di tiga tempat lainnya, yakni Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, dan Kakuluk Mesak, jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut berjumlah 77.679. Jika ditotal, jumlah penduduk di enam wilayah itu mencapai 163.517 orang. Artinya, lebih dari setengah penduduk di Kabupaten Belu hanya berada di Kecamatan Kota Atambua, Atambua Barat, Atambua Selatan, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, dan Kakuluk Mesak.

Selanjutnya, berkaitan dengan struktur penduduk, mayoritas penduduk di Kabupaten Belu adalah usia produktif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS pada tahun 2023, dari seluruh penduduk Kabupaten Belu, jumlah penduduk usia produktif, atau mereka yang berusia antara 15-59 tahun, Kabupaten Belu tercatat memiliki 144.648 penduduk. Sedangkan total penduduk usia tidak produktif, atau mereka yang berusia 0-14 tahun dan 60-75 tahun, berjumlah 86.360 orang. Apabila digambarkan dalam bentuk piramida, struktur penduduk Kabupaten Belu akan terlihat seperti piramida penduduk muda (ekspansif):

Gambar III.1 Piramida Penduduk Kabupaten Belu 2023



Sumber: Analisis Peneliti, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Belu didominasi oleh masyarakat yang masih sangat muda. Sementara itu, hampir seluruh penduduk non-produktif adalah individu yang masih berada di usia 0-14 tahun. Dua hal itu menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Belu sedang mengalami pertumbuhan penduduk. Tingginya tingkat natalitas (kelahiran) tersebut diimbangi oleh tingkat mortalitas (kematian) yang cukup tinggi. Fenomena tersebut, seperti yang terlihat pada gambar di atas, menyebabkan piramida penduduk Kabupaten Belu tampak padat di bawah dan menipis semakin ke atas. Melimpahnya penduduk yang berusia 0-14 tahun menambah beban ketergantungan penduduk produktif. Pada tahun 2023, angka beban ketergantungan di Kabupaten Belu sebesar 52,97. Artinya, pada tahun 2023 setiap 100 orang penduduk produktif (penduduk umur 14-65 tahun) di Kabupaten Belu harus menanggung 52 orang penduduk Kabupaten Belu yang tidak produktif (penduduk umur 0-14 tahun dan penduduk umur lebih dari 65 tahun). Dengan rasio ketergantungan sebesar 52,97, Kabupaten Belu memiliki *dependency ratio* yang tinggi. Besarnya rasio ketergantungan itu menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif masih sangat banyak. Dari situ, dampak terhadap penduduk produktif cukup jelas, yakni meningkatnya tekanan ekonomi yang harus dipikul oleh generasi sekarang dan mendatang karena mereka harus memenuhi kebutuhan anak dan orang tua. Beban ekonomi yang berlebih ini memaksa penduduk produktif mendistribusikan pendapatannya pada kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) keluarga non-produktif ketimbang berinvestasi pada peningkatan keterampilan atau SDM.

3.3. Sumber Daya Manusia

Hubungan tingkat sumber daya manusia dengan tingkat kesejahteraan hidup suatu komunitas masyarakat saling berkaitan. Pada daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi, biasanya tingkat sumber daya manusianya rendah. Sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur pada umumnya menghadapi berbagai permasalahan, yaitu rendahnya pendidikan, keterampilan, taraf hidup, dan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam, sehingga masyarakat sulit untuk keluar dari problem kemiskinan. Seperti konsep kemiskinan Robert Chambers, semakin rendah

akses pada layanan dasar (pendidikan, Kesehatan, dan layanan dasar lainnya), maka lingkaran kemiskinan akan terus membelenggu masyarakat.

Kondisi SDM di Kabupaten Belu masih belum terlalu baik. Sebagai contoh, skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu pada tahun 2023 adalah 67,50. Secara umum, berdasarkan kategorisasi IPM dari BPS, kondisi IPM di Kabupaten Belu masuk ke dalam kategori sedang. Masih jauh dari dua indikator di atasnya yaitu tinggi (70-79) dan sangat tinggi (>80). Apabila dibandingkan dengan rata-rata IPM di tingkat nasional, kondisi IPM di Kabupaten Belu masih tertinggal cukup jauh. Belum maksimalnya skor IPM Kabupaten Belu tampak pada data rata-rata lama sekolah serta angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar penduduk yang masih jauh dari harapan. Menurut data BPS, pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah Kabupaten Belu adalah 7,39 tahun. Artinya, berdasarkan data agregat tersebut, mayoritas masyarakat di Kabupaten Belu hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD). Selebihnya, penduduk Kabupaten Belu terpaksa putus sekolah dan bekerja membantu perekonomian keluarga sejak kecil.

Rendahnya capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belu dibuktikan oleh angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar penduduk yang didominasi oleh jenjang SD. Pada tahun 2022, angka partisipasi murni SD di Kabupaten Belu mencapai 95,88. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi sekolah pendidikan di tingkat dasar sudah sampai ke level universal. Akan tetapi, angka partisipasi murni pada tingkat SMP dan SMA terpaut cukup jauh dari angka partisipasi murni SD, yakni masing-masing 63,51 dan 50,85. Jarak yang sangat jauh antara angka partisipasi murni SD dan SMP serta SMA mengonfirmasi temuan BPS tentang rendahnya rata-rata lama sekolah Kabupaten Belu. Selain itu, angka partisipasi murni juga memperlihatkan seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Berlandaskan data yang sama, hampir seluruh siswa SD di Kabupaten Belu diisi oleh anak yang usianya sesuai dengan jenjang yang ditempuh. Pada taraf SMP dan SMA, lebih dari tiga puluh persen siswanya diisi oleh anak yang usianya tidak sesuai dengan jenjang yang sedang ditempuh. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3 Perbandingan Angka Partisipasi Murni dan Kasar di Kabupaten Belu

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI/Sederajat	95,88	95,88	113,64	112,22
SMP/MTs/Sederajat	63,51	63,51	83,64	79,60
SMA/SMK/MA/Sederajat	50,85	50,85	70,96	72,40

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2023

Hal yang sama juga terjadi pada angka partisipasi kasar. Pada jenjang SD, angka partisipasi kasar sudah mencapai taraf universal dengan skor 112,22. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, skornya masih berada pada angka 79,60 dan 72,40. Temuan itu menunjukkan bahwa angka siswa yang usianya berada di luar usia sekolah namun masih menempuh pendidikan pada jenjang SMP dan SMA cukup banyak. Hal itu menandakan adanya hambatan yang membuat penduduk di Kabupaten Belu tidak bisa melanjutkan pendidikan dari jenjang dasar menuju jenjang menengah secara langsung. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, beberapa siswa ada yang berhenti sekolah

terlebih dahulu dengan ragam alasan. Ketika kondisinya sudah lebih kondusif, mereka baru melanjutkan pendidikannya lagi.

Meskipun kondisi SDM di Kabupaten Belu belum sesuai dengan harapan, terdapat beberapa perkembangan yang patut dibanggakan. Salah satu perkembangan itu adalah tingkat melek huruf Kabupaten Belu yang sudah mendekati level universal. Tabel di bawah ini memuat informasi mengenai tingkat melek huruf di Kabupaten Belu berdasarkan kategori kelompok umur:

Tabel III.4 Angka Melek Huruf Kabupaten Belu

Kelompok Umur	Tahun 2022
15-19	99.16
20-24	97.98
25-29	99.66
30-34	96.01
35-39	96.35
40-44	96.27
45-49	93.85
50+	83.82

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2024

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh penduduk produktif di Kabupaten Belu memiliki skor melek huruf yang cukup baik. Penduduk yang berusia 15 tahun hingga 49 tahun mempunyai tingkat melek huruf di atas 90 persen. Tercatat hanya kelompok umur di atas 50 tahun yang skor melek hurufnya berada di bawah 90 persen. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar populasi Kabupaten Belu dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Kemampuan membaca dan menulis tersebut merupakan modal penting bagi pemerintah Kabupaten Belu untuk meningkatkan kondisi SDM di daerah. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Belu pada tahun 2020 adalah 62,14. Tingkat ketergantungan itu turun pada tahun 2021 menjadi 53,96, dan kembali turun kembali pada tahun 2023 52,97. Artinya, pada tahun 2023 setiap 100 orang penduduk produktif (penduduk umur 14-65 tahun) di Kabupaten Belu harus menanggung 52 orang penduduk Kabupaten Belu yang tidak produktif (penduduk umur 0-14 tahun dan penduduk umur lebih dari 65 tahun). Berdasarkan deskripsi tersebut, semenjak tahun 2020, Kabupaten Belu berhasil menurunkan tingkat beban ketergantungan di daerahnya. Tren itu merupakan sebuah peningkatan yang patut diapresiasi dan mesti terus ditingkatkan.

Meskipun begitu, dengan rasio ketergantungan sebesar 52,97, Kabupaten Belu masih memiliki *dependency ratio* yang cukup tinggi. Besarnya rasio ketergantungan itu menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif cukup tinggi. Dari situ, dampak terhadap penduduk produktif cukup jelas, yakni meningkatnya tekanan ekonomi yang harus dipikul oleh generasi sekarang dan mendatang karena mereka harus memenuhi kebutuhan anak dan orang tua. Beban ekonomi yang berlebih ini memaksa penduduk produktif mendistribusikan

pendapatannya pada kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) keluarga non-produktif ketimbang berinvestasi pada peningkatan keterampilan atau SDM. Di sisi yang lain, dominasi sektor pertanian dan nelayan, tingkat produktivitas yang kecil, serta rendahnya upah membuat beban ekonomi sangat terasa utamanya pada penduduk miskin dan miskin ekstrem. Tertekan oleh empat hal tersebut, penduduk produktif pada kategori miskin dan miskin ekstrem tidak bisa berbuat banyak. Mereka memang bekerja, tapi karena produktivitas sektor industri agrikultur dan kelautan di Kabupaten Belu rendah, pendapatan yang didapat oleh penduduk produktif miskin dan miskin ekstrem tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau kesehatan.

Korelasi kualitatif antara rasio ketergantungan, beban ekonomi, dan kemiskinan tersebut dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Menurut analisis BPS, peluang melimpahnya penduduk usia produktif tidak akan dinikmati oleh NTT hingga 2035. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh PRK BRIN dan PSKK UGM, hal itu terjadi karena tingkat kemiskinan di NTT sangat tinggi serta rendahnya kualitas dan daya saing SDM di NTT. Dua hal tersebut berkontribusi secara langsung pada besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Pada penduduk produktif miskin dan miskin ekstrem, tekanan ekonomi karena tingginya dependency ratio itu sangat terasa sebab sebagian besar dari mereka hidup di sektor ekonomi pertanian yang tidak produktif dengan tingkat pengupahan yang rendah.

Dalam periode 2010-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belu menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,61 persen per tahun. Hingga tahun 2017, capaian TPAK Kabupaten Belu tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT, namun sejak tahun 2018 hingga 2023 capaian kabupaten ini tercatat lebih rendah dibandingkan capaian provinsi. Dalam lima tahun terakhir, TPAK di Kabupaten Belu masih didominasi oleh laki-laki dengan rata-rata tingkat partisipasi sebesar 81,31 persen, sementara rata-rata TPAK perempuan tercatat sebesar 57,32 persen. Baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan di Kabupaten Belu menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan TPAK laki-laki menurun sedikit lebih cepat dibandingkan dengan TPAK perempuan, yakni sebesar 0,56 persen per tahun, sementara TPAK perempuan menurun sebesar 0,06 persen per tahun.

Secara umum, dalam rentang tahun 2010 hingga 2023, capaian TPT Kabupaten Belu menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,64 persen per tahun. Capaian TPT kabupaten ini mencapai puncak tertingginya pada tahun 2020, namun berkat upaya yang dilaksanakan oleh pemda dan pemangku kepentingan lainnya, capaian TPT Kabupaten Belu berangsur menurun sampai dengan tahun 2023 dengan rata-rata penurunan sebesar 9,77 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTT, capaian TPT Kabupaten Belu berada pada posisi ke-21 atau di atas capaian Kota Kupang. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Timor Barat, posisi Kabupaten Belu berada pada urutan ke-7.

3.4. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah merumuskan dan mengimplementasikan program/agenda konkrit untuk mengatasi problem kemiskinan ekstrem. Sejumlah Perangkat Daerah Kabupaten Belu telah mengkampanyekan hingga mengimplementasikan program-program peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Namun demikian, dalam kajian ini ditemukan perlunya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Belu dalam pengembangan program pengurangan kemiskinan yang lebih responsif terhadap kaum termarginalkan atau mengalami kemiskinan ekstrem.

Guna menjalankan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penataan organisasi dengan cara membagi urusan pelayanan publik ke beberapa organisasi perangkat daerah. Sebagaimana tertuang dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu, Pemerintah Kabupaten Belu mendistribusikan urusan wajib dan urusan pilihan kepada 39 Perangkat Daerah (PD). Setiap PD memiliki tujuan, tugas, dan fungsi pokok yang diuraikan dalam Peraturan Bupati Belu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.

Secara umum, penetapan tujuan, tugas, dan fungsi pokok tersebut diatur agar setiap PD dapat berperan dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggungjawab. Adapun daftar satuan organisasi perangkat daerah beserta tugas pokok dan fungsinya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.5 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Belu

No.	Perangkat Daerah	Tugas Pokok dan Fungsi
I	Badan	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi penunjang keuangan
3.	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi penunjang keuangan
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Fungsi penunjang kepegawaian dan diklat
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan pemerintah bidang kebakaran dan penyelamatan
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan kebangsaan dan politik
7.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Urusan Pengelolaan Perbatasan
II	Dinas	

1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintah bidang kesehatan
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan pemerintah bidang komunikasi informasi, bidang statistik dan persandian
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan perumahan
5.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintah bidang penanaman modal
7.	Dinas Pendidikan dan Olahraga	Urusan pemerintahan bidang pendidikan dan olahraga
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Urusan pemerintahan bidang perhubungan
9.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Kearsipan
12.	Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Urusan pemerintahan bidang koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan
15.	Dinasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	Fungsi penunjang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

1.	Sekretariat DPRD	Fungsi penunjang pendukung kegiatan DPRD
2.	Inspektorat	Fungsi penunjang pengawasan
3.	RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	Urusan pemerintah bidang kesehatan
III	Sekretariat Daerah	
1.	9 Bagian	Fungsi penunjang untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan penyusunan kebijakan daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. Pengoordinasian pelayan administratif dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara; d. Penetapan pemantauan dan evaluasi perangkat daerah.
IV	Kecamatan dan Kelurahan	
30.	12 Kecamatan, 12 Kelurahan	Fungsi penunjang untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengoordinasian urusan pemerintahan umum; b. Pengoordinasian urusan ketenteraman dan ketertiban; c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan; d. Pengoordinasian kegiatan kesejahteraan sosial; e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; g. Pengoordinasian prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. Pengoordinasian pemerintahan kelurahan.

Sumber: Analisis Data Peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Belu memiliki 27 PD yang berada di tingkat kabupaten dan 12 lainnya berada di tingkat kecamatan. Setiap PD memiliki fungsi dan tugas pokok khusus sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Peraturan Bupati. PD yang beroperasi pada level

kabupaten mempunyai tugas yang lebih spesifik daripada PD yang berjalan di level kecamatan maupun kelurahan.

3.5. Lingkungan dan Tata Ruang Wilayah

Kelestarian lingkungan merupakan kebutuhan penting dalam program berkelanjutan yang diamanatkan dalam SDGs. Secara fisik, tata ruang Belu masih mengikuti kontur lanskap alam, sehingga ke depan tantangan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat tata ruang yang semakin lestari, namun juga menjawab tantangan kebutuhan pembangunan. Selain itu, perlu memastikan bahwa tata ruang pedesaan di wilayah Belu bisa memberikan akses bagi penduduk khususnya kelompok miskin untuk memperoleh penghidupan dari sumber daya yang potensial berada di wilayah tersebut. Misalnya petani bisa melakukan usaha tani dengan ditopang irigasi yang memadai, peternak juga berpeluang untuk mengelola penghidupan karena padang rumput yang berkecukupan untuk pakan.

Kabupaten Belu merupakan wilayah yang dilengkapi dengan keragaman kondisi lingkungan. Selain mempunyai dataran rendah dan perbukitan yang banyak digunakan untuk kepentingan permukiman, pertanian, dan peternakan, Kabupaten Belu juga dikenal sebagai daerah pemilik kawasan lindung yang luas. Di Kabupaten Belu, kawasan lindung terbagi menjadi enam kawasan, yakni kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar bendungan, kawasan ekosistem mangrove. Dari enam kawasan tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air merupakan area dengan luas zona yang paling lebar dengan total luas mencapai 36.335 ha. Di dalam salah satu kawasan lindung tersebut, terdapat keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Menurut penelitian Julinda Afonso et al (2015), di Kawasan Ekosistem Mangrove Pantai Atapupu hidup tujuh jenis fauna. Tujuh fauna tersebut adalah Kepiting Bakau (145 individu), Siput Bakau (98 individu), Siput Batik (86 individu), Siput Haritum (51 individu), Siput Sihik Hitam (46 individu), Siput Kerucut (33 individu), Ikan Gelodok (27 individu). Dalam kajiannya, peneliti menggolongkan ketujuh fauna tersebut ke dalam kategori sedang menurut nilai tingkat keanekaragamannya.

Dengan profil lingkungan seperti itu, Kabupaten Belu adalah salah satu daerah di Provinsi NTT yang memiliki potensi SDA dan pariwisata cukup bagus. Pada perkembangannya, potensi itu selanjutnya dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat di Kabupaten Belu. Ragam aktivitas seperti pertanian, peternakan, hingga produksi kayu dilakukan di beberapa wilayah. Usaha ekonomi itu menimbulkan dilema tersendiri karena adanya kekhawatiran menurunnya daya dukung lingkungan. Namun, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, kondisi lingkungan di Kabupaten Belu justru menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel III.6 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan	57,93	67,79	73,24	77,28	80,91
2.	Indeks Kualitas Air	36,67	56,67	66	75	80
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,6	66,6	68,6	71,6	75,6
4.	Indeks Kualitas Udara	76,31	85,37	86,66	87,14	88,9

Sumber: Data SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2020.

Empat indeks yang tampak pada tabel di atas memberikan sedikit gambaran mengenai peningkatan kondisi lingkungan di Kabupaten Belu. Dari empat indeks yang ada, semua data yang ada menunjukkan konsistensi perkembangan. Pada tahun 2020, Kabupaten Belu mendapat skor 80,91 untuk kategori indeks lingkungan hidup, 80 untuk kategori indeks kualitas air, 88,9 untuk kategori indeks kualitas udara, dan 75,6 untuk kategori indeks kualitas tutupan lahan. Dengan mendasarkan pada Kementerian LHK, kondisi lingkungan hidup, kualitas air, dan kualitas udara di Kabupaten Belu masuk ke dalam kategori sangat baik. Sedangkan pada kategori indeks kualitas tutupan lahan, Kabupaten Belu tergolong ke dalam kelompok penilaian baik. Dua hal itu merupakan sinyal tentang baiknya kondisi lingkungan di Kabupaten Belu.

3.6. Ekonomi Makro

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, secara teori memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Todaro dan Smith (2015) menyebutkan pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kualitas hidup manusia yang terdiri dari tiga hal, yaitu *sustenance* (kemampuan memenuhi kebutuhan dasar), *self-esteem* (harga diri), dan *freedom* (kebebasan). Proses pembangunan ini membutuhkan waktu yang relatif panjang dan ditandai dengan adanya perubahan struktural. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu wilayah secara berkesinambungan untuk menuju pada keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentase perubahan Produk Domestik Bruto (untuk tingkat nasional) dan produk Domestik Regional Bruto (untuk tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten/kota). Dalam penyampaianya, PDB maupun PDRB disajikan dengan menggunakan perhitungan harga berlaku (selanjutnya disebut dengan ADHB) dan harga konstan (ADHK). Nilai PDB maupun PDRB ADHB memiliki nilai yang lebih tinggi daripada PDB maupun PDRB ADHK. Hal ini disebabkan harga berlaku menggunakan harga pada saat dimana PDB maupun PDRB dihitung dimana dalam harga tersebut memperhitungkan kenaikan harga (inflasi). Sementara itu PDB maupun PDRB ADHK menggunakan harga yang konstan, misalnya tahun 2010 sebagai tahun dasar, sehingga kenaikan harga tidak dihitung dalam penghitungan ini. Pada bagian ini akan digunakan data perekonomian bersumber dari publikasi (website) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu dan Provinsi NTT.

Kabupaten Belu memiliki kinerja ekonomi yang cukup baik jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu tahun 2011 hingga 2023 secara rata-rata tercatat sebesar 4,47% dan dalam 4 tahun terakhir (2020-2023) pertumbuhannya rata-rata mencapai 2,27%. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Kabupaten Belu tidak pernah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (kontraksi) sebagaimana banyak dialami oleh perekonomian di banyak wilayah di Indonesia sebagai akibat dari Covid-19. Apabila dilihat dari besaran ekonomi di Kabupaten Belu dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka terdapat perbedaan yang cukup nyata jika digunakan pendekatan harga berlaku dan harga konstan (tahun 2010 sebagai tahun basis). Pada tahun 2010 PDRB Kabupaten Belu tercatat sebesar Rp 1,834 triliun dan meningkat menjadi Rp 3,23 triliun pada 2023 jika dihitung dengan menggunakan harga konstan. Sementara itu nilai PDRB Kabupaten Belu meningkat lebih tinggi menjadi Rp 5,48 triliun apabila dihitung menggunakan harga berlaku. Secara umum jika dihitung pertumbuhan ekonomi pertahun selama periode 2010-2023 Kabupaten Belu sebesar 2,39% (dengan menggunakan harga konstan) dan 8,13% (dengan menggunakan harga berlaku). Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Kabupaten Belu cukup baik dan stabil meskipun memiliki nilai PDRB yang masih

relatif kecil. Meskipun dari segi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Belu memiliki kinerja yang cukup baik, namun diperlukan upaya untuk terus meningkatkan PDRB.

Komposisi tingkat capaian PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 2013-2023 tidak banyak mengalami perubahan. Jika dibandingkan capaian PDRB pada 2013, maka Kota Kupang menempati urutan pertama dengan nilai PDRB sebesar Rp 11,37 triliun. Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang menempati urutan kedua dan ketiga dengan nilai masing-masing Rp 3,6 triliun dan Rp 3,59 triliun. Sementara itu Kabupaten Belu menempati urutan ke-10, yang berada dibawah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan nilai PDRB masing-masing Rp 2,24 triliun dan Rp 2,18 triliun. Sementara itu Kabupaten Lembata, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Tengah merupakan 3 kabupaten dengan nilai PDRB terendah, masing-masing Rp 870,92 miliar, Rp 583 miliar dan Rp 566,65 miliar. Komposisi ini tidak berubah hingga tahun 2023, dimana Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan menempati PDRB tertinggi di Provinsi NTT. Demikian juga dengan 3 kabupaten dengan nilai PDRB terendah, masih dicatat oleh 3 kabupaten yang sama. Posisi nilai PDRB Kabupaten Belu di 2023 berada pada posisi 9 dengan menggeser Kabupaten Timur Tengah Utara. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa tingkat capaian PDRB dalam 13 tahun periode pengamatan tidak banyak mengalami perubahan. Ekonomi tetap tumbuh meskipun PDRB masih relatif lebih kecil. Nilai PDRB Provinsi NTT pada 2010 mencapai Rp 43,8 triliun berada pada posisi ke-26 dari 33 provinsi dan memiliki kemiripan dengan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (Rp 48,4 triliun) dan Provinsi Papua Barat (Rp 41,36 triliun). Sementara itu dengan menggunakan harga konstan, PDRB Provinsi NTT meningkat menjadi Rp 75,27 triliun (tetap berada pada urutan ke-26 dari 30) dan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat menjadi Rp 108,15 triliun (urutan ke-22 dari 38 provinsi).

Kabupaten Belu memiliki karakter ekonomi yang cukup unik, di mana ekonomi sebagian besar masih didominasi oleh sektor pertanian (primer). Namun demikian, sektor perdagangan (sekunder) juga memberikan sumbangan yang cukup nyata bagi perekonomian Kabupaten Belu, dan ditambah lagi dengan dukungan sektor administrasi pemerintahan dan sektor pendidikan (jasa) yang apabila ditotal sumbangan keduanya melampaui sumbangan sektor pertanian. Hal ini menunjukkan adanya peran penting sektor-sektor tersebut dalam menopang perekonomian Kabupaten Belu.

Dari distribusi sumbangan sektoral pada perekonomian Kabupaten Belu, dapat diketahui bahwa selama periode pengamatan 2010 hingga 2023 terdapat kecenderungan transformasi sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan sumbangan sektor pertanian, dimana pada 2010 sumbangannya mencapai 26% dan terus mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun hingga mencapai 22,71% pada 2023. Penurunan sumbangan sektor pertanian ini bukan disebabkan oleh penurunan nilai PDRB sektor pertanian namun oleh berfluktuasinya pertumbuhan sektor ini terutama dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan yang berfluktuasi ini menunjukkan naik turunnya produktivitas pada sektor pertanian yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor alam.

Sementara itu sektor perdagangan memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Belu dengan ditandai dengan semakin meningkatnya sumbangan sektor ini dari tahun ke tahun. Pada 2010 sektor ini memberikan sumbangan 11,94% dan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai 13,19% pada 2023. Peningkatan sumbangan sektor ini disebabkan oleh pertumbuhan yang konstan sekitar 5% dari 2010 hingga 2019. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif pada 2020 akibat adanya Covid-19, namun dalam 3 tahun terakhir

sektor ini mengalami peningkatan cukup nyata mencapai 6-7%. Hal ini tentu berdampak positif bagi perekonomian Kabupaten Belu.

Sektor administrasi pemerintahan selama periode 2010-2023 memiliki sumbangan yang relatif tinggi dengan rata-rata sumbangan sebesar 12,51%. Tren sumbangan sektor ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada 2010 sumbangannya telah mencapai 10,61% dan terus meningkat menjadi 12,89% pada 2023. Peningkatan sumbangan sektor ini mengindikasikan masih tingginya peran pemerintah (daerah dan pusat) dalam menggerakkan ekonomi Kabupaten Belu melalui kegiatan administrasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Belu pada berbagai aspek. Di antara layanan tersebut adalah layanan administrasi pemerintahan secara umum, layanan administrasi pemerintahan pada bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan lainnya.

Sektor pendidikan juga tercatat menjadi sektor yang memiliki sumbangan relatif besar dengan rata-rata sumbangan sepanjang periode pengamatan (2010-2023) sebesar 14,86%. Pada tahun 2016 hingga 2021, sumbangan sektor ini bahkan sempat berada pada kisaran 15% meskipun kemudian menurun pada kisaran 14% pada 2022-2023. Besarnya sumbangan sektor pendidikan ini menunjukkan tingginya aktivitas yang terkait dengan pendidikan. Aktivitas kegiatan pendidikan yang terfiliasi dengan agama misalnya sekolah teologi, seminari dan lainnya menjadi salah satu penyebab relatif tingginya sumbangan sektor pendidikan di Kabupaten Belu. Melalui kegiatan pendidikan ini, banyak calon-calon siswa atau peserta didik yang datang di kota ini kemudian mengikuti pendidikan dengan waktu tertentu.

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, perekonomian dapat dinilai dari berapa banyak pengeluaran oleh masing-masing pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, pemerintah, swasta dan perdagangan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki nilai yang cukup tinggi di tahun 2010, yaitu sebesar Rp 1,43 triliun atau sebesar 78% dari PDRB (ADHK). Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu secara konsisiten hingga pada 2021 nilainya telah mencapai Rp 2,09 triliun atau sekitar 69% dari PDRB (ADHK). Tingginya sumbangan pengeluaran konsumsi rumah tangga ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Belu selama periode pengamatan didominasi oleh belanja rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya, baik berupa bahan makanan maupun non-makanan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten Belu meningkat seiring dengan meningkatnya Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 426,1 miliar dan terus mengalami peningkatan hingga Rp 770 miliar pada 2019. COVID-19 memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk melakukan *refocusing* anggaran sehingga menurunkan pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten Belu menjadi Rp 721,2 miliar dan Rp 669,9 miliar pada 2020 dan 2021. Posisi ini menyebabkan pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki sumbangan rata-rata 26% selama periode pengamatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya belanja pemerintah Kabupaten Belu terutama untuk belanja langsung (belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal). Porsi realisasi belanja langsung terhadap total belanja pada 2018 mencapai 49,1% dan meningkat menjadi 64,98% pada 2023. Peningkatan belanja pemerintah akan memberikan dampak pengganda bagi perekonomian melalui peningkatan permintaan baik barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan program kerja pemerintah. Peningkatan permintaan ini akan memicu penyediaan barang dan jasa yang dilakukan baik melalui kegiatan produksi maupun perdagangan.

Produk yang dihasilkan dalam perekonomian Kabupaten Belu tidak hanya dikonsumsi di tingkat lokal namun juga dipasarkan diluar wilayah. Hal ini terbukti dengan adanya nilai positif ekspor barang dan jasa Kabupaten Belu. Nilai ekspor Kabupaten Belu pada 2010 mencapai Rp 127,8 miliar dan meningkat menjadi Rp 789,5 miliar pada 2014. Namun setelah itu, nilai ekspornya menurun hingga menjadi Rp 161,2 miliar (harga konstan) dan Rp 266,3 (harga berlaku) pada tahun 2021. Terdapat perbedaan nilai yang sangat besar antara ekspor dan impor barang dan jasa di Kabupaten Belu. Nilai impor barang dan jasa pada 2010 mencapai Rp 696 miliar dan terus meningkat hingga 2019 yang mencapai Rp 1,59 triliun (harga konstan) dan Rp 2,44 triliun (harga berlaku). Pada 2020 dan 2021 baik nilai ekspor maupun impor barang dan jasa Kabupaten Belu sedikit mengalami penurunan.

Dari gambaran ekonomi diatas terlihat bahwa perekonomian di Kabupaten Belu masih ditopang oleh sektor pertanian. Meskipun secara perlahan sektor pertanian ini mulai digantikan oleh sektor lain terutama sektor perdagangan dan jasa (administrasi pemerintahan dan pendidikan). Penggerak utama perekonomian di Kabupaten Belu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan untuk dikonsumsi baik barang yang dihasilkan dari wilayah sendiri maupun dari wilayah lainnya. Kebutuhan yang tinggi ternyata tidak mampu dipenuhi oleh produksi di wilayah sendiri sehingga mengakibatkan relatif tingginya impor barang dan jasa untuk memenuhinya. Tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga ini juga terkonfirmasi dengan semakin meningkatnya pengeluaran riil per kapita disesuaikan dari Rp 6,5 juta pada 2010 menjadi Rp 7,5 juta pada 2023. Jika dibandingkan dengan perekonomian wilayah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu menempati posisi tengah, baik dalam ukuran ekonomi (nilai PDRB) maupun pendapatan per kapita. Kondisi ini perlu mendapat mengingat Kabupaten Belu menjadi bagian dari kelompok menengah yang harus dapat diputuskan untuk memperbesar kue pembangunan atau mendahulukan pemerataan. Hal inilah yang kemudian perlu dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan arah ekonomi Kabupaten Belu kedepan. Menjadikan ekonomi sebagai penggerak pembangunan wilayah disamping sebagai sarana untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan serta pencapaian indikator kesejahteraan lainnya.

Apabila dilihat dari komposisinya, pengeluaran masyarakat Kabupaten Belu masih lebih banyak didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2018 komposisi pengeluaran untuk makanan dan non makanan mencapai 54% dan 46%. Sementara pada 2023 komposisinya berubah menjadi 56% dan 44% untuk pengeluaran makanan dan non makanan. Meskipun komposisi untuk pengeluaran kebutuhan makanan relatif lebih tinggi, data BPS juga menunjukkan bahwa rata-rata kalori dan protein masyarakat Kabupaten Belu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kalori dan protein masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pada 2018 rata-rata konsumsi kalori per kapita NTT sebesar 1.956 sedangkan Kabupaten Belu tercatat 1.937. Meskipun meningkat pada 2023 rata-rata konsumsi per kapita Kabupaten Belu sebesar 1.910 lebih rendah dibandingkan angka yang sama di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.938. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata konsumsi protein per kapita, dimana Kabupaten Belu mengalami penurunan dari 53,5 pada 2018 menjadi 53,42 pada 2023. Selain mengalami penurunan, rata-rata konsumsi protein perkapita Kabupaten Belu lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana pada 2018 sebesar 53,4 dan meningkat menjadi 54,54 pada 2023.

BAB IV PROFIL PENDUDUK MISKIN DAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN BELU

4.1. Penduduk Miskin dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belu

Kabupaten Belu masuk ke dalam program prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2K). Dalam sebuah dokumen berjudul Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024, Kabupaten Belu disebut masih memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 34.180, dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,37 % dan persentase penduduk miskin ekstrem 8,52 %. Di sisi yang lain, berdasarkan data dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu mencapai 33,190 jiwa. Angka itu tersebar ke dalam dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Menurut data jiwa miskin desil satu, jumlah penduduk miskin paling tinggi berada di Kecamatan Raimanuk dengan jumlah 3.663 orang. Di wilayah lain, yakni di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Raihat, jumlah jiwa miskin tercatat sebanyak 2.397 dan 2.107 orang. Di Kota Atambua, jiwa miskin yang sudah terdokumentasikan sejumlah 2.789 individu. Sementara itu, di kecamatan lainnya, total keseluruhan penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin desil satu tidak jauh berbeda dari empat wilayah itu. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Belu

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dalam orang)
1.	Raimanuk	3.663
2.	Kakuluk Mesak	2.397
3.	Raihat	2.107
4.	Kota Atambua	2.789
5.	Lamaknen	2.772
6.	Atambua Barat	957
7.	Atambua Selatan	2.975
8.	Lamaknen Selatan	2.577
9.	Lasiolat	416
10.	Tasifeto Timur	2.549

11.	Tasifeto Barat	2.811
12.	Nanaet Duabesi	889

Sumber: Pemerintah Kabupaten Belu, 2024

Berdasarkan uraian dan tabel di atas, dari 12 wilayah—yang terdiri dari 11 kecamatan dan satu kota—hanya ada tiga daerah yang memiliki jumlah jiwa miskin desil 1 di bawah seribu orang, tiga kecamatan itu adalah Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Nanaet Duabesi, dan Kecamatan Atambua Barat. Sembilan kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Raimanuk, Kakuluk Mesak, Raihat, Lamaknen, Kota Atambua Selatan, Lamaknen Selatan, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, mempunyai jumlah jiwa miskin desil 1 lebih dari dua ribu orang. Secara umum, hal itu menandakan bahwa persebaran penduduk miskin yang berada pada desil 1 di Kabupaten Belu cukup merata dan masif. Apabila kategorisasi konsep desil 1 itu diterjemahkan sebagai rumah tangga yang masuk ke dalam kelompok 10 % termiskin dan tingkat kesejahteraannya sangat rendah secara nasional, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Belu yang berada pada status kemiskinan ekstrem masih cukup banyak.

Sebagian besar dari keluarga yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem itu tidak memiliki pekerjaan. Data dari empat lokasi kecamatan yang menjadi lokus kajian ini menunjukkan dengan jelas realitas tersebut. Di Kota Atambua, misalnya, jumlah jiwa yang masih menganggur ada sebanyak 2.089 orang, atau 75 % dari semua populasi penduduk; di Kecamatan Raimanuk jumlah anggota keluarga yang belum bekerja mencapai 2.677 orang; di Kecamatan Kakuluk Mesak kuantitas jiwa yang masih menganggur adalah 1.625 orang; di Kecamatan Raihat total keseluruhan jiwa yang tidak memiliki pekerjaan adalah 1.273 orang. Apabila ada anggota keluarga yang bekerja, mayoritas mencari penghidupan di sektor pertanian. Di Kota Atambua, dari semua penduduk yang berada pada garis kemiskinan ekstrem, profesi petani dijalani oleh 422 orang; di Kecamatan Raimanuk, terdapat 891 individu yang mengandalkan pertanian sebagai sumber ekonomi; di Kecamatan Kakuluk Mesak, sebanyak 502 jiwa yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan bercocok tanam; di Kecamatan Raihat, jumlah petani mencapai 691 orang. Berdasarkan data-data tersebut, keluarga miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Belu memiliki dua karakteristik ekonomi utama: dominannya sektor pertanian dan masifnya angka pengangguran.

Secara umum, penduduk Kabupaten Belu yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem masih tinggi. Keluarga yang berada pada level tersebut tersebar secara merata di 12 wilayah (1 kota dan 11 kecamatan) di Kabupaten Belu. Mayoritas dari keluarga miskin ekstrem itu belum atau tidak memiliki pekerjaan, apabila bekerja sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor pertanian. Merespon kondisi kemiskinan ekstrem di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Belu, melalui berbagai PD yang ada di bawahnya, telah melaksanakan berbagai program yang berfokus pada pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan penjelasan pada bagian ini, terdapat beberapa profil penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Belu: (a) jumlah penduduk miskin ekstrem tergolong besar, (b) persebaran warga miskin ekstrem merata, dan (c) hampir seluruh individu yang berada pada level miskin ekstrem menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian. Untuk melihat realitas kemiskinan yang lebih detail, tulisan dilanjutkan pada pembahasan profil kemiskinan di empat lokasi penelitian yang terdiri dari tiga desa dan satu kelurahan.

4.2. Kemiskinan di Kelurahan Fatubena, Kota Atambua

Kelurahan Fatubena merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Atambua. Dengan luas 10 km², Kelurahan Fatubena adalah daerah terluas kedua di Kecamatan Kota Atambua setelah Kelurahan Manumutin. Menurut data pada tahun 2017, Kelurahan Fatubena dihuni oleh 2.135 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian 8.296 jiwa. Sebagian besar wilayah Kelurahan Fatubena adalah dataran rendah dan sebagian kecil perbukitan. Kondisi topografis yang didominasi oleh dataran dan perbukitan membuat banyak penduduk di Kelurahan Fatubena memilih bekerja sebagai petani dan peternak. Selain petani dan peternak, penduduk Kelurahan Fatubena juga bekerja sebagai pedagang, tukang bangunan, buruh, dan PNS.

Dari seluruh warga Kelurahan Fatubena, 643 atau 6,3 persen merupakan jiwa miskin desil 1. Artinya, menggunakan definisi desil 1 di atas, di Kelurahan Fatubena masih terdapat 643 orang yang masuk ke dalam 10 % orang termiskin dan tingkat kesejahteraannya di bawah standar nasional. Dari 643 individu itu, 487 orang tidak atau belum bekerja (75%), 88 orang bekerja sebagai petani (13,7%), 5 orang adalah pensiunan, 13 orang merupakan pekerja lepas, 26 orang berprofesi sebagai pegawai swasta, 15 berdagang, dan hanya satu orang yang menjadi nelayan. Mayoritas penduduk miskin di Kelurahan Fatubena, dengan demikian, didominasi oleh pengangguran dan petani.

4.3. Kemiskinan di Desa Faturika Kecamatan Raimanuk

Desa Faturika merupakan salah satu desa di Kecamatan Raimanuk yang memiliki luas wilayah sebesar 33,50 km² dengan ketinggian dari permukaan laut 20 derajat dan rata-rata curah hujan 15 -20 % per tahun. Dari segi geografis, Desa Faturika didominasi oleh wilayah berbukit, padang, dan berbatu. Karena sebagian besar daerahnya adalah padang, Desa Faturika termasuk salah satu wilayah yang rawan longsor. Berdasarkan data pada tahun 2018, terdapat 299 KK yang tinggal di Desa Faturika dengan total penduduk 1.304, terdiri dari 588 orang laki-laki dan 716 orang perempuan. Mayoritas penduduk di Desa Faturika bekerja sebagai petani (234 jiwa) dan TKI (45 jiwa). Dua profesi itu terpaksa dijalani oleh sebagian besar masyarakat karena tingkat pendidikan di Desa Faturika sangat rendah. Menurut data yang didapatkan dari pihak desa, sebanyak 197 penduduk hanya tamatan SD sedangkan 704 bahkan tidak pernah bersekolah. Dengan level pendidikan seperti itu, masyarakat desa sulit mengakses pekerjaan formal yang mapan.

Situasi yang serupa juga terjadi di Desa Faturika di Kecamatan Raimanuk. Berdasarkan data yang ada, dari 1.425 orang penduduk Desa Faturika, 190 orang atau 13,3 % warga desa masih hidup sebagai keluarga miskin. Sehari-hari, masyarakat miskin di Desa Faturika mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan dengan jumlah petani mencapai 38 orang. Sisanya, atau 148 orang, tidak atau belum bekerja (141 orang atau 74,2%) atau merupakan pensiunan (7 orang). Sama seperti Kelurahan Fatubena, hampir semua penduduk miskin di Desa Faturika merupakan pengangguran dan petani.

4.4. Kemiskinan di Desa Tohe, Kecamatan Raihat

Desa Tohe berada di Kecamatan Raihat dan berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste di sebelah utara. Desa Tohe terdiri dari 7 dusun, 14 RW, dan 30 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 5.455 jiwa. Secara spesifik, jumlah penduduk laki-laki di Desa Tohe sebanyak 2.718 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.737 jiwa. Wilayah geografis Desa Tohe didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan yang cocok untuk aktivitas pertanian dan peternakan. Dengan

profil geografis seperti itu, mayoritas penduduk Desa Tohe memilih bekerja sebagai petani dan peternak. Selain dua profesi tersebut, penduduk Desa Tohe juga ada yang menyambung hidup sebagai wiraswasta dan PNS.

Tohe merupakan desa terbesar di Kecamatan Raihat. Jumlah penduduk yang hidup dan tinggal di Desa Tohe sebanyak 6.325 orang, sangat jauh dibandingkan dengan Desa Maumutin (3.414 orang) dan Desa Asumanu (2.302 orang) yang warga desanya berada di peringkat dua dan tiga. Dari semua penghuni desa, terdapat sebanyak 782 orang yang terdata sebagai jiwa miskin desil 1. Aktivitas ekonomi jiwa miskin desil 1 di Desa Tohe sangat beragam, ada yang menyambung hidup sebagai nelayan (2 orang), pedagang (12 orang), pegawai swasta (19 orang), pegawai lepas (31 orang), dan petani (290 orang). Selain itu, terdapat 9 orang pensiunan dan 415 orang yang terdata sebagai belum atau tidak bekerja.

4.5. Kemiskinan di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak

Desa Kenebibi terletak di Kecamatan Kakuluk Mesak dan dihuni oleh 937 KK, dengan total penduduk sebanyak 3.256 orang. Secara geografis, Desa Kenebibi merupakan daerah tropis dengan rata-rata periode hujan selama lima hingga enam bulan. Sebagian besar wilayah Desa Kenebibi berada di dekat laut dan dikelilingi perbukitan. Karena letak geografis dan topografinya itu, masyarakat Desa Kenebibi banyak yang menjadi petani, peternak, dan nelayan. Menurut data dari pemerintah desa, jumlah petani dan peternak mencapai 561 orang sedangkan jumlah nelayan sebanyak 152 orang. Selain tiga profesi tersebut, warga desa juga ada yang bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, PKL, TNI/Polri, PNS/Guru, pengusaha, dan pegawai swasta. Apabila dibandingkan dengan empat lokasi penelitian lainnya, Desa Kenebibi mempunyai keragaman profesi karena, meskipun usaha di sektor pertanian dan laut mendominasi, sebaran pekerjaan penduduknya merata; ada yang bekerja di sektor formal, ada juga yang menggantungkan hidup di sektor informal. Salah satu alasan mengapa hal itu bisa terjadi adalah tingkat pendidikan warga desa yang cukup mapan. Dari 3.256 penduduk desa, 620 orang telah meluluskan jenjang SMA, sedangkan 123 orang mampu menuntaskan perguruan tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, beberapa orang di Desa Kenebibi bisa bekerja di sektor formal.

Terletak di Kecamatan Kakuluk Mesak, Desa Kenebibi merupakan salah satu wilayah di kecamatan yang warganya sangat banyak. Dengan jumlah penduduk sebesar 3.618 orang, Desa Kenebibi adalah desa terbesar nomor dua setelah Desa Dualaus. Berdasarkan data cacah jiwa, terdapat 707 orang penduduk yang tergolong ke dalam desil 1 atau 19,5 % dari total warga. Dibanding desa lainnya, Desa Kenebibi memiliki persentase jiwa miskin desil 1 paling banyak. Sebagian besar individu miskin tersebut belum atau tidak bekerja dengan jumlah 476 orang atau 67,3 %, disusul dengan mereka yang bekerja sebagai petani (112 orang atau 15,8%), pensiunan (71 orang atau 10%), nelayan (34 orang atau 4,8%), pedagang (3 orang) dan pegawai swasta (1 orang). Secara umum, karakteristik ekonomi di Desa Kenebibi tidak jauh berbeda dari tiga lokasi lainnya, yakni realitas kemiskinan didominasi oleh pengangguran dan sektor pertanian. Kendati banyak kesamaan, ada satu perbedaan penting yang dapat dilihat dari data cacah jiwa miskin, yaitu banyaknya warga yang berprofesi sebagai nelayan; hal ini tidak ditemui di tiga lokasi penelitian lainnya. Artinya, selain bertani, sektor perikanan juga menjadi opsi bagi keluarga miskin.

4.6. Perspektif Masyarakat Terkait Kemiskina Ektrem di Kabupaten Belu

Persepsi terkait kemiskinan ekstrem bagi seluruh lapisan masyarakat Belu menjadi salah satu tema penting yang ditanyakan dalam metode pengumpulan data: indepth interview dan FGD, kepada

sejumlah informan yang relevan. Persepsi kemiskinan ekstrem bagi masyarakat lintas lapisan menjadi penting untuk memotret persepsi isu kemiskinan ekstrem Belu, serta langkah untuk terbebas dari kemiskinan ekstrem. Adapun sejumlah persepsi kemiskinan ekstrem yang dapat dirangkum dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab V, sebagai berikut:

1. Kemiskinan ekstrem berakibat pada tingkat kesejahteraan masyarakat Belu secara menyeluruh;
2. Kemiskinan ekstrem berakibat pada tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu, khususnya stunting secara menyeluruh;
3. Kemiskinan ekstrem berakibat pada tingkat kualitas sumber daya masyarakat;
4. Angka kemiskinan ekstrem dapat dikurangi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi-pertanian khususnya pada lahan-lahan kritis di sekitar Belu;
5. Strategi pengurangan angka kemiskinan ekstrem perlu adanya keterlibatan dari berbagai lintas *stakeholder*, mulai dari komunitas adat, pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, gereja, lembaga swadaya masyarakat secara selaras.

BAB V FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN EKSTREM

5.1. Faktor Lingkungan

5.1.1. Kondisi Lahan Tandus dan Tidak Subur

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu memiliki keterkaitan erat dengan faktor lingkungan, khususnya kondisi lahan yang tandus dan tidak subur. Beberapa desa yang memiliki karakteristik lahan tandus seperti Kelurahan Fatubena dan Desa Faturika, mengalami tingginya angka kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap lahan yang subur membuat masyarakat kesulitan untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan di mana keterbatasan hasil pertanian membuat pendapatan masyarakat tetap rendah dan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, fenomena kemarau panjang yang diperparah dengan kejadian El Nino mengakibatkan banyak lahan di Belu menjadi tidak produktif atau menganggur. Tanaman yang biasanya diandalkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup mengalami gagal panen, sementara curah hujan yang minim membuat tanah semakin sulit untuk diolah. Dengan kurangnya diversifikasi kegiatan ekonomi di desa-desa tersebut, mayoritas warga hanya bergantung pada sektor pertanian. Ketika lahan pertanian tidak bisa lagi diandalkan karena kemarau, masyarakat tidak memiliki sumber penghidupan lain, sehingga mereka jatuh ke dalam kemiskinan yang semakin mendalam. Meskipun kondisi tanah di Belu secara umum tandus, terdapat wilayah tertentu seperti di banyak tempat di mana masyarakat masih bisa bertahan hidup melalui aktivitas pertanian dan peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi lahan sangat terbatas, masyarakat mampu beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Namun, kemampuan ini hanya dimiliki oleh segelintir desa, sehingga tidak cukup untuk mengangkat kondisi ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Belu. Upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah-daerah yang sedikit lebih subur seperti ini tetap diperlukan agar dapat menjadi model bagi wilayah lainnya.

Secara keseluruhan, masyarakat di Belu masih kesulitan dalam menghadapi kekeringan yang berkepanjangan. Kurangnya kemampuan untuk mengatasi kekeringan ini membuat masyarakat rentan terhadap paceklik ketika kemarau panjang terjadi. Ketidakmampuan untuk mengakses air secara cukup dan minimnya teknologi pengairan menyebabkan lahan-lahan pertanian tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tanpa adanya opsi penghidupan lain, seperti diversifikasi ke sektor ekonomi non-pertanian, banyak masyarakat yang akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam kemiskinan. Namun demikian, terdapat beberapa contoh masyarakat yang berhasil keluar dari tradisi fatalistik dan mengembangkan strategi adaptasi baru dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sulit, seperti di Fatubena. Masyarakat di daerah ini telah mencoba pendekatan baru seperti pengelolaan air yang lebih baik atau diversifikasi mata pencaharian untuk mengurangi ketergantungan pada hasil pertanian. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan inovasi dan dukungan yang tepat, masyarakat di Belu memiliki

potensi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan mereka, meskipun berada dalam kondisi lahan yang tandus dan sulit.

Inisiatif-inisiatif lokal ini menunjukkan bahwa meskipun hidup di daerah yang tandus penuh tantangan, masyarakat Kabupaten Belu tetap berjuang. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menciptakan solusi yang relevan dengan lingkungan mereka. Dengan dukungan yang tepat, inisiatif-inisiatif ini dapat berkembang dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang mengalami kesulitan serupa. Karakteristik topografi wilayah Kabupaten Belu adalah daerah dataran berbukit-bukit dan pegunungan. Dataran berbukit dengan kemiringan lereng 0-8% digunakan untuk pemukiman dan area pertanian (Profil Kabupaten Belu, 2023). Dataran berbukit pada kemiringan lereng 15-45% teridentifikasi sebagai kawasan rawan erosi. Biasanya pada area rawan erosi tersebut terdapat sejumlah petani budidaya jagung, ubi kayu, kemiri, dan sebagian tanaman hortikultura seperti tomat dan cabai. Dari 4 (empat) lokasi penelitian, hanya di Desa Tohe memiliki hamparan dataran pertanian irigasinya menjadi produk unggulan desa.

Akibat karakteristik topografi dataran berbukit, menyebabkan persebaran lahan subur dan lahan terjangkau sarana perairan menjadi tidak merata. Kontras yang membedakan kawasan subur dan tandus pun terasa begitu mencolok. Maka, persebaran hasil budidaya bahan pangan (padi dan ubi kayu), perkebunan (kemiri, pisang, dan jenis buah lainnya) tidak merata. Karakteristik 4 (empat) lokasi penelitian pun juga begitu kontras. Menariknya, pada satu wilayah desa pun, persebaran kawasan lahan subur dan kering juga kontras. Seperti di Kelurahan Fatubeno, sebagian besar areal lahannya bergantung dengan pengairan tadah hujan. Meskipun datarannya relative rata tak berbukit, seperti 3 daerah penelitian lainnya, akses air bersih pun terbatas. Bahkan kedalam sumur di daerah itu mencapai kedalaman 90 meter. Dalam satu tahun hanya bisa satu kali tanam dan panen. Namun, pada kawasan lahan di sekitar sungai dapat diolah sepanjang tahun. Biasanya kawasan lahan tersebut untuk budidaya tanaman hortikultura (sawi, terong, kangkung) dan satu kali dalam setahun untuk budidaya tanaman jagung.

5.1.2. Keterisolasian Kampung

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terkait infrastruktur yang terbatas dan keterisolasian wilayah. Warga baru yang pindah ke daerah tersebut seringkali hanya dapat mengakses lahan di wilayah terpencil, jauh dari fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Akses yang terbatas terhadap layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan pasar membuat mereka kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jalan yang buruk dan ketersediaan air bersih yang minim memperburuk kondisi hidup mereka, sehingga mereka tidak mampu mengakses peluang ekonomi yang lebih baik.

Di daerah terpencil ini, infrastruktur jalan yang buruk menyebabkan keterbatasan mobilitas bagi masyarakat. Kondisi jalan yang rusak dan tidak terawat membuat mereka sulit menjual hasil panen atau produk lokal ke pasar yang lebih besar, sehingga mengurangi pendapatan mereka. Keterbatasan ini juga berdampak pada akses pendidikan bagi anak-anak, di mana sekolah-sekolah seringkali berjarak jauh dan memerlukan perjalanan yang sulit. Akibatnya, tingkat pendidikan yang rendah berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diputus. Bagi warga lokal di kampung-kampung adat di dataran tinggi, seperti di Faturika, nilai-nilai adat dan kearifan lokal mengenai tanah dan tempat tinggal yang sakral membuat mereka enggan untuk pindah ke wilayah yang lebih dekat dengan fasilitas umum. Mereka memilih tetap tinggal di daerah-daerah yang secara kultural dianggap penting, meskipun jauh dari pusat-pusat layanan dasar. Akibatnya, akses terhadap listrik, air bersih, dan layanan kesehatan di wilayah-wilayah ini sangat terbatas.

Kehadiran listrik pun baru ada di beberapa wilayah ini, sementara jaringan air bersih belum merata, sehingga mereka seringkali harus berjalan jauh untuk mendapatkan air.

Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses terhadap air bersih memperburuk kondisi kesehatan masyarakat di daerah-daerah ini. Air bersih yang terbatas mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penyakit yang terkait dengan kualitas air, seperti diare dan infeksi kulit. Selain itu, sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai ketika mengalami masalah kesehatan. Hal ini menciptakan situasi di mana kemiskinan dan masalah kesehatan saling memperkuat satu sama lain, sehingga masyarakat sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil ini juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas karena kurangnya dukungan dari program-program pembangunan. Meski ada beberapa inisiatif pemerintah untuk memperbaiki akses listrik dan air bersih, keterbatasan wilayah yang sulit dijangkau membuat program-program tersebut tidak merata. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dan upaya untuk mengintegrasikan wilayah terpencil ke dalam jaringan ekonomi lokal menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu.

5.2. Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM yang rendah, terutama dari segi pendidikan dan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali berhubungan langsung dengan keterbatasan akses terhadap peluang kerja formal, yang kemudian mempersempit ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Selain itu, pendidikan yang rendah juga sering kali berkaitan dengan pola asuh yang kurang optimal. Pola asuh yang kurang baik dapat menyebabkan masalah kesehatan pada anak-anak, seperti stunting dan malnutrisi. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan pada tahun 2023, misalnya, menemukan bahwa di Kabupaten Belu terdapat fenomena anak yang diasuh oleh kerabat (utamanya nenek) sebab ibu dari sang anak mesti bekerja di luar daerah. Nenek yang mengasuh cucunya sudah usia lanjut namun masih kerja ladang untuk mencukupi kebutuhan keseharian. Oleh karena itu, seringkali cucu yang tinggal bersama nenek kurang diperhatikan asupan gizi. Seringkali, anak-anak itu kesehariannya konsumsi mie goreng instant tanpa lauk dan sayur. Biasanya satu bungkus mie instant dimasak untuk 2 porsi dikonsumsi dengan nasi yang memenuhi piring (Helmyati et al., 2023). Pola asuh semacam itu pada taraf selanjutnya mengakibatkan angka tengkes meningkat dan memperparah lingkaran kemiskinan, karena anak-anak tersebut tumbuh menjadi individu dewasa dengan keterbatasan untuk bersaing di pasar kerja yang lebih formal dan berpendapatan lebih baik.

Di sisi lain, rendahnya pendidikan juga membuka peluang terjadinya eksploitasi, seperti praktik perdagangan manusia (*human trafficking*). Kurangnya pengetahuan dan keterampilan membuat sebagian masyarakat mudah terjebak dalam situasi yang mengancam keselamatan dan martabat mereka, hanya demi bertahan hidup. Praktik ini sering kali muncul sebagai dampak dari ketidakmampuan masyarakat untuk mencari pekerjaan yang layak karena keterbatasan kualifikasi pendidikan. Studi James Fox juga mengindikasikan adanya keterkaitan antara rendahnya tingkat pendidikan dengan gizi buruk yang dialami oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya gizi dan kesehatan seringkali menyebabkan pola makan yang tidak seimbang, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan. Hal ini memperlihatkan bagaimana pendidikan yang rendah menjadi faktor fundamental yang memicu berbagai masalah, termasuk rendahnya kualitas

kesehatan dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal. Secara keseluruhan, rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Belu, yang diwarnai oleh tingkat pendidikan yang rendah, berdampak luas pada kemiskinan ekstrem di daerah ini. Bab ini akan mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana keterkaitan antara pendidikan, kesehatan, dan akses pekerjaan membentuk lingkaran yang sulit diputus, sehingga membuat kemiskinan terus berlanjut di Kabupaten Belu.

5.2.1. Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Belu memiliki kaitan erat dengan kondisi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Meskipun pendidikan dasar wajib bagi anak usia 7-12 tahun, partisipasi sekolah di jenjang SD masih sering terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga. Pada musim tanam dan panen, banyak anak-anak sekolah yang memilih untuk bekerja sebagai buruh tani guna membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Kondisi ini menyebabkan absensi tinggi dan bahkan putus sekolah, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pencapaian pendidikan di wilayah tersebut.

Rendahnya partisipasi pendidikan ini memperkuat siklus kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Belu. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal di masa depan. Akibatnya, mereka hanya bisa terlibat dalam pekerjaan informal yang berpenghasilan rendah, sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan (BPS, 2023). Kondisi ini juga berkaitan dengan tantangan lain, seperti stunting dan masalah gizi buruk yang dialami anak-anak di Kabupaten Belu. Stunting berdampak negatif pada perkembangan fisik dan kognitif anak, mengurangi kemampuan mereka dalam belajar, dan pada akhirnya mempersempit kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan yang tidak memadai dan kondisi kesehatan yang buruk ini menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mencapai potensi maksimal mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinan (BPS, 2023).

Pada bab 3 telah diuraikan bahwa angka partisipasi kasar masyarakat Belu cenderung pada jenjang sekolah dasar (SD). Pada keempat lokasi penelitian, sudah ada fasilitas SD di tiap lokasi. Seluruh warga desa pun sudah bisa mengakses pendidikan dasar. Meskipun demikian, tidak semua warga desa mudah mengakses pendidikan. Seperti di Desa Faturika dan Desa Kenebibi, masih ada daerah/ dusun yang terisolir, karena karakteristik topografi dataran berbukit. Pusat pemerintahan dan pendidikan berada di pusat desa, cenderung berada di daerah dataran yang strategis dan mudah diakses kendaraan. Kondisi dusun-dusun yang terisolir tersebut, diperparah dengan kondisi jalan yang berlubang, berlumpur jika musim hujan, serta jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah \pm sejauh 7-10 kilo meter. Belum ada transportasi umum, sehingga tidak sedikit siswa SD harus berjalan kaki ke sekaolah hingga 1 jam.

Temuan menarik dari Bab 3 tentang tingkat pendidikan masyarakat, ada jeda waktu/usia siswa dari lulus SD kemudian melanjutkan SMP dan SMA. Oleh karena itu, berdasarkan data BPS 2022, tidak sedikit siswa SMP dan SMA yang usianya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dari hasil observasi, wawancara, dan FGD, ada berbagai faktor latar belakang, yaitu akses ketersediaan fasilitas pendidikan lanjutan, jarak, nilai-nilai sosial dan budaya terhadap anak. Fasilitas pendidikan SMP dan SMA biasanya berada di pusat kecamatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi memerlukan modal, seperti tempat tinggal, uang saku, dan biaya keperluan lainnya. Biasanya, siswa SMP atau SMA akan dititipkan di rumah kerabat yang ada di kecamatan atau kota kabupaten. Orang tua kurang terbiasa melepas anaknya tinggal seorang diri di kos-kosan, karena minim pengawasan keluarga serta alasan keterbatasan finansial. Biasanya anak perempuan, akan diperhatikan sedemikian rupa, agar selesai sekolah tidak

ada kejadian kekerasan seksual dalam berpacaran atau dikenal dengan sebutan ‘hamil duluan’. Hanya sekolah keagamaan/ seminari tingkat SMA dan perguruan tinggi yang menyediakan fasilitas asrama bahkan beasiswa pendidikan dan hidup keseharian.

Gencarnya program misi Katolik dalam pelayanan pendidikan sekolah dasar telah meningkatkan tingkat akses pendidikan dan partisipasi siswa. Ada sejumlah program sekolah jarak dekat di daerah-daerah pelosok yang sulit akses, namun belum begitu merata. Selama di lapangan peneliti tidak hanya sekali melihat sejumlah siswa SD tidak berangkat sekolah di hari sekolah. Saat musim mempersiapkan lahan, seperti Mona dan Martha, siswa SD kelas 2 dan kelas 5 SD di Desa Tohe tidak berangkat sekolah karena harus menjaga adiknya yang masih usia 2 tahun, karena neneknya sedang mempersiapkan lahan untuk tanam jagung di ladang. Ada juga Marcel, siswa SD kelas 3 di Kenebibi yang mengaku, “*Senin pergi sekolah, Selasa istirahat, pergi sekolah lagi hari Rabu.....Capek kalau tiap hari pergi jalan (kaki) ke sekolah.*” Marcel tidak setiap hari berangkat sekolah karena jarak rumah dengan sekolah cukup jauh.

Pola asuh orang tua ataupun keluarga pada anak juga mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan. Di Kelurahan Fatubena, Desa Faturika, Desa Tohe, dan Desa Kenebibi tidak sedikit orang tua yang mengadu nasib di Bali, Kalimantan, Sumatera, Papua, bahkan Malaysia dan Hongkong yang menitipkan anaknya ke neneknya. Usia rentan nenek yang masih harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, menuntut ia tetap harus mengurus ladang, menenun, dan pekerjaan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan cucu-cucunya. Remitenansi perantau biasanya untuk urusan adat beli hewan, bahkan ada yang sama sekali tidak mengirim sepeser rupiah ke kampung halamannya. Meskipun, ada sejumlah masyarakat yang pergi merantau baik dapat membangun rumah, membeli hewan ternak (sapi dan babi), dan juga untuk membeli lahan. Banyak orang tua di Kabupaten Belu yang memiliki pendidikan rendah cenderung kurang memprioritaskan pendidikan bagi anak-anak mereka. Mereka melihat keterlibatan anak dalam pekerjaan pertanian sebagai hal yang lebih mendesak untuk memenuhi kebutuhan harian. Hal ini memperkuat pola pikir yang menganggap pendidikan sebagai hal sekunder dibandingkan dengan pekerjaan, yang kemudian menghambat anak-anak untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Secara nasional, angka partisipasi kasar (APK) di tingkat SD cukup tinggi, mencapai sekitar 95-98% (BPS, 2023). Namun, angka ini tidak menggambarkan sepenuhnya situasi di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Belu, di mana tantangan geografis dan ekonomi masih menjadi kendala. Kesenjangan pendidikan ini memperburuk ketimpangan ekonomi, karena mereka yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas cenderung terjebak dalam pekerjaan sektor informal, seperti buruh tani, yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Secara keseluruhan, rendahnya partisipasi pendidikan dan kondisi pendidikan yang kurang baik di Kabupaten Belu memperkuat siklus kemiskinan ekstrem di daerah ini. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi melalui intervensi yang lebih terarah, seperti program pendidikan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin, dukungan beasiswa, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup.

5.2.2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kualitas sumber daya manusia (SDM). Kondisi kesehatan yang buruk di Kabupaten Belu, terutama masalah stunting, masih menjadi permasalahan yang signifikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari empat lokasi riset, stunting—kondisi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usia—masih banyak ditemui. Anak-anak yang stunting biasanya

mengalami hambatan dalam perkembangan fisik dan kognitif, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berprestasi di sekolah. Masalah stunting ini sering kali berakar pada ketidakcukupan gizi dan pola makan yang tidak seimbang sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Salah satu program utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belu adalah menekan angka stunting dan meningkatkan layanan fasilitas Kesehatan untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, misalnya, mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita. Program PMT bagi balita diselenggarakan selama 90 hari setiap tahunnya, dan bersumber dari anggaran dana desa (ADD) (Helmyati et al., 2023). Proses pengadaan dan pengolahan makanan dilakukan oleh kader kesehatan dengan memperhatikan menu yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Helmyati et al., 2023). Melalui program tersebut dan program lainnya seperti Gemar Makan Ikan (GEMARI), Pemerintah Kabupaten mampu menurunkan angka prevalensi stunting di wilayahnya. Hal itu teraktualisasi dengan adanya tren penurunan angka stunting selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 terhitung 17,9 % kasus, tahun 2022 terhitung 13,7 % kasus, dan pada tahun 2023 kian menurun menjadi 11,1% kasus. Pada tahun 2021, prevalensi kejadian stunting tertinggi di Kabupaten Belu berada di Kecamatan Lakmanen Selatan dengan prevalensi sebesar 46,2%. Namun, berkat kerja keras dan implementasi program dari pemangku kepentingan terkait, prevalensi stunting di Kecamatan Lakmanen Selatan turun menjadi 21,1% pada tahun 2022 dan turun kembali menjadi 3% pada tahun 2023 (Helmyati et al., 2023). Sementara itu, kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi peningkatan stunting adalah Kecamatan Lasiolat sebesar 16,8%, Kecamatan Kalkuluk sejumlah 2,6%, dan Kecamatan Raihat sebesar 0,6 % (Helmyati et al., 2023).

Berdasarkan Laporan Kegiatan Kajian Analisis Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (2023), ada sejumlah faktor penyebab angka stunting tinggi, yaitu faktor sosio-ekonomi-budaya (pola asuh, perkawinan dini, riwayat pendidikan keluarga, tempat tinggal kurang layak), tingkat pemahaman dan pendidikan gizi (kurang pemahaman tentang pentingnya pendidikan kesehatan bagi usia subur dan catin, kurang pengetahuan tentang stunting, kurang pengetahuan tentang status gizi), faktor higiene dan sanitasi (higiene dan sanitasi buruk, BAB di sembarang tempat, kurangnya pola hidup bersih dan sehat), faktor kesehatan (adanya penyakit kronis, imunitas), perawatan ibu hamil dan menyusui (ibu hamil kurang periksa di puskesmas, berat badan ibu hamil tidak naik, tidak dilakukan perawatan paska melahirkan, pemberian IMD dan ASI pada bayi oleh ibu hamil, kehamilan risiko tinggi), pangan dan pola makan/asupan gizi (ketersediaan pangan, kurang asupan gizi, kurang asupan gizi selama 1000 HPK, pola makan tidak sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, konsumsi tablet tambah darah, pemberian makan tambahan dan pemenuhan gizi seimbang) (Helmyati et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengolahan data dari observasi, wawancara, dan FGD di empat lokasi, tingkat layanan kesehatan sudah semakin baik, pemerintah desa sudah melayani masyarakatnya untuk mendapatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan seperti Indonesia Sehat, puskesmas pembantu, bidan desa, dan layanan Kesehatan lainnya. Kader Posyandu dan PKK aktif di tiap desa/kelurahan, partisipasi dan antusiasme warga pun juga baik. Bahkan, sejumlah kader PKK mengantarkan kiriman makan sehat dan bergizi ke rumah warga yang tercatat stunting. Di Desa Fatubena, menu bantuan makan program PMT (Program Makan Tambahan) adalah nasi, sayur, telur, tempe, dan buah. Namun, dalam praktiknya, telur yang didapat itu dibagi dua dengan kakaknya yang tidak mengalami stunting oleh ibunya. Keputusan untuk memberikan PMT kepada anak yang lain itu merupakan salah satu sinyal bahwa asupan gizi di Desa Fatubena kurang mencukup. Hal itu sesuai dengan temuan dari tim Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan yang menyatakan bahwa “sebagian besar orang tua dan pengasuh balita menjadikan

pemberian makanan tambahan yang diberikan selama 90 hari sebagai makanan utama” (Helmyati et al., 2023). Padahal, PMT, sesuai dengan namanya, adalah makanan komplementer, bukan bahan pangan utama. Alhasil, pada saat periode pemberian PMT, status gizi balita membaik dengan berat badan yang terus naik. Akan tetapi, ketika program PMT berakhir, pola makan anak kembali seperti semula, dan menyebabkan KEK dan dapat kembali memburuk menjadi stunting (Helmyati et al., 2023).

Keterkaitan antara kesehatan yang buruk, stunting, dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu merupakan lingkaran yang sulit diputus. Keluarga yang berada dalam kemiskinan ekstrem tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, seperti posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan ibu hamil dan anak-anak, yang seharusnya menjadi fokus dalam pencegahan stunting. Anak-anak yang mengalami stunting sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai potensi belajar yang optimal, sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian pendidikan mereka. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, yang pada akhirnya memperpanjang kondisi kemiskinan dalam keluarga tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan yang buruk dan stunting tidak hanya merupakan masalah kesehatan semata, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap reproduksi kemiskinan antar generasi. Secara keseluruhan, kualitas SDM yang rendah akibat masalah kesehatan seperti stunting menjadi penghalang bagi upaya peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Belu. Bab ini akan mengulas lebih lanjut tentang bagaimana kondisi kesehatan yang buruk, khususnya stunting, memperkuat siklus kemiskinan ekstrem di daerah ini dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Intervensi yang tepat, seperti program pemberian makanan tambahan dan peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, menjadi penting untuk memutus mata rantai kemiskinan yang berakar pada masalah kesehatan ini.

5.3. Faktor Ekonomi

Ekonomi Kabupaten Belu menunjukkan karakteristik yang kompleks dan beragam. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagian besar ditopang oleh pengeluaran konsumsi, yang menyumbang sekitar 70% dari total PDRB. Meskipun demikian, kondisi ini dipengaruhi oleh net ekspor yang negatif, di mana daerah ini cenderung lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor, sehingga memperburuk keseimbangan perdagangan.

Tingginya inflasi lokal juga menjadi tantangan serius, karena dapat mengikis daya beli masyarakat. Inflasi yang meningkat tidak hanya berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperparah kondisi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, terdapat dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang memerlukan analisis mendalam tentang bagaimana ketimpangan gender ini mempengaruhi upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Selain perekonomian makro di atas, temuan-temuan di lapangan yang akan disajikan pada bagian selanjutnya, menjelaskan hal ini secara lebih rinci.

5.3.1. Mata Pencaharian dan Aset (Tanah, Ternak, Modal, Keterampilan)

Faktor ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu, salah satunya terkait dengan kepemilikan aset seperti lahan dan ternak, sangat dipengaruhi oleh status kependudukan, yakni antara warga lama dan warga baru. Warga lama, yang umumnya merupakan penduduk asli wilayah tersebut, memiliki keuntungan dalam hal kepemilikan aset, baik berupa lahan pertanian

maupun hewan ternak, yang diwariskan secara turun-temurun. Aset ini memberikan stabilitas ekonomi yang lebih besar, karena lahan dapat digunakan untuk produksi pertanian dan peternakan, yang menjadi sumber penghidupan utama di kawasan tersebut.

Sebaliknya, warga baru yang datang dari Timor Leste seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap aset, khususnya lahan dan ternak. Banyak dari mereka datang tanpa memiliki sumber daya awal yang cukup, sehingga mereka mengalami kerentanan ekonomi yang lebih besar. Namun, dalam beberapa kasus, terutama di daerah seperti Fatubeno, perkawinan campur antara warga lama dan warga baru memberikan peluang bagi warga baru untuk memperoleh akses terhadap lahan dan hewan ternak. Dalam kasus ini, warga baru yang menikah dengan warga lama dapat terintegrasi ke dalam sistem ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya sulit diakses. Kasus di Desa Tohe misalnya, warga baru dikenal sebagai pekerja keras dan ulet dalam mengelola lahan. Meskipun mereka tidak memiliki lahan secara langsung, banyak dari mereka bekerja sebagai penggarap lahan milik *nai* atau bangsawan setempat. Melalui kerja keras ini, beberapa dari mereka berhasil mengumpulkan modal yang cukup untuk membeli lahan dan ternak sendiri, yang pada akhirnya meningkatkan kondisi ekonomi mereka dan membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan ekstrem. Peran kerja keras ini menjadi bukti bahwa mobilitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut masih mungkin terjadi meskipun akses awal terhadap aset terbatas.

Namun, tidak semua warga baru mampu mencapai kondisi tersebut. Sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki akses ke lahan atau hewan terpaksa bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau kuli proyek. Ketergantungan pada pekerjaan kasar ini membuat mereka tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, karena upah yang diterima tidak cukup untuk membeli aset produktif seperti lahan atau hewan ternak. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Secara keseluruhan, perbedaan akses terhadap aset seperti lahan dan hewan ternak menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu. Warga lama yang memiliki aset warisan lebih mampu mengamankan kehidupan ekonomi mereka, sementara warga baru menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, melalui kerja keras dan integrasi sosial, beberapa warga baru mampu mengatasi keterbatasan ini, meskipun banyak yang tetap terperangkap dalam kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

5.3.2. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan yang mempengaruhi penghidupan warga di Kabupaten Belu merupakan aspek penting dalam menganalisis kemiskinan ekstrem di wilayah ini. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya bertani, terutama dengan sistem tadah hujan, kondisi alam sangat menentukan pendapatan mereka. Petani tadah hujan di Belu umumnya mengandalkan musim hujan untuk bercocok tanam, dengan keterbatasan hasil yang memengaruhi ketahanan pangan dan pendapatan rumah tangga. Selain bertani, sebagian penduduk juga memelihara hewan ternak skala rumah tangga, namun skala kepemilikan yang kecil menjadikan kontribusi ternak terhadap pendapatan tidak signifikan bagi sebagian besar warga.

Warga baru di Fatubeno, khususnya, menghadapi pendapatan yang rendah karena akses terhadap lahan yang terbatas dan hasil pertanian yang bergantung pada kondisi air. Namun, ada inisiatif kelompok tani yang berhasil memanfaatkan sisa air dari sungai untuk bertani hortikultura sepanjang tahun. Inisiatif ini memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi warga yang

terlibat, meskipun secara umum kelompok ini masih berada dalam kondisi rentan. Keberhasilan inovasi ini menunjukkan bahwa meskipun lahan terbatas dan tantangan air ada, usaha yang kreatif dan adaptif dapat membantu meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, ada inisiatif dari Petani Muda Keren Belu yang mencoba mengembangkan pertanian hortikultura meskipun terbatas oleh kualitas lahan dan sumber daya air. Kelompok ini mencerminkan adanya upaya dari generasi muda untuk memperbaiki kondisi pertanian dan pendapatan di Belu dengan pendekatan yang lebih modern dan berkelanjutan. Dengan memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih canggih dan praktik-praktik pertanian yang beradaptasi terhadap tantangan lingkungan, ada potensi peningkatan pendapatan di sektor hortikultura.

Di Desa Faturika, penduduknya memiliki lahan berbukit yang cukup subur, yang memungkinkan pengelolaan perkebunan dengan berbagai komoditas seperti sirih, pinang, dan umbi-umbian. Selain itu, hortikultura juga menjadi komoditas penting bagi penduduk, sementara peternakan skala kecil hingga menengah, termasuk ternak babi, sapi, dan kerbau, menambah sumber pendapatan warga. Dengan adanya diversifikasi pengelolaan lahan dan ternak, Desa Faturika mampu menghasilkan pendapatan yang lebih stabil dibandingkan desa-desa yang hanya mengandalkan pertanian tadah hujan. Desa Tohe menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendapatan antara penduduk yang memiliki akses ke irigasi dan mereka yang hanya bergantung pada lahan tadah hujan. Petani di wilayah irigasi dapat melakukan tiga kali masa tanam dalam setahun, dengan kombinasi padi, jagung, dan hortikultura, yang memberikan penghasilan lebih tinggi dan stabil. Namun, penduduk yang tinggal di bagian selatan desa dengan lahan tadah hujan menghadapi tantangan yang sama dengan desa-desa lainnya di Belu, yakni hasil pertanian yang terbatas dan bergantung pada musim. Di Desa Kenebibi, sebagai desa pesisir, penduduk memiliki diversifikasi pendapatan yang cukup baik. Selain mengelola lahan tadah hujan yang ditanami hortikultura atau umbi-umbian sekali setahun, sebagian penduduk bekerja sebagai nelayan yang memberikan pendapatan tambahan. Bagi warga baru, salah satu sumber pendapatan yang penting adalah menyadap nira kelapa untuk dijadikan moke, minuman keras lokal. Aktivitas ini menjadi alternatif pendapatan di samping pertanian dan peternakan yang terbatas. Diversifikasi ekonomi seperti ini memungkinkan penduduk untuk tetap bertahan, meskipun tingkat pendapatan secara keseluruhan masih rendah dan rentan terhadap perubahan kondisi alam.

Secara keseluruhan, tingkat pendapatan penduduk di Kabupaten Belu sangat bergantung pada akses terhadap lahan, irigasi, dan diversifikasi penghasilan. Wilayah dengan irigasi yang baik, seperti di Tohe, mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah tadah hujan. Inisiatif-inisiatif lokal seperti hortikultura sepanjang tahun dan diversifikasi komoditas juga memberikan kontribusi positif, meskipun tantangan yang dihadapi, terutama bagi warga baru, masih sangat besar.

5.3.3. Tingkat Pengeluaran/Konsumsi

Tingkat pengeluaran dan pola konsumsi di Kabupaten Belu dipengaruhi oleh dua faktor utama: kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup sehari-hari, dan kebutuhan budaya atau adat yang mendalam dan sangat mempengaruhi alokasi pendapatan rumah tangga. Kombinasi dari kedua faktor ini seringkali membuat pengeluaran keluarga di Belu terfokus tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada tuntutan sosial dan budaya yang terkait erat dengan identitas dan norma-norma masyarakat setempat.

Untuk kebutuhan dasar, masyarakat Kabupaten Belu, terutama di Fatubena, Faturika, Tohe, dan Kenebibi, umumnya menggunakan pendapatan dari hasil pertanian dan perdagangan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Di Fatubena, pendapatan utama berasal dari hasil hortikultura seperti terong, cabai, dan sawi. Di Faturika, komoditas seperti kemiri dan tanaman hortikultura lainnya juga menjadi sumber pendapatan utama, sementara di Tohe, padi dan jagung yang dihasilkan dari sistem pertanian irigasi memberikan kontribusi terbesar. Di Kenebibi, hasil laut dan tanaman pangan seperti jagung menjadi tumpuan ekonomi. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian dan perdagangan ini biasanya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak-anak, dan perbaikan rumah.

Namun, tabungan dan investasi jangka panjang, seperti untuk biaya pendidikan atau kesehatan yang lebih besar, umumnya dikumpulkan dari penjualan ternak seperti sapi dan babi. Ini mencerminkan strategi pengelolaan pendapatan yang dibagi antara pengeluaran sehari-hari dan persiapan untuk kebutuhan yang lebih besar dan mendesak. Misalnya, keluarga akan menyimpan hasil penjualan ternak untuk biaya sekolah anak-anak atau biaya kesehatan dalam situasi darurat. Kebutuhan dasar yang relatif mendasar ini, dalam banyak kasus, membuat konsumsi rumah tangga di Belu terlihat sederhana dan minimalis.

Selain itu, pola konsumsi di Kabupaten Belu sangat dipengaruhi oleh tuntutan adat dan budaya yang memerlukan pengeluaran besar pada momen-momen tertentu. Sumbangan untuk belis, yang terdiri dari sapi, babi, kain, atau plat (perhiasan), merupakan salah satu kebutuhan adat yang paling signifikan. Belis ini diberikan dalam acara perkawinan dan merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Belu, termasuk di Fatubena, Faturika, Tohe, dan Kenebibi. Pengeluaran untuk adat ini dianggap sebagai "harga mati" yang tidak bisa dihindari atau dikurangi. Seperti dicontohkan oleh informan di Kenebibi, dalam ritual adat seperti "kasih dingin rumah" di Timor, seseorang harus memberikan babi jantan, 5 jerigen sopi (minuman tradisional), uang rokok, dan ongkos transportasi untuk menghadiri ritual tersebut. Ini menegaskan bahwa pengeluaran adat bukanlah sekadar pilihan, tetapi kewajiban sosial yang harus dipenuhi.

Selain belis, pengeluaran besar lainnya datang dari pesta-pesta adat dan acara keagamaan seperti sambut baru, upacara penyambutan anggota baru ke dalam keluarga atau komunitas. Pengeluaran untuk sambut baru ini bisa mencakup uang tunai, barang-barang seperti peci (minuman tradisional), dan minuman ringan seperti sprite. Sebagai contoh, Mama X di Fatubena baru-baru ini menghadiri sambut baru dan memberikan sumbangan sebesar Rp 200.000, sopi satu botol, dan satu krat sprite. Pada bulan-bulan tertentu seperti Agustus dan September, undangan untuk menghadiri sambut baru bisa datang hingga 3-4 kali dalam sebulan, dan ini menambah beban ekonomi yang harus ditanggung oleh rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun kebutuhan dasar rumah tangga di Kabupaten Belu tampak sederhana dan dibatasi oleh pendapatan dari sektor pertanian dan peternakan, pengeluaran adat memberikan tekanan yang signifikan terhadap pola konsumsi. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam ritual-ritual adat, memberikan sumbangan untuk belis, dan menghadiri pesta-pesta adat membuat banyak keluarga mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan budaya ini. Meskipun hal ini memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya, konsekuensinya adalah penurunan kemampuan untuk menabung atau menginvestasikan pendapatan untuk kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, pola pengeluaran masyarakat di Kabupaten Belu mencerminkan ketegangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan tuntutan adat, dengan adat budaya seringkali mengambil porsi terbesar dari pengeluaran rumah tangga.

5.3.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kabupaten Belu memainkan peran kunci dalam tingginya angka kemiskinan ekstrem di wilayah ini, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal yang bergantung pada sektor pertanian tadah hujan. Dengan demikian, lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas dan musiman. Pada musim kemarau, ketika lahan pertanian tidak dapat diolah, banyak warga yang kehilangan sumber penghasilan tetap dan beralih ke pekerjaan serabutan. Keadaan ini memperburuk kondisi pengangguran terselubung, di mana masyarakat bekerja dalam sektor yang tidak stabil dan dengan pendapatan yang rendah.

Secara umum, pengangguran di Belu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pertanian yang musiman, tetapi juga kurangnya diversifikasi ekonomi di wilayah ini. Sebagian besar penduduk hanya memiliki keterampilan yang terkait dengan sektor pertanian dan peternakan, sehingga ketika sektor ini tidak memberikan pendapatan, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lain. Bagi warga yang tinggal dekat perkotaan, salah satu alternatif untuk mengatasi pengangguran adalah dengan membuka jasa ojek keliling. Namun, pekerjaan ini juga tidak memberikan pendapatan yang stabil, terutama karena persaingan yang tinggi dan daya beli masyarakat yang rendah. Bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga yang menganggur selama musim kemarau, keterampilan tradisional seperti membuat kain tenun Belu menjadi alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Meskipun industri kerajinan ini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan, khususnya dengan permintaan yang datang dari luar daerah, skala usaha tenun di Belu masih sangat kecil dan tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah pengangguran struktural yang dihadapi perempuan di wilayah tersebut. Selain itu, akses terbatas terhadap pasar dan modal menjadi penghambat bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan dari usaha kerajinan.

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Belu juga terkait erat dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Pendidikan yang terbatas membatasi peluang kerja di sektor formal, dan hal ini membuat sebagian besar penduduk hanya memiliki akses pada pekerjaan-pekerjaan kasar dengan upah rendah, seperti buruh tani, kuli bangunan, atau pekerja serabutan lainnya. Sebagai contoh, di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota, banyak warga yang bergantung pada pekerjaan musiman di pertanian, dan ketika musim tanam berakhir, mereka harus mencari pekerjaan lain seperti tukang bangunan atau buruh lepas untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, minimnya investasi dalam sektor-sektor non-pertanian di Belu juga memperburuk situasi pengangguran. Karena ekonomi lokal masih sangat bergantung pada sektor primer (pertanian dan peternakan), kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor lain seperti industri, jasa, atau pariwisata sangat terbatas. Meskipun ada beberapa usaha kecil yang mencoba untuk diversifikasi, seperti pembuatan tenun atau perdagangan kecil, kontribusi sektor ini terhadap pengurangan pengangguran masih relatif kecil. Tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang lebih luas, pengangguran di Belu akan tetap tinggi, dan kemiskinan ekstrem sulit untuk diatasi.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang berdampak langsung pada kemiskinan ekstrem, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Diversifikasi sektor ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan akses modal bagi usaha kecil juga dapat membantu membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan musiman dan serabutan.

5.3.5. Tingkat Ketersediaan Pasar dan Akses Pemasaran

Ketersediaan pasar dan akses pemasaran menjadi tantangan signifikan dalam penghidupan masyarakat di Kabupaten Belu, terutama bagi para petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Meskipun Belu dikenal sebagai salah satu produsen utama komoditas seperti tomat dan cabai, pasar yang tersedia untuk menjual hasil pertanian ini sangat terbatas, dan mayoritas petani menghadapi kendala dalam mengakses pasar yang lebih luas di luar wilayah lokal.

Dalam tata niaga pertanian di Kabupaten Belu, peran tengkulak atau **papalele** sangat dominan. Tengkulak, yang mayoritas berasal dari komunitas Bugis, sering kali dianggap sebagai "orang baik" oleh petani karena mereka menyediakan akses pasar yang mungkin tidak dapat dijangkau langsung oleh petani. Namun, dominasi tengkulak ini menciptakan situasi di mana petani berada pada posisi tawar yang lemah. Tengkulak menentukan harga jual produk pertanian, yang sering kali tidak menguntungkan bagi petani karena mereka tidak memiliki alternatif pasar lain yang dapat diakses dengan mudah. Akibatnya, petani kerap terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan mereka secara keseluruhan.

Sebagian besar petani di Belu masih menjalankan *subsistence farming*, di mana mereka memprioritaskan tanaman pangan untuk konsumsi rumah tangga. Ini berarti bahwa surplus produksi yang bisa dijual ke pasar menjadi terbatas, dan ketika ada surplus, produk tersebut tidak selalu mendapatkan harga yang sesuai dengan biaya dan usaha yang telah dikeluarkan oleh petani. Tanaman hortikultura, seperti tomat dan cabai, menjadi komoditas utama yang dijual oleh petani ke pasar lokal, namun ketidakseimbangan antara produksi yang tinggi dan akses pasar yang terbatas sering kali menyebabkan penurunan harga komoditas tersebut, terutama ketika musim panen tiba secara bersamaan.

Sebagai contoh, produksi tomat di Belu cukup melimpah, sehingga Belu dikenal sebagai penghasil tomat yang signifikan di wilayah tersebut. Namun, para petani sering kali mengeluhkan bahwa tidak ada pasar sayur yang memadai di Kota Atambua untuk menampung hasil produksi mereka. Tidak adanya fasilitas pengolahan atau pasar yang lebih besar menyebabkan produk-produk seperti tomat hanya dijual dalam bentuk buah segar, tanpa adanya nilai tambah dari produk turunan seperti saus tomat atau olahan lainnya. Hal ini membuat petani kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui diversifikasi produk dan penjualan ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, *setting* tata niaga yang dikuasai tengkulak semakin memperparah posisi tawar petani. Ketergantungan pada tengkulak untuk akses pasar mengakibatkan petani sulit mengembangkan strategi penjualan yang lebih mandiri atau mencari alternatif pasar yang bisa memberikan harga lebih kompetitif. Petani di Belu juga menghadapi kendala infrastruktur, seperti akses jalan yang buruk dan minimnya fasilitas penyimpanan, yang memperburuk kemampuan mereka untuk membawa produk ke pasar dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, akses pasar yang terbatas dan rendahnya posisi tawar petani di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi dan berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan ekstrem. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya intervensi yang mendukung peningkatan akses pasar, seperti pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik, pengembangan pasar yang lebih memadai di kota-kota sekitar, serta inisiatif untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengolah produk menjadi barang dengan nilai tambah lebih tinggi. Pendekatan yang lebih terstruktur dalam tata niaga pertanian, serta peningkatan koneksi antara petani dan pasar di luar wilayah lokal, dapat membantu memperbaiki kondisi

ekonomi petani dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang sering kali tidak memberikan keuntungan optimal bagi petani.

5.4. Faktor Sosial

Kemiskinan secara holistik juga dinalisa dari dinamika sosial-politik dalam suatu komunitas masyarakat. Daerah dengan tingkat konflik sosial yang tinggi terjadi karena adanya kesenjangan-kesenjangan di berbagai aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem Belu penting untuk mendalami fenomena sosial pada masyarakat, seperti ketergantungan masyarakat terhadap perjudian yang seringkali berujung pada tindak kriminal, persebaran pendatang imigran akibat dinamika politik perbatasan, serta permasalahan pada kelompok-kelompok yang termarginalkan seperti perempuan, anak, manula, difabel, dan warga pendatang dengan keterbatasan akses terhadap asset, modal, dan keterbatasan serta kerentanan lainnya pada subab-subab berikut.

5.4.1. Tingkat Kriminalitas dan Perjudian

Konteks perjudian menjadi masalah ketika bersifat maladaptive¹ dan kecanduan, sehingga menimbulkan rangkaian permasalahan yang begitu kompleks, terus berupaya meskipun sudah kalah berkali-kali (Mastaqilla et al., 2023). Perjudian merupakan permainan, di mana para pemain akan bertaruh berbagai pilihan kemungkinan-kemungkinan peruntungan. Si kalah akan memberikan sejumlah uang taruhannya untuk si pemenang. Sudah ada sejumlah studi sosial dan antropologi yang mengkaji tingkat perjudian dan kriminalitas kaitannya dengan tingkat kemiskinan suatu daerah. Tingkat perjudian dan kriminalitas pada suatu komunitas masyarakat, penting untuk dianalisa kaitannya dengan kemiskinan ekstrem. Dalam berbagai studi sosial dan antropologi, perjudian merupakan sebuah dampak gejala sosial-politik yang kompleks. Pada saat terjadi resesi ekonomi dan tingkat inflasi suatu daerah yang tinggi, ada kaitannya dengan tingginya minat masyarakat terbelenggu dalam dunia perjudian. Pada situasi dan kondisi krisis, harga kebutuhan keseharian tinggi, dan penghasilan tidak mampu menjamin kebutuhan sehari-hari. Hasil sejumlah studi tersebut menemukan bahwa individu maupun komunitas yang terbelenggu pada situasi ekonomi-politik yang krisis dan korup, akan cenderung mencari-cari peruntungan/ mengubah nasib melalui dunia perjudian.

Selama studi lapangan di Desa Faturika peneliti menjumpai lapak bandar judi yang ramai dikerumuni orang di acara resepsi perkawinan. Adapun cerita pengalaman menang-kalah berjudi yang sering didengar peneliti ketika *live in* di 4 (empat) lokasi penelitian selama 2 (dua) minggu. Hasil observasi serupa juga peneliti jumpai di daerah-daerah perbatasan, tertinggal, dan terpencil lainnya, di mana bandar-bandar judi membuka lapak di pusat-pusat keramaian, seperti di pasar, pesta kematian, pesta perkawinan, dan di lokasi-lokasi yang banyak kerumunan lainnya. Judi tidak sekedar hiburan semata, melainkan ada banyak pertarungan kehilangan uang jika kalah, dan harapan besar untuk memenangkan. Sama seperti Mama Maria di Faturika (peserta FGD), “...tiap rabu, selesai jual kemiri di Pasar Katikuai uangnya buat beli beras, sabun, kopi, gula. Nanti ada uang 50-100 kah untuk main BG (Bola Guling). Kalau pas rame bisa pasang 500.... Lebih sering tidak dapat. tapi kalau uang BG kita tutup mata, angap uang hangus. ... kalau menang uangnya untuk tambah beli-beli, bisa juga beli kain, pakaian.” – Mama Mega, 2024.

¹Perilaku maladaptif yaitu penyimpangan dari normalitas sosial yang selalu berpengaruh buruk pada kesejahteraan individu dan kelompok sosial.

Jenis judi yang sering dimainkan orang Belu adalah sabung ayam, dadu goyang (kuru-kuru), bola guling (BG), dan kupon putih, baik secara *online* maupun *offline*. Sabung ayam biasanya dimainkan di Kelurahan Fatubena, Kota Atambua dan sekitarnya, Kilometer 16, Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat. Bola Guling (BG) adalah jenis judi yang paling marak digelar di daerah-daerah di Belu. Biasanya BG dimainkan di pasar-pasar kecamatan yang lumayan ramai, seperti Pasar Raimanuk tiap Senin dan Pasar Halilulik tiap Kamis. Salah satu peserta FGD di Kantor BP4D menyampaikan, masyarakat yang kecanduan judi tidak hanya orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak juga sudah banyak yang kecanduan berjudi, meskipun jumlah nominalnya tidak sebesar orang-orang dewasa. Judi seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah sosial-budaya lainnya, seperti awal mula terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta ekspresi-ekspresi kekerasan lainnya seperti tawuran yang begitu masif di Desa Kenebibi. Kata seorang informan, *“kebiasaan di sini orang duduk-duduk main judi tidak kosong, ada temannya “moke” (jenis miras di Belu). Kalau minum banyak mabuk, salah-salah omong bisa marah, bisa baku hantam.”*

Kecanduan berjudi juga membuat perempuan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di empat lokasi penelitian, peneliti sering mendengar kisah KDRT karena perjudian, seperti yang disampaikan Mama Ve di Kenebibi, *“... kalau jadi istri orang Timor harus kuat jadi samsak, ditinju, ditendang, kuat maki minta uang untuk judi. Tapi biasanya karena mabuk aja. Kalau tidak mabuk tidak jahat. Mama depan rumah baru-baru ribut-ribut dengan suami, minta uang judi tapi tidak dikasih.”* Tren berjudi yang marak dan meresahkan banyak orang di Belu, telah menghasilkan inovasi-inovasi pencegahan melalui berbagai pendekatan di tingkat komunitas keluarga, gereja, dan pemerintah desa. Pemuka agama menyelipkan kotbah mingguan, kepala desa dan tokoh masyarakat yang membuat aturan/ denda adat bagi rumah tangga atau pihak-pihak yang bertikai karena perjudian dan minuman keras (miras).

Korelasi kemiskinan dengan perjudian serta perbuatan kriminal bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan akan selalu berhubungan. Berdasarkan temuan-temuan emik di lapangan sifat hubungan perjudian dan kemiskinan pun dua arah. Pertama, kecanduan judi dapat dikarenakan persoalan ketimpangan sosial baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Kedua, belenggu dalam dunia perjudian karena kemiskinan dan perjudian bagaikan mata rantai yang sukar untuk diputus. Dengan demikian, perlu adanya penguatan di sektor ekonomi, keterampilan, dan sosial yang inklusif untuk menekan tingkat perjudian. Dengan meningkatnya daya memenuhi kebutuhan keseharian, dapat mengurangi jalan-jalan tikus mencari peruntungan hidup yang justru dapat membelenggu dalam persoalan-peroalan lainnya yang lebih kompleks.

5.4.2. Dinamika Migrasi Warga Baru

Warga Baru merupakan sebutan untuk eks pengungsi Timor-Timor yang melakukan migrasi dari Timor Leste ke Indonesia, khususnya ke wilayah Kabupaten Belu. Berdasarkan pembacaan literatur, arus migrasi warga baru ini terjadi dalam tiga periode yang terpisah: gelombang pertama pada tahun 1979 ketika Timor Timur bergabung dengan Indonesia, gelombang kedua pada tahun 1990-an, dan gelombang ketiga pada awal tahun 2000-an saat Timor Timur lepas dari Indonesia (Alkatiri, 2018). Sampai saat ini, tidak ada data agregat mengenai warga baru yang bermigrasi dari Timor Timur ke Indonesia sejak akhir tahun 70-an hingga awal tahun 2000-an. Kendati demikian, ada dua lembaga yang memperkirakan jumlah total pengungsi, meskipun angka perkiraannya tidak bisa dikatakan komprehensif. Menurut laporan dari *US Committee for Refugees and Immigrant*, jumlah pengungsi pada tahun 1999 mencapai sekitar 250.000 jiwa dan berkurang menjadi 132.000 jiwa karena adanya repatriasi. Pada tahun 2014, Kementerian Perumahan Rakyat Republik

Indonesia menyatakan bahwa jumlah warga baru di Kabupaten Belu mencapai 80.000 - 100.000 jiwa. Apabila diandaikan bahwa data tersebut konstan lalu dibandingkan dengan data jumlah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2023, persentase warga baru di Kabupaten Belu mencapai 22,4 %. Dengan jumlah dan persentase yang cukup besar, warga baru menjadi salah satu komponen penduduk terbanyak di Kabupaten Belu.

Walaupun sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), eks pengungsi Timor Timur masih mengalami banyak diskriminasi, khususnya mereka yang menyeberang ke Indonesia pada gelombang ketiga. Dalam prosesnya, warga baru memang cenderung diterima oleh penduduk asli karena dirasa memiliki karakteristik sosial dan budaya yang tidak jauh berbeda. Proses penyesuaian itu terjadi melalui momen-momen penting seperti perkawinan dan acara lainnya. Lewat perkawinan itu, warga baru dapat membaaur dengan penduduk yang telah lama tinggal di Kabupaten Belu. Akan tetapi, dalam beberapa aspek lainnya, warga baru masih merasakan rangkaian perlakuan diskriminatif. Pada aspek ekonomi seperti penguasaan sumber daya ekonomi pertanian, contohnya, warga baru tidak bisa memiliki tanah di Kabupaten Belu karena ada aturan adat yang mengatur pelarangan pemberian lahan kepada “orang luar” (Alkatiri, 2018). Aturan itu memutus segala akses lahan bagi warga baru sebab mereka tidak bisa membeli atau menyewa tanah untuk melakukan produksi pertanian. Hal itu membuat warga baru harus rela bekerja di tingkat produksi ekonomi pertanian paling bawah, yakni dengan menjadi buruh tani atau pekerja lepas di sektor informal lainnya. Pendapatan yang didapat dari dua macam pekerjaan itu sangat sedikit dan tidak pasti. Salah satu informan pemilik lahan mengatakan bahwa mereka memberi upah buruh tani sebesar Rp 30.000 untuk pekerjaan yang dilakukan dari pagi hingga sore. Pekerjaan itupun tidak setiap hari ada karena pertanian di Kabupaten Belu merupakan tadah hujan. Dengan penghasilan yang sangat miris dan serba tidak pasti, warga baru hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, banyak dari mereka yang terdata sebagai penduduk miskin atau bahkan miskin ekstrem.

Situasi yang sama juga terjadi di ranah politik. Pada level pemerintahan desa atau kelurahan, warga baru tidak bisa mengajukan diri sebagai calon pemimpin di desa yang mereka tinggali. Secara struktural, warga baru mengalami hambatan pada dua sisi. Pertama, dalam aspek legal di beberapa desa, terdapat peraturan yang menyatakan bahwa pemimpin di wilayah tersebut harus berasal dari warga setempat. Terdapat setidaknya tiga alasan mengapa aturan itu dibuat: adanya kekhawatiran tergerusnya nilai dan norma lokal apabila warga baru menjabat sebagai pemimpin politik, komunitas eks Timor Timur belum dapat dipercaya karena dianggap belum berkompeten, dan sifat keras kepala yang ditakutkan akan mengganggu legitimasi lembaga adat (Alkatiri, 2018; Retnowati, 2018). Kedua, sistem politik yang bertautan erat dengan sistem adat “memaksa” setiap orang yang ingin menjadi kepala pemerintahan meminta restu kepada ketua adat sebelum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa atau kelurahan. Tahapan tersebut sangat penting karena dalam implementasinya pemerintah desa atau kelurahan akan terus bersinggungan dengan kepentingan lembaga adat seperti penyelenggaraan upacara atau mobilisasi penduduk desa. Pada saat yang sama, proses itu kadang menjadi penghambat bagi warga baru yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa atau kelurahan. Tidak adanya representasi warga baru di level pemerintah desa berdampak pada kebijakan yang cenderung meminggirkan atau bahkan tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan mereka. Alhasil, karena tidak memiliki kuasa politik, warga baru tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah kondisi kemiskinan yang mereka rasakan.

5.4.3. Kelompok Marjinal (Anak, Perempuan, Lansia, Difabel)

Berdasarkan data kemiskinan Belu terdapat 34.180 orang berada pada garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan 15,4 % warga Belu hidup dalam garis kemiskinan, di mana biasanya paling banyak warga yang hidup dalam garis kemiskinan berada di kawasan perdesaan. Berdasarkan observasi, wawancara, dan FGD di empat lokasi penelitian, warga yang rentan hidup dalam kemiskinan adalah warga baru, anak, perempuan, manula, dan difabel.

Keluarga miskin di pedesaan seringkali mampu hidup dengan keterbatasan bahkan kekurangan, mereka dapat bertahan hidup dengan sumber daya maupun makan seadanya. Seringkali, perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Ironisnya, keluarga itu terbelenggu dalam kemiskinan, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, perempuan-perempuan turut menanggung kemiskinan dalam keluarga. Situasi tersebut mengakibatkan tidak sedikit anak-anak dan perempuan yang kemudian merantau bekerja di luar daerah Belu. Biasanya mereka bekerja melalui jalur ilegal di Malaysia, Hongkong, dan negara-negara jaringan *human trafficking* lainnya. Agen-agen ilegal solusi instan untuk mencari nafkah dan peruntungan di luar negeri tanpa persyaratan administrasi yang rumit. Seringkali syarat batas usia, pendidikan, keterampilan, dan status kependudukan dipalsukan oleh agen, agar lolos persyaratan administrasi. Pendidikan dan keterampilan yang terbatas, menyebabkan mereka bekerja di sektor-sektor kasar, seperti buruh dan sektor rumah tangga. Ironisnya, status ilegal mereka menyebabkan mereka rentan mengalami penipuan dan kekerasan: fisik, verbal, seksual, dan eksploitasi di tempat kerja. Sudah banyak korban *human trafficking* menjadi re-viktisasi jual beli organ, penganiayaan, korban pemerkosaan, dan bahkan penipuan upah yang tak kunjung dibayar, atau potongan upah yang begitu besar oleh agen penyalur tenaga kerja ilegal. Meskipun, ada cerita warga yang merantau bisa membangun rumah, membeli asset di kampung seperti lahan, hewan, dan sebagainya.

Konsep Cullen DuPont, "*Poverty is perhaps the greatest underlying causes of human trafficking from and within countries of origin*" (2009: 23), relevan dengan konteks kemiskinan Belu. Banyak keluarga yang terbelenggu dalam kemiskinan dan minim keterampilan yang rentan menjadi korban *human trafficking*. Jalur kerja ilegal menjadi jalur peruntungan nasib dengan bekerja di negeri orang meski nyawa menjadi taruhannya. Tingginya angka masyarakat Belu hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya angka korban *human trafficking*, menjadi situasi yang semakin kompleks, mengencangkan tali kemiskinan. Di 4 (empat) lokasi penelitian, yaitu di Kelurahan Fatubena, Desa Faturika, Desa Tohe, dan Desa Kenebibi warga yang tercatat sebagai warga miskin ekstrem adalah mereka yang representatif dari kelompok marginal: difabel dan manula. Mereka yang tercatat sebagai warga miskin ekstrem, menerima bantuan program pemerintah berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per semester, dan bantuan bahan pangan berupa beras dan telur. Namun, bagi peserta FGD pencatatan warga miskin ekstrem masih bias dan ambigu. Masih ada sejumlah warga yang layak tercatat sebagai warga miskin ekstrem, namun belum tercatat.

Misalnya di Kelurahan Fatubena, ada warga yang tidak tercatat sebagai KK miskin ekstrem, padahal tempat tinggal masih tenda, tanpa penerangan, suami tinggal bekerja sebagai buruh batu sungai, jika musim penghujan suami tidak mendapat penghasilan sama sekali. Istri tidak bisa bekerja, karena harus mengurus anak-anak yang jarak usianya berdekatan. Usia anak paling besar 3 tahun, anak kedua usia 1 tahun, dan anak ketiga usia 5 bulan. Biasanya istri juga ikut membantu suami sebagai buruh batu sungai, namun karena harus mengurus bayi ia tidak berpenghasilan. Adapun di Desa Tohe, seorang janda (warga baru), suaminya sudah 5 tahun meninggal. Tinggal sebatang kara, tidak memiliki keturunan. Keluarga besar berada jauh di Timor Leste. Tempat

tinggal dari bantuan pemerintah, namun tidak mampu membayar listrik. Sehari-hari menenun, untuk mencukupi kebutuhan hidup. Untuk membeli benang modal Rp 90.000,00. Ia menenun selama 4 (lima) hari penuh. Kain dijual di pasar harga Rp 110.000,00. Ia mendapat Rp 20.000,00 per kain hasil kerja seharian selama 4 hari. Itupun, belum tentu tiap harinya laku. Jika ia butuh uang, ia jual rugi agar biaya benang bisa kembali untuk membeli benang lagi.

5.5. Faktor Budaya

Kemiskinan merupakan isu yang begitu kompleks, sehingga perlu pendekatan secara holistik untuk menganalisisnya. Studi kemiskinan dengan perspektif holistik, tidak sebatas menganalisa dari faktor ekonomi saja, melainkan juga mencermati aspek kultural/ budaya yang melingkupinya (Lewis, 2016). Konsep kemiskinan kultural dari Oscar Lewis, kemiskinan merupakan subkultur yang diwariskan lintas generasi, maka cara hidup, pola pikir, dan sistem nilai sehari-hari orang miskin dapat mempengaruhi peluang kemungkinan mereka keluar dari kemiskinan. Ironisnya, orang miskin cenderung mengembangkan pola perilaku dan sikap adaptasi dengan kondisi kemiskinan mereka, seperti ketergantungan pada bantuan sosial serta kurangnya ambisi untuk pendidikan yang lebih tinggi (Lewis, 2016).

Adapun karakteristik kemiskinan kultural menurut Oscar Lewis, yaitu (1) ketidakpercayaan pada lembaga formal (pendidikan, hukum, dan pemerintah); (2) orientasi hidup berfokus pada jangka pendek - kurang tanggap pada rencana jangka panjang/ investasi untuk masa depan; (3) perasaan tidak berdaya dan ketidakmampuan untuk mempengaruhi perubahan dalam kehidupan mereka; (4) ikatan keluarga yang kuat, tetapi dalam konteks yang mengutamakan kelangsungan hidup harian dari pada pengembangan jangka panjang (Lewis, 2016). Indikator karakteristik kemiskinan kultural Oscar Lewis, relevan dengan temuan empiris peneliti dalam melakukan penelitian kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu. Analisa empiris terkait faktor budaya dengan memperhatikan indikator karakteristik kemiskinan kultural Oscar Lewis diuraikan pada sub-bab paparan berikut.

5.5.1. Relasi *Extended Family* dan Klan

Bagi masyarakat pertanian yang memiliki karakteristik komunalisme, merawat hubungan dengan *extended family* menjadi modal sosial-kultural yang mengatur perputaran sumber daya seperti lahan, hasil bumi, tenaga kerja, dan benda-benda lainnya yang disepakati dalam suatu komunitas. Hubungan perputaran sumber daya itu diatur dalam kontrak-kontrak adat, seperti pada perkawinan berupa kesepakatan *belis* (mas kawin). Kontrak pertukaran itu disebut sebagai resiprositas tradisional. Namun, ketika masuknya modernisasi, adanya perubahan etiket pertukaran, seringkali relasi dengan *extended family* menjadi kurang relevan, mengikat, dan cenderung membebani. Hubungan pertukaran yang membebani disebut dengan resiprositas negatif (LAURA, 2018).

Dalam pola pertukaran tradisional, ada rasa kehormatan dan martabat yang terlibat. Mereka yang bisa mengkonsumsi, memiliki, dan memberi banyak dianggap memiliki martabat yang tinggi. Bahkan terkadang status sosial seseorang ditentukan oleh kepemilikan properti. Oleh karena itu properti terus bergerak, beralih dari satu pihak ke pihak lain. Peralihan properti tersebut seperti perdagangan, namun berdasarkan etiket tertentu tidak semata-mata untuk akumulasi properti (Mauss, 2002). Bahkan seringkali untuk menunjukkan status dan kekuasaan penghormatan seseorang, orang akan membawa benda adat dengan ukuran/ hitungan lebih (LAURA, 2018).

Dari suku-suku besar yang ada di Belu, Suku Kemak merupakan suku yang paling erat relasinya dengan *extended family*. Hak waris diturunkan pada laki-laki (patrilineal). Tanggung jawab adat Suku Kemak dikenal paling memberatkan dan kurang bisa dinegosiasikan. Dibandingkan dengan suku-suku lainnya di Belu yang hak warisnya diturunkan pada perempuan (matrilineal), relatif lebih negosiatif. Berdasarkan hasil studi literatur, wawancara mendalam, dan FGD warga miskin ekstrem kebanyakan adalah 'warga baru.' Di mana suku asli warga baru adalah suku Kemak. Kondisi warga baru yang serba sulit (minim asset dan pendidikan) semakin diberatkan dengan tanggung jawab adat di kampung halamannya.

Bapak Marten di Kenebibi (Suku Kemak), harus menyiapkan seekor babi jantan besar (8 orang pikul) untuk urusan bangun rumah adat di kampung halamannya di Timor Leste. Selain itu, ia juga harus menyiapkan lima botol sopi, sejumlah bungkus rokok, dan biaya sewa perahu dari Kenebibi ke Timor Leste. Kata Bapak Marten, "untuk adat itu harga mati. bahaya kalau tidak bawa... di sana (kampung halaman) apa yang kita bawa disaksikan orang satu suku. Jadi tau apa-apa dibawa siapa..." Hewan dan bawaan Bapak Marten itu disaksikan dan dicatat oleh seorang petugas satu suku. Hewan dan bawaan itu akan mendapat balasan berupa uang tunai, kurang lebih Rp 4.000.000,00 dan sejumlah kain dan sarung. Rencananya, uang tunai balasan itu akan dibelanjakan seekor kambing. Jika menggunakan logika matematis, apa yang dibawa Bapak Marten dan balasan yang diterima itu tidak ekuivalen. Namun, secara nilai sosial-budaya, justru hal itu cenderung dipelihara untuk tidak memutus mata rantai pertukaran sebagai pengikat relasi dengan *extended family*/ klannya.

Hubungan dengan *extended family* seringkali mengesampingkan kebutuhan hidup keseharian ditemukan di 4 (empat) lokasi. Kata seorang informan di Fatubena, pendatang dari Yogyakarta yang menikah dengan orang Kemak dan menetap di Fatubena, "..... orang sini hidup susah. tapi kalau urusan adat, mereka bisa bawa sapi, babi, kain, macam-macam lah. belum kalau pesta mereka juga judi. Tapi lihat itu, anak-anak seperti tidak terurus. makan kadang nasi kosong." Ironisnya, hubungan dengan *extended family* yang erat seringkali mengesampingkan pendidikan anak. Kata seorang salah satu informan di Desa Faturika, "Saya tidak seperti orang-orang sini. Tidak sekolah, anak-anak berkeliaran jaga hewan (sapi), main sana-sini, uang tidak diatur untuk sekolah mereka. tapi kalau urusan adat, ada uang. sekolah tidak ada uang."

Sama seperti Maria (45 tahun) di Fatubena, sudah 2 (dua) hari jualan kain di pasar, tapi tidak ada yang laku sama sekali. Malam harinya saudaranya datang ke rumah bersama dengan suami dan anaknya mengantarkan undangan pesta gali tulang neneknya. Maria harus menyiapkan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 dan 2 (dua) lembar kain. Padahal, hari itu ia sama sekali tidak pegang uang tunai. Bahkan beli telur untuk makan harian di kios pun tak bisa. Kata Maria, "kalau tidak ada kakak, kami tidak makan begini (nasi, telur, mie instant goreng, selada, sambal). Mama tidak pegang uang, kain tidak laku 2 (hari).... kalau ada undangan adat (gali tulang) nanti Mama pergi pinjam dulu ke mama sebelah dan cari pinjaman lain." Dengan demikian, kemiskinan ekstrem Belu menjadi semakin kompleks ketika masyarakatnya terhegemoni dengan ikatan *extended family* yang membebani, karena adanya perubahan nilai pertukaran. Bahasan kelindan nilai etiket pertukaran akan menyebabkan krisis atau keborosan yang akan dibahas lebih lanjut pada subab berikutnya.

5.5.2. Kebiasaan Pesta Adat Yang Boros

Keborosan adat terjadi karena ada kelindan kepentingan adat, antara etiket pertukaran tradisional dengan etiket pertukaran pasar (transaksional). Kelindan etiket pertukaran tersebut disebut

sebagai resiprositas negatif. Pertukaran biasanya tidak serta merta pertukaran yang nilainya ekuivalen. Melainkan, ada ajang menunjukkan tanda kemurahan hati (*generosity*), si penerima akan menambah nilai pada benda ke si pemberi. Kata Mathias, seorang tokoh adat di Desa Tohe, “kalau adat kematian, anak mantu wajib kasih sapi. Ukuran sapi itu dicatat. Ukuran sapi tidak boleh kurang. Tapi kalau lebih tidak apa.” Melebihi ukuran itu terus dilakukan. Inilah yang disebut Mauss dalam konsep pertukaran pada masyarakat, bahwa barang/ benda yang dipertukarkan itu berbunga (Vel, 2000).

Resiprositas secara ideal dilihat sebagai bentuk pertukaran yang dilandasi kekeluargaan dan jalinan solidaritas yang intim, namun praktik-praktik resiprositas seringkali memuat bentuk-bentuk eksploitasi. Unsur eksploitasi ini pula yang menjadi elemen utama dari resiprositas negatif. Di masa ini, resiprositas juga seringkali dipakai oleh para politisi untuk memobilisasi sumber daya dalam masyarakat (Sairin et al, 2002:67). Seringkali orang menggunakan pertukaran untuk mencari keuntungan/ kepentingan pribadi. Hewan sapi dan babi di Belu dipandang sebagai hewan adat dan komoditi. Sapi dan babi menjadi hewan adat ketika menjadi simbol pertukaran dalam adat perkawinan, kematian, dan ritual adat di luar siklus hidup seperti adat masuk rumah, angkat jiwa, dan lainnya. Kemudian, Sapi dan kerbau menjadi hewan komoditi, ketika hewan ini dinilai berdasarkan nilai moneterenya di pasar. Maka seringkali hitungan *belis* perempuan menjadi kurang relevan, karena dilihat dari nilai sebagai benda komoditi, bukan simbol sosial-budaya. Nilai sapi dan babi mengalami valorisasi/ perubahan nilai; sebagai komoditi nilainya menggelembung jauh melebihi nilai pasar yang “sesungguhnya”. Nilainya bukan lagi berdasar keseimbangan permintaan dan penawaran. Orang menghargainya tidak melulu karena kesatuan antara tenaganya, dagingnya dan nilai simboliknya. Oleh karena ekskalasi nilai hewan ini, maka adalah mitos jika pasar bebas itu tidak memerlukan pengaturan negara/pemerintah. Kepengaturan negara dalam porsi yang tepat diharapkan dapat melindungi mereka yang paling dirugikan. Pesta-pesta di luar daur lingkaran hidup seolah-olah menjadi urusan kekerabatan. Padahal sesungguhnya transaksi ini merupakan transaksi ekonomi-politik keuangan, seperti halnya jual beli di pasar. Di sinilah resiprositas negatif muncul.

Keborosan juga terjadi karena adanya hiburan-hiburan pelengkap lainnya pada pesta perkawinan, kematin, gali tulang dan lainnya. Jenis-jenis hiburan itu yaitu judi bola guling (BG) dan minuman keras (miras) (Nuwa, 2019). Tamu undangan pesta selain membawa amplop sumbangan, hewan, kain, dan benda-benda lainnya yang telah disepakati melalui kontrak pertukaran, juga mengeluarkan biaya untuk bermain judi dan ‘kumpul tangan’ untuk membeli miras. Selain pengeluaran adat, pengeluaran terbesar adalah untuk pesta perkawinan dan sambut baru. Seperti Maryam di Fatubena, belum lama ini mendapat undangan pesta sambut baru sebelah rumahnya. Ia membawa uang amplop sebesar Rp 200.000,00, sopi 1 jerigen, dan sprite 1 krat. Biasanya pada bulan Agustus dan September, banyak mendapat undangan sambut baru. Dalam satu bulan bisa mendapat undangan sambut baru 3-4 undangan. Hubungan etiket pertukaran menjadi bias, tidak lagi sebatas pada kontrak pertukaran tradisional berdasarkan hubungan kekeluargaan, melainkan pada relasi-relasi baru di luar kontrak akibat kawin-mawin antar suku.

Dengan demikian, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu perlu adanya kesadaran dan kerjasama sama antara komunitas adat, pemerintah desa, dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk lebih sensitif membaca/menganalisa peluang-peluang kemiskinan ekstrem Belu. Seringkali krisis dalam rumah tangga terjadi diakibatkan adanya pemborosan nilai yang dilekatkan pada properti-properti adat, seperti nilai/ harga jual hewan sapi/ babi yang tidak rasional di pasar bebas, yang implikasinya seringkali menjerat pembelisan dan tuntutan adat dan pesta lainnya yang kurang relevan dengan situasi dan kondisi ekonomi.

5.5.3. Relasi Gender

Pada komunitas masyarakat yang kurang memperhatikan inklusifitas yang demokratis pada hidup keseharian dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya, dapat mempercuram jurang kemiskinan. Dalam relasi gender masih ada kesempatan pembeda yang dilekatkan pada diri laki-laki dan perempuan, seperti: norma, aturan, hukum, pola perilaku, hubungan kekuasaan, mekanisme penghargaan dan penghukuman, serta kebijakan pemerintah.

Relasi gender dan kemiskinan merupakan isu yang begitu kompleks dan penting untuk didalami. Kemiskinan lebih sering dialami oleh perempuan dari pada oleh laki-laki. Biasanya, kemiskinan di antara perempuan lebih parah daripada di antara laki-laki. Ada banyak faktor penyebabnya, yaitu adanya hegemoni-hegemoni yang dilekatkan pada diri perempuan yang kurang inklusif. Seperti, masih ada pandangan mendahulukan pendidikan anak laki-laki dari pada perempuan. Biaya untuk menyekolahkan anak perempuan dirasa lebih besar dari pada anak laki-laki, karena anak perempuan Belu tidak akan sembarangan dilepas begitu saja untuk merantau ke kecamatan atau kota kabupaten untuk sekolah. Anak perempuan akan dipastikan dititipkan di rumah kerabat, yang di mana jika dihitung-hitung pengeluarannya jauh lebih besar dari pada asrama atau mengekos.

Selain itu, pada suku tertentu di Belu, perempuan sama sekali tidak mendapat hak waris untuk asset (hewan, lahan, dan lainnya). Kondisi perempuan yang demikian menyebabkan kerentanan hidup dalam belenggu kemiskinan. Ironisnya, dengan harapan merubah nasib dengan keterbatasan asset dan akses terhadap sumber daya, banyak perempuan yang terjebak dalam perdagangan manusia (*human trafficking*). Uraian rantai belenggu perempuan dan anak terjebak dalam *human trafficking* sudah dibahas pada sub-bab faktor sosial pada bab ini. Kompleksitas kemiskinan pada relasi gender juga karena masih adanya bias pada pembagian kerja dan arus tenaga kerja. Partisipasi laki-laki di pasar tenaga kerja lebih tinggi dari pada perempuan. Meskipun ada partisipasi perempuan dalam tenaga kerja, biasanya upahnya lebih kecil dari pada laki-laki. Seringkali perbedaan upah terjadi karena pekerjaan perempuan dipandang lebih ringan. Adapun jam kerja perempuan juga lebih pendek, karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga menerima upah lebih rendah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sering menuntut waktu dan tenaga perempuan lebih besar.

Ironisnya, biasanya perempuan harus mengerahkan waktu dan tenaganya pada pekerjaan domestik dan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Sering kali tugas-tugas mengasuh anak dan rumah tidak dikerjakan oleh laki-laki, meskipun laki-laki juga sedang tidak bekerja. Akibat pembagian kerja seperti ini, perempuan sering memiliki jam beban kerja lebih tinggi. Perempuan seringkali mengalami kemiskinan waktu (*time poverty*) dan kesempatan yang lebih terbatas untuk melakukan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan upah. Seringkali untuk mendapatkan penghasilan, perempuan bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah dan tidak tetap. Penghasilan tenun perempuan tidak menentu. Harga dan waktu menenun seringkali diabaikan, sehingga seringkali kain tenun yang dijual di pasar tidak mendapat untung sama sekali bahkan rugi. Dengan demikian untuk menekan angka kemiskinan ekstrem Belu perlu memperhatikan pola relasi gender yang lebih inklusif melalui berbagai pendekatan program dari berbagai lintas sektor.

5.6. Responsivitas Pemda, Desa, dan Stakeholder Lainnya dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tantangan yang sering muncul adalah bagaimana alokasi anggaran dalam program penanggulangan kemiskinan cenderung berfokus pada pencapaian target administratif, sehingga terkadang memunculkan kesan bahwa sebagian program diarahkan lebih pada memenuhi kebutuhan operasional Perangkat Daerah ketimbang menargetkan dampak jangka panjang bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, beberapa program pemberdayaan yang diinisiasi, meskipun bertujuan baik, masih mengadopsi pendekatan *charity* yang berisiko menciptakan ketergantungan di kalangan masyarakat penerima manfaat, yang pada akhirnya membuat warga lebih mencari bantuan daripada berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Program-program kepemudaan dan vokasional yang dikembangkan di tingkat lokal juga masih menghadapi kendala dalam mencapai masyarakat miskin ekstrem. Meski dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja muda, implementasi program ini belum secara signifikan menyentuh akar masalah kemiskinan di daerah pedesaan maupun komunitas marjinal. Demikian pula, program desa yang seharusnya menjadi tumpuan utama dalam pengentasan kemiskinan, pada kenyataannya seringkali tidak secara langsung menyasar atau berdampak pada kelompok masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Merespon tingginya angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Belu membuat berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kelompok miskin ekstrem. Ragam upaya itu dilakukan di berbagai urusan penting seperti pendidikan, kesehatan, peternakan dan perikanan, sosial, dan ekonomi. Guna memperlancar dan mempercepat program pengurangan kemiskinan ekstrem di berbagai sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu melibatkan berbagai PD yang tugas dan wewenangnya berhubungan langsung dengan penanganan kemiskinan. Pada aspek peningkatan SDM, misalnya, Pemerintah Kabupaten Belu fokus pada penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dan melibatkan Dinas Pendidikan dan Olahraga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Secara khusus, di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu berusaha meningkatkan kualitas infrastruktur pembelajaran dengan cara menambah ruang kelas baru dan merehabilitasi fasilitas pembelajaran yang sudah ada pada jenjang SD dan SMP. Pada bidang kesehatan, Dinas Kesehatan secara aktif memfasilitasi layanan kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil dan persalinan, pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat, dan penyediaan serta pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin ekstrem, Pemerintah Kabupaten Belu, melalui Dinas Sosial dan PMD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, membuat serangkaian program bantuan sosial, pemberdayaan, dan pemberian modal usaha. Khusus untuk mengurangi beban pengeluaran, Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu melakukan pengelolaan dan pendataan rutin fakir miskin serta menyelenggarakan penyediaan makanan, sandang, serta fasilitas layanan bagi keluarga penyandang disabilitas, anak terlantar, dan penduduk lanjut usia. Di sisi yang lain, upaya peningkatan kesejahteraan dieksekusi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu melaksanakan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian. Sementara itu, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melangsungkan aktivitas pemberdayaan lewat pembangunan kemitraan dengan pihak lain, penguatan kelembagaan UMKM, dan pemberian bantuan modal bagi UMKM.

Selain pemerintah daerah, terdapat juga peran signifikan dari stakeholder lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu. Salah satu aktor yang memberikan kontribusi penting adalah Keuskupan dan lembaga Credit Union (CU), yang melalui program-

program sosialnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keuskupan, melalui Komunitas Basis (Kombas), secara aktif mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama dalam hal peningkatan kapasitas ekonomi dan keterampilan kewirausahaan. Pendampingan ini telah memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, melalui Pusat Sosial Ekonomi (PSE), Keuskupan juga mengadakan Pameran Ekonomi Kreatif tahunan, baik di tingkat Keuskupan maupun Paroki. Inisiatif ini memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka, sekaligus mempromosikan inovasi serta kreativitas dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pameran ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi platform yang memperkuat jaringan dan kerja sama antar pelaku ekonomi lokal. Keberhasilan program-program sosial ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Pendekatan yang dilakukan Keuskupan dan CU ini dapat menjadi salah satu hal positif yang perlu dilanjutkan dan diperluas di masa depan, terutama dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kemandirian dan daya tahan ekonomi di tingkat komunitas.

5.6.1. Bidang Kesehatan

Pemda Belu melalui Dinas Kesehatan melakukan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Salah satu yang populer di Kabupaten Belu adalah Program Pengobatan Gratis (PPG), yang hanya dengan KTP Belu saja masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat kabupaten/kota.

5.6.2. Bidang Pendidikan

Pemda Belu melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga: strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan mengurangi beban pengeluaran. Strategi ini dilakukan melalui pengelolaan pendidikan level SD, sekolah menengah, PAUD, dan Pengelolaan pendidikan non-formal / kesetaraan.

5.6.3. Bidang Ekonomi

Pemerintah Daerah Kabupaten Belu telah mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan ekstrem, terutama melalui intervensi di sektor ekonomi. Berikut adalah beberapa program unggulan dari Pemda yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi:

5.6.3.1 Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Sektor Peternakan

Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan peternak lokal. Penyediaan bibit ternak yang berkualitas serta pengembangan hijauan pakan ternak yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat sektor peternakan, yang menjadi salah satu mata pencaharian utama di daerah ini, terutama di wilayah pedesaan. Dengan program ini, Pemda berharap masyarakat dapat mandiri secara ekonomi melalui peningkatan hasil ternak yang lebih produktif dan efisien.

5.6.3.2 Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil di Sektor Kelautan

Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Belu, khususnya bagi masyarakat yang bergantung pada budidaya ikan kecil. Melalui pengembangan kapasitas, para nelayan dan petani ikan didorong untuk mengoptimalkan teknik budidaya mereka, meningkatkan produksi, serta memperluas akses pasar. Program ini penting untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

5.6.3.3 Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Fakir Miskin

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospmd) menjalankan program yang berfokus pada pengurangan beban pengeluaran bagi kelompok rentan, seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan fakir miskin. Program ini mencakup rehabilitasi sosial dasar, perlindungan sosial, serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem. Melalui intervensi ini, Pemda berupaya memastikan bahwa kelompok masyarakat paling rentan mendapatkan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun melalui akses ke jaminan sosial yang lebih luas.

5.6.3.4 Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mengelola program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal sebagai penggerak utama ekonomi di Kabupaten Belu. Selain itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja juga menjadi prioritas, dengan harapan dapat membuka lebih banyak peluang kerja serta memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, khususnya di sektor-sektor produktif.

5.6.3.5 Program Peningkatan Pendapatan di Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Di sektor pertanian, Pemda melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, melaksanakan berbagai program peningkatan pendapatan, termasuk pembangunan infrastruktur pertanian dan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Beberapa sub-kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta pengelolaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, memperbaiki infrastruktur pertanian, serta menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dari sektor pertanian. Keseluruhan program di atas menggambarkan upaya komprehensif Pemda Belu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang berfokus pada penguatan sektor-sektor produktif, pemberdayaan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal.

5.6.4. Fasilitas Umum, Fasilitas Khusus, dan Layanan Dasar

Pemerintah Kabupaten Belu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga menjalankan berbagai program infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur dasar. Beberapa program utama yang diinisiasi oleh PUPR di bidang fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) antara lain:

5.6.4.1 Peningkatan Kapasitas Air Baku

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas air baku bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang krusial, terutama di wilayah yang sering mengalami kekeringan seperti Kabupaten Belu. Melalui peningkatan kapasitas air baku, diharapkan masyarakat dapat mengakses air bersih secara lebih mudah dan merata, yang juga mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

5.6.4.2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi. Dengan adanya pengembangan sistem penyediaan air minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berupaya memastikan bahwa akses masyarakat terhadap air bersih lebih baik, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena akses terhadap air bersih sering kali menjadi salah satu indikator kesejahteraan yang kritis.

5.6.4.3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Dalam upaya menjaga lingkungan yang sehat dan mencegah pencemaran, PUPR juga melaksanakan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Pengelolaan yang baik terhadap air limbah akan berdampak pada kualitas sanitasi masyarakat, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Dengan pengelolaan limbah yang memadai, risiko penyakit akibat sanitasi buruk dapat ditekan, sehingga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

5.6.4.4 Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Salah satu fokus utama PUPR adalah program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi lemah tetap memiliki akses ke hunian yang layak. Dengan demikian, Pemda tidak hanya berusaha meningkatkan kualitas hidup melalui akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga dengan menyediakan perumahan yang layak.

Beberapa sub-program dalam inisiatif ini mencakup:

- a. **Program Kawasan Permukiman:** Fokus pada perbaikan kawasan permukiman untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak huni.
- b. **Program Perumahan:** Bertujuan untuk membangun dan memperbaiki rumah-rumah bagi masyarakat miskin, agar mereka dapat tinggal di hunian yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
- c. **Pencegahan Permukiman Kumuh:** Melalui program ini, Pemda berupaya mengurangi atau mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh dengan membangun infrastruktur

dan fasilitas publik yang memadai, serta melakukan perbaikan pada kawasan yang sudah mengalami degradasi lingkungan.

Keseluruhan program yang dijalankan oleh PUPR ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan infrastruktur dasar di Kabupaten Belu. Dengan perbaikan pada akses air bersih, pengelolaan limbah, serta penyediaan perumahan yang layak, Pemda berupaya menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

BAB VI PEMIKIRAN DAN ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

6.1. Rangkuman Permasalahan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Pertama, **faktor lingkungan** menjadi salah satu penyebab utama, di mana kondisi lahan yang bergantung pada tadah hujan dan keterisolasian wilayah menghambat pengembangan pertanian yang produktif dan aksesibilitas ke pasar.

Selanjutnya, **faktor sumber daya manusia (SDM)** sangat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, disertai dengan pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai, menyebabkan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup. Dari sisi **faktor ekonomi**, rendahnya pencaharian, terbatasnya aset, serta pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran, menjadi tantangan yang signifikan. Tingginya tingkat pengangguran dan keterbatasan dalam ketersediaan serta akses pasar semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. **Faktor sosial** juga memainkan peranan penting. Ketergantungan pada bantuan sosial, tingginya tingkat kriminalitas, dan perbedaan antara warga lama dan baru yang datang dari Timor Leste menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Kelompok marjinal sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, sehingga semakin terpinggirkan dalam pembangunan.

Dari perspektif **budaya**, relasi dalam lingkungan keluarga yang besar (ekstended family), ikatan klan, dan kebiasaan adat yang cenderung boros menghambat pengelolaan keuangan yang efektif. Selain itu, ketidaksetaraan dalam relasi gender dapat membatasi peran serta partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Terakhir, **responsivitas Pemerintah Daerah** Kabupaten Belu terhadap permasalahan kemiskinan juga sangat menentukan. Sistem pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berlapis dari tingkat nasional hingga daerah sering kali tidak efektif. Alih-alih fokus pada pengembangan kapasitas masyarakat, pendekatan yang lebih banyak bergantung pada bantuan (charity) kurang mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

6.2. Rangkuman Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu melibatkan berbagai pendekatan dan sektor. Berikut adalah rangkuman program-program tersebut berdasarkan data yang ada:

6.2.1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Belu fokus pada perbaikan layanan dasar pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Contohnya adalah penambahan ruang kelas baru serta rehabilitasi fasilitas belajar. Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan memfasilitasi layanan seperti pemeriksaan ibu hamil, persalinan, serta pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat.

6.2.2. Bidang Sosial dan Ekonomi

Berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta Dinas Koperasi. Program bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan memberikan dukungan berupa bantuan sosial, sarana pertanian, serta pemberian modal usaha bagi UMKM. Misalnya, program penyediaan bibit ternak dan pelatihan untuk petani dan peternak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

6.2.3. Kolaborasi Dengan Stakeholder

Selain pemerintah, terdapat kontribusi dari pihak lain seperti Keuskupan dan Credit Union (CU) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program seperti pendampingan ekonomi, peningkatan kapasitas kewirausahaan, serta pameran ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari upaya ini, yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan daya saing masyarakat.

6.2.4. Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Layanan Umum

Dinas PUPR di Kabupaten Belu juga menjalankan program yang berfokus pada peningkatan akses air bersih, penyediaan rumah layak huni, serta pengelolaan air limbah. Program ini penting untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki kondisi sanitasi, yang berkaitan erat dengan kesejahteraan. Secara keseluruhan, program-program ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Belu dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui perbaikan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama lintas sektor. Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh masalah alokasi anggaran yang kurang optimal, pendekatan yang masih bersifat karitatif, serta tantangan dalam mencapai kelompok masyarakat paling rentan dan termarginalkan.

6.3. Alternatif Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

6.3.1. Program Quick Win dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, diperlukan langkah awal yang cepat dan efektif. Program *quick win* ini berfokus pada penataan ulang sistem pendataan kelompok miskin ekstrem. Langkah pertama yang penting adalah pengkajian ulang kriteria miskin ekstrem dengan menetapkan indikator-indikator yang lebih tepat dan akurat, meliputi aspek ekonomi, akses terhadap layanan dasar, serta kapasitas individu dan rumah tangga. Upaya pemikiran ulang indikator kemiskinan ekstrem sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2020. Kertas kerja yang ditulis oleh tim TNP2K tersebut mengusulkan enam aspek perbaikan indikator garis kemiskinan, yakni garis kemiskinan sementara, populasi rujukan yang berbeda-beda, perubahan pola konsumsi kelompok makanan, metode penghitungan garis kemiskinan non-makanan, kebutuhan minimum kalori per kapita per hari (Adji et al., 2020).

Diantara enam usulan itu, proposal penyesuaian pola konsumsi makanan dan penyesuaian pola konsumsi non-makanan dapat menjadi aspek perbaikan yang bisa diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Pada aspek pola konsumsi makanan, Pemerintah Kabupaten Belu dapat memilih ulang komoditas makanan yang akan digunakan dalam menghitung garis kemiskinan. Kriteria makanan terdiri dari: (a) komoditas yang dianggap esensial, (b) komoditas yang dikonsumsi oleh 50-60 persen populasi rujukan, dan (c) komoditas tersebut memiliki nilai kalori lebih besar dari nol (Adji et al., 2020). Dalam kerangka perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu, melalui BPS

Kabupaten Belu, bisa melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran konsumsi makanan penduduk di wilayahnya. Dengan melihat konteks pangan di Kabupaten Belu, BPS Kabupaten Belu kiranya mampu melakukan adaptasi penghitungan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran makanan lokal. Sementara itu, pada aspek pola konsumsi non-makanan, Pemerintah Kabupaten Belu, melalui BPS Kabupaten Belu, dapat mengembangkan item pengeluaran non makanan yang selama ini hanya berjumlah 51 jenis untuk wilayah perkotaan dan 47 jenis untuk wilayah perdesaan (Hidayat & Asmanto, 2020). Pengakomodasian dua aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan keakuratan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu. Adanya data kemiskinan ekstrem yang akurat pada taraf selanjutnya bisa dijadikan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Belu untuk membuat kebijakan atau program pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan program kesejahteraan sosial, mekanisme kontrol dan evaluasi program kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan, utamanya pada aspek peningkatan akurasi data dalam pendataan dan pengiriman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan evaluasi distribusi bantuan sosial. Selama ini, permasalahan seperti kesalahan identifikasi penerima manfaat—misalnya, perbedaan nama dalam keluarga yang mengakibatkan kekeliruan dalam distribusi bantuan—sering terjadi. Untuk meningkatkan akurasi DTKS, Pemerintah Kabupaten Belu perlu berkolaborasi dengan pemerintah desa (khususnya sekretaris atau operator desa) dan pendamping PKH karena kerap kali pengusulan DTKS diliputi oleh kepentingan politik desa. Pemerintah desa dan pendamping PKH perlu dilibatkan karena mereka memiliki wewenang dalam melakukan pendataan dan pengiriman usulan DTKS ke aplikasi atau situs yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Beralih ke urusan evaluasi distribusi bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Belu bisa meningkatkan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) pada program-program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pemerintah desa.

6.3.2. Program Jangka Pendek dan Menengah Untuk Meningkatkan Penghidupan Masyarakat

Program jangka pendek dan menengah ini difokuskan pada peningkatan penghidupan masyarakat melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks lokal di Kabupaten Belu. Salah satu prioritas utama adalah dukungan teknokratik dan *collaborative governance*, di mana Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kabupaten akan menjadi *leading sector* dalam mengkoordinasikan upaya ini. Sinergitas dan kolaborasi antar-stakeholder diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas program-program tersebut.

Pelaksanaan program ini juga mengedepankan studi kelayakan (*feasibility studies*) untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Pendekatan yang lebih *bottom-up* akan menjadi prioritas, di mana masyarakat dilibatkan dalam evaluasi capaian program selama ini. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program dapat lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Untuk memastikan kecepatan dalam validasi data, tenaga lapangan seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), petugas kesehatan masyarakat, dan kader Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilibatkan. Namun, peran mereka diupayakan agar tidak menambah kerumitan proses birokrasi, melainkan memfasilitasi pendataan yang lebih akurat dan efektif.

6.3.3. Kepemimpinan dan Pendekatan Berbasis Komunitas

Kepemimpinan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem ini akan ditekankan mulai dari level kabupaten hingga desa. Sebagai pemimpin Pokja Penanggulangan

Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belu, Wakil Bupati akan mengoordinasikan kampanye dan eksekusi program hingga tingkat kecamatan. Di tingkat komunitas, pendekatan pendidikan informal yang adaptif, seperti *Turmutu* (bahasa Tetun yang berarti "duduk bersama"), akan diterapkan untuk mengajak masyarakat berkumpul dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

6.3.4. Fokus Program Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Program sosial ekonomi yang akan diimplementasikan di Kabupaten Belu akan dirancang untuk dapat mengakomodasi kebutuhan khusus setiap kelompok penerima manfaat. Fokus pertama adalah kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem yang tidak memiliki aset maupun jejaring sosial yang kuat, seperti lansia, difabel, ibu kepala rumah tangga, serta mereka yang benar-benar tidak memiliki sumber daya. Selain itu, kelompok miskin ekstrem yang masih memiliki aset atau jejaring sosial akan diberikan dukungan yang berbeda, yang diarahkan pada optimalisasi sumber daya yang mereka miliki agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu, dengan pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil jangka panjang yang berkelanjutan.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Rangkuman Kajian

Penyebab Kemiskinan Ektstrem: Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pendidikan dan kesehatan, prevalensi stunting yang tinggi. Selain faktor di atas, masih ada faktor lain yang relevan yakni faktor ekonomi, terkait terbatasnya akses terhadap peluang ekonomi, kualitas pertanian dan peternakan, seperti pekerjaan yang layak dan produktif, serta infrastruktur yang tidak memadai, terutama di wilayah pedesaan. Tingkat pengangguran dan pekerjaan tidak tetap yang tinggi juga turut memperparah kemiskinan, membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi.

Kebijakan yang Ada Saat Ini dan Transformasinya: Kebijakan yang saat ini berlaku perlu ditingkatkan dari pendekatan *top-down* yang terfokus pada distribusi bantuan, menuju program yang lebih spesifik dan *human-centered development*. SDM masih rendah, karena pernah krisis. Program "Quick Win" diperlukan untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan (misalnya, memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS agar lebih akurat). Sementara itu, program jangka pendek dan menengah harus fokus pada pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial yang lebih merata. Transformasi ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Pentingnya Roadmap Jangka Pendek dan Menengah: *Roadmap* penanggulangan kemiskinan yang terencana sangat diperlukan agar intervensi dapat terarah dan tepat sasaran. *Roadmap* ini harus mencakup program-program yang bersifat jangka pendek (seperti pendataan ulang dan distribusi bantuan yang lebih transparan), serta program jangka menengah yang mencakup peningkatan kapasitas SDM dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah. Pendekatan ini akan memungkinkan pencapaian yang terukur dan memastikan bahwa upaya-upaya pemerintah dapat terus disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam Implementasi Kebijakan: Pemerintah Daerah Kabupaten Belu harus menunjukkan komitmen yang kuat melalui regulasi seperti Peraturan Bupati (Perbub) dan Peraturan Daerah (Perda) yang fokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu membidik pada problem dasar kemiskinan ekstrem yakni kualitas SDM yg harus diatasi menggunakan program peningkatan gizi, ketahanan pangan, pendidikan, keterampilan, dan akses pada pekerjaan produktif di tingkat daerah. Pemda juga perlu menyediakan mata anggaran yang akuntabel, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan digunakan sesuai dengan rencana program. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran ini sangat penting agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat diukur keberhasilannya dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Pentingnya Political Will dari Seluruh Stakeholder: *Political will* atau kemauan politik dari seluruh pemangku kepentingan di Belu sangat krusial untuk kesuksesan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini melibatkan tidak hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, tetapi juga LSM, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Seluruh pihak perlu bersatu dalam mencapai tujuan

bersama, mengakui bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif yang memerlukan komitmen jangka panjang.

Peningkatan Kolaborasi antar Stakeholder: Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta harus terus diperkuat. Melalui pendekatan *collaborative governance*, semua pihak dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan sumber daya mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian program dengan kebutuhan spesifik lokal, memastikan program yang lebih *bottom-up* dan tepat sasaran. Dalam hal ini, koordinasi melalui kelompok kerja (Pokja) dan kampanye kesadaran di tingkat kabupaten dan kecamatan dapat memainkan peran kunci dalam mempercepat pelaksanaan program.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan relatif tingginya harapan lama sekolah memberikan indikasi adanya gap yang cukup tinggi diantara keduanya. Pemerintah Kabupaten Belu, melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga, perlu berupaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Belu setidaknya sampai 9 tahun. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat adat dan tokoh agama agar perhatian masyarakat dalam mencapai target rata-rata sekolah hingga 9 tahun dapat tercapai. Pada taraf selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Belu urgen melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan, pengelolaan dana pendidikan, dan peningkatan infrastruktur dan kualitas guru pada jenjang SMA/K. Koordinasi ini sangat penting sebab menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/K) telah berpindah, dari yang tadinya dikelola oleh pemerintah kabupaten menjadi dikelola pemerintah provinsi. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu harus fokus membenahi pendidikan dasar dan menengah pertama melalui peningkatan tata kelola kelembagaan, pengelolaan dana pendidikan, dan peningkatan infrastruktur dan kualitas guru pada jenjang SD dan SMP.

Pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belu, institusi pendidikan (SMA/K dan universitas), industri lokal, dan BLK dalam upaya meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Lulusan SMA/K atau perguruan tinggi di Kabupaten Belu perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di level lokal. Selain itu, terdapat urgensi untuk meningkatkan pelatihan bagi kelompok marjinal dan penduduk putus sekolah agar dapat berdaya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belu, industri lokal, dan BLK untuk membentuk SDM di Kabupaten Belu (baik lulusan SMA/K dan perguruan tinggi dan kelompok marjinal) yang dapat berkontribusi secara langsung terhadap sektor-sektor ekonomi potensial di Kabupaten Belu. Beberapa bentuk kerja sama yang bisa dilakukan diantaranya adalah (a) pemetaan dan analisis kebutuhan keterampilan di sektor-sektor ekonomi potensial, (b) pembuatan badan kerja sama yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi tripartit antara institusi pendidikan, pemerintah, dan swasta untuk menentukan sistem pembelajaran vokasional, (c) kerja sama pelatihan kerja non-formal kepada kelompok marjinal dan warga putus sekolah bersama BLK di Kabupaten Belu. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Belu, institusi pendidikan (SMA/K dan universitas), industri lokal, dan BLK ini diharapkan mampu menjawab tantangan penyiapan tenaga kerja (*aspek supply*) dan pemenuhan tenaga kerja (*aspek demand*). Keseimbangan antara suplai tenaga kerja dan permintaan pekerja oleh industri lokal itu perlu diseimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan antara pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Peningkatan kesadaran menabung dan berinvestasi. Tingginya sumbangan pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Belu ditopang oleh kegiatan konsumsi. Kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak hanya dipenuhi oleh produksi lokal

dan domestik namun juga dari daerah lain. Hal ini ditunjukkan net ekspor yang negatif dan memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, komposisi pengeluaran untuk makanan lebih tinggi daripada pengeluaran non makanan. Tingginya konsumsi rumah tangga ini menyebabkan rendahnya tabungan dan tingginya kredit konsumsi di Kabupaten Belu. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar masyarakat memperhatikan konsumsinya serta mulai mempertimbangkan pentingnya melakukan pengelolaan keuangan rumah tangga diantaranya mulai menabung dan investasi pada sektor-sektor riil.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, langkah-langkah terkoordinasi dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dapat menjadi dasar kuat dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu.

7.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut ini menjawab tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem Belu pada sejumlah lintas faktor, yaitu lingkungan, sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan budaya. Program aksi jangka pendek dan menengah dapat menjadi pilihan strategis mengurangi jumlah keluarga miskin ekstrem dari keterbatasan-keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program-program yang disusun mampu memberikan kesadaran masyarakat untuk mandiri, tidak bergantung dengan bantuan, serta mampu mengembangkan potensi-potensi yang semaksimal mungkin di desa. Namun, bagaimana pun perlu ada program khusus yang bersifat *charity* bagi warga miskin ekstrem dengan kriteria khusus, seperti warga dengan keterbatasan/ kerentanan fisik, seperti difabel dan manula atas (usia di atas 65 tahun) dari keluarga miskin. Oleh karena itu, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem Belu perlu adanya kerja sama kolaboratif secara lintas sektoral, yaitu pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, LSM, komunitas adat, keuskupan gereja, CU, dan sektoral lainnya yang relevan. Spirit kolaborasi lintas sektor tersebut untuk menciptakan kemandirian, keulatan, serta pemerintah yang semakin responsif terhadap berbagai masalah pada program di berbagai sektor untuk menekan angka kemiskina ekstrem Belu.

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu menjadi tantangan besar bagi banyak warga, terutama mereka yang hidup tanpa aset yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Banyak keluarga miskin di Belu tidak memiliki tanah, ternak, atau aset lainnya yang bisa menjadi sumber pendapatan atau modal untuk memulai usaha. Tanpa kepemilikan ini, mereka sulit keluar dari jerat kemiskinan dan seringkali hanya bertahan hidup dari hari ke hari, tanpa kepastian masa depan yang lebih baik. Secara fisik, banyak di antara mereka adalah lansia atau orang-orang yang mengalami keterbatasan kesehatan, sehingga tidak dapat bekerja dengan optimal. Kondisi ini membuat mereka semakin rentan dan bergantung pada bantuan sosial. Namun, bantuan yang ada seringkali belum mampu menjangkau mereka secara merata. Selain itu, secara politis, kelompok ini hampir tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan kebutuhannya, sehingga kebijakan yang seharusnya berpihak pada mereka seringkali luput dari perhatian.

Mirisnya, belum ada program yang benar-benar mampu menyentuh inti permasalahan yang dihadapi oleh kelompok miskin ekstrem ini. Dalam keterbatasan, mereka seringkali terpaksa melakukan *self-exploitation*—mempekerjakan diri sendiri dengan upah yang sangat rendah hanya demi memenuhi kebutuhan dasar. Kehidupan mereka menjadi lingkaran tak berujung, penuh perjuangan untuk bertahan, tanpa ada kepastian tentang kapan kemiskinan ini akan berakhir.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu, pelaksanaan program perlu berbasis komunitas dengan pendekatan yang memberdayakan masyarakat secara langsung. Program ini akan dilaksanakan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belu serta kolaborasi erat antar berbagai pemangku kepentingan, seperti NGO, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap program dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Program ini akan memprioritaskan peningkatan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan pendidikan informal serta penguatan kearifan lokal seperti *turmutu* (duduk bersama). Fokus utama adalah untuk membangun kapasitas masyarakat secara komprehensif agar lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Namun, pendekatan ini tidak akan meninggalkan kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan ibu kepala rumah tangga yang membutuhkan perhatian khusus agar tidak semakin tertinggal dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan yang holistik ini, RTL diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup warga miskin ekstrem. Program ini juga akan dikawal melalui monitoring dan evaluasi berkala agar tetap berada pada jalur yang benar dan dapat disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen dari semua pihak, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu.

No	Program	Leading sector
Program Akurasi Data dan Implementasi Bantuan untuk Program Pengurangan Kemiskinan Ekstrem (Quick win)		
1	Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional - Daerah	Dinas Sosial PMD – Desa
2	SOTK (Sistem Organisasi dan Tata Kelola) Pengelolaan Bantuan Sosial Serta Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang Efektif dan Efisien	Bagian Organisasi Setda
3	<i>Feasibility Studies</i> Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Belu	BP4D Belu
4	Riset Pendalaman tentang Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Ekstrem dan Penumbuhan Inisiatif Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan 1. Faktor Lingkungan dan Dampak Krisis Iklim 2. Faktor Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Primer (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) 3. Faktor Sosial – Budaya yang Membelenggu Masyarakat dalam Kemiskinan Ekstrem	BP4D Belu
5	Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Belu 1. Dinamika Peningkatan Kualitas Kawasan Penduduk Warga Baru 2. Perencanaan Kawasan Agroindustri dan Hilirisasi Produk Unggulan	BP4D Belu
Program Jangka Pendek-Menengah		
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan serta Infrastruktur Dasar		
6	Pemerataan Infrastruktur Pendukung Sosial - Ekonomi dan Kesejahteraan Warga <ul style="list-style-type: none"> - Jalan dan Jembatan - MCK - Listrik - Jaringan internet - Penerangan jalan - Pasar - Terminal dan Angkutan Umum 	PUPR
8	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Bedah Rumah bagi Warga Miskin Ekstrem	PUPR
9	Pengolahan Lahan Kritis untuk Peningkatan Akses Penghidupan bagi Keluarga Miskin Ekstrem	ATR/BPN Belu
Program Peningkatan Kapasitas SDM		

10	Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar melalui Sekolah Jarak Jauh di Wilayah Terisolir atau Terpencil	Dinas Pendidikan dan Olahraga – Pemerintah Desa
11	Peningkatan Kualitas Gizi Untuk Bayi, Balita, Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui	Dinas Kesehatan
12	Penurunan Angka Stunting, Kesehatan Ibu Dan Anak, Serta Balita	Dinas Kesehatan
13	<p>Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Angkatan Kerja Melalui Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Belu, Institusi Pendidikan (SMA/K dan universitas), Industri Lokal, dan BLK.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemetaan dan Analisis Kebutuhan keterampilan di Sektor-Sektor Ekonomi Potensial di Kabupaten Belu; Pembuatan Badan Khusus Yang Berfungsi Sebagai Wadah Kolaborasi Tripartit Antara Institusi Pendidikan, Pemerintah, dan Swasta Untuk Menentukan Sistem Pembelajaran Vokasional; Kerja Sama Pelatihan Kerja Non-Formal Kepada Kelompok Marjinal Dan Warga Putus Sekolah Bersama BLK di Kabupaten Belu; Pembuatan dan Integrasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (<i>Labour Market Information System</i>, atau LMIS) Oleh Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu Bekerja Sama Dengan Industri Lokal; Kebijakan atau Peraturan Daerah yang Mengatur Tentang Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Angkatan Kerja (mengatur kewajiban industri lokal untuk terlibat dalam upaya pelatihan tenaga kerja (khususnya industri menengah dan besar dengan profit lebih dari 200 juta per tahun), keharusan penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri (dikecualikan pada bidang atau posisi pekerjaan yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal), kewajiban tenaga luar daerah untuk melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, kewajiban BLK untuk terlibat dalam pelatihan kepada kelompok marjinal dan penduduk putus sekolah (disesuaikan dengan hasil pemetaan dan analisis kebutuhan keterampilan yang telah dilakukan sebelumnya)). 	Institusi Pendidikan di Kabupaten Belu (SMA/K dan Universitas), Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu.
Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Warga		
14	<p>Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah Kabupaten Belu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menciptakan ikon-ikon baru kemandirian ekonomi di Belu “Beli Belu : Program Apresiasi Produk lokal Kabupaten Belu” 	Pemda Belu dan <i>stakeholder</i> ekonomi lain
15	Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Peluang Usaha, <i>Branding</i> dan Jejaring Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten Belu	Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan

	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian b. Perkebunan c. Peternakan d. Kain Tenun 	Transmigrasi Kabupaten Belu
16	Inovasi P4S Petani Muda Keren dan Ekskalasi Kelompok Inovatif Sektor Primer di Kabupaten Belu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Multi-Stakeholder lain
17	<p>Peningkatan Kapasitas UMKM di Kabupaten Belu.</p> <p>Dengan sub-program sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Pemasaran Digital Bagi UMKM di Kabupaten Belu; b. Sosialisasi Syarat dan Tahapan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Sertifikat Halal Bagi UMKM Berbasis Produksi Pangan; c. Pendampingan Pembuatan SPP-IRT dan Sertifikat Halal Bagi UMKM Berbasis Produksi Pangan. 	Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu – Diskominfo
18	<p>Optimalisasi BUMDes untuk Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian dan Kerajinan.</p> <p>Dengan detail sub-program sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan dan Analisis Rantai Pasok Nilai (<i>Value Chain Analysis</i>) Industri Pertanian dan Kerajinan di Kabupaten Belu; b. Analisis, Pemetaan, dan Identifikasi Aktor-Aktor Rantai Pasok Nilai Industri Pertanian dan Kerajinan di Kabupaten Belu Dari Hulu (Suplai Bahan Baku) ke Hilir (<i>Off-taker</i> atau pembeli hasil produk pertanian dan kerajinan); c. Kolaborasi Bersama Penyuplai Bahan Baku dan Pembeli Hasil Produk Pertanian dan Kerajinan; d. Program Pelatihan Diversifikasi Produk Pertanian Bagi BUMDes di Kabupaten Belu; e. Program Pelatihan Pemasaran Produk Kerajinan Bagi BUMDes di Kabupaten Belu; 	Dinsos PMD – Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu
19	<p>Kolaborasi antara Kelompok Tani/Ternak/Kerajinan dengan Komunitas Basis CU untuk Kemandirian Perekonomian Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan b. Pendampingan c. Permodalan d. Pengembangan usaha e. Pemasaran 	PD – CU KS – Keuskupan Belu

	f. Pameran / Eksebisi	
20	Pameran & Eksebisi Produk Unggulan Kabupaten Belu	Multi-Stakeholder
21	Meningkatkan Edukasi Bagi Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Menabung	Pemda dan Perbankan
22	Meningkatkan Kesadaran Untuk Melakukan Investasi Di Sektor Riil Dimulai Dari Skala Kecil Dan Menengah	Pemda dan Perbankan
Program Pengembangan Modal Sosial		
23	Program Bantuan Sosial (Karitatif) untuk Kelompok Anak Terlantar, Difabel, Manula atau Kelompok dengan Keterbatasan Lainnya	Dinas Sosial PMD
24	Penguatan Kaderisasi Perlindungan Perempuan	DP3AP2
25	Program Ruang Aman Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	DP3AP2 - Pemerintah Desa - YPPA
Program Pengembangan Modal Budaya		
26	Program Penguatan Kelembagaan Adat dalam merespons Budaya Boros	Dinas Pendidikan dan Olahraga - Pemerintah Desa - Komunitas Adat
27	Program Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial	Dinas Sosial PMD - DP3AP2 - Dinas Pendidikan dan Olahraga - YPPA - Pemerintah Desa - Komunitas Adat
Peningkatan Responsivitas Pemda, Desa dan Stakeholder dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem secara Kolaboratif		
28	Dukungan Kemitraan Stakeholder pada pelaksanaan Perda, Perbub, Perdes dan Perkades Terkait Penurunan Kemiskinan Ekstrem di tingkat Kabupaten maupun Desa/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan terkait Budaya Hidup Boros - Peraturan sanksi sosial - budaya yang menyimpang - Peraturan lain yang terkait 	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu
29	Promosi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Penguatan Peran Kepemimpinan Desa, Gereja, LSM, dan Komunitas Adat. <ul style="list-style-type: none"> - Forum Bersama Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem - Forum Bersama untuk Kemandirian Perekonomian Daerah melalui program "Beli Belu" 	Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Forum Bersama Pengurangan dampak Kekeringan dan Krisis Iklim - Forum Bersama Mitigasi dan Responsivitas Terhadap Isu-isu Kemiskinan Kekinian (Jeratan pinjol, kelaparan ekstrem, dll) - Forum Lain yang Relevan | |
|---|--|

REFERENSI

- Adji, A., Asmanto, P., Nugroho, D., Sadikin, A., & Handayani, N. B. (2022). Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024. *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Achmad Maulana. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Alkatiri, F. A. (2018). AKSES TANAH DAN KENDALA LEGITIMASI EKS PENGUNGSI TIMOR TIMUR DI KABUPATEN BELU. *Jurnal Kawistara*, 8(1), 22. <https://doi.org/10.22146/kawistara.33070>
- Helmyati, S., Ismail, H., Syarifa, C. A., & Maula, A. W. (2023). *Kajian Analisis Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur*. Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan.
- Hidayat, T., & Asmanto, P. (2020). *Pengukuran Angka Kemiskinan: Standar Global vs Nasional*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kurniawan, S., Fefta, A., & Domai, T. (2014). Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban). *Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(3), 117-125. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2014.017.03.2>
- Mastaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhilla, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary Jurnal Ekonomi Syariah*, 121-136.
- Mauss, M. (2002). *The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies*. Routledge.
- Nanga, M., Fitrinika, E., Rahayuningsih, D., & Dinayanti, E. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Kementerian PPN/Bappenas.

- Niki, S., Larasati, E., Suwitri, S., & Warsono, H. (2020). Collaborative Governance in Poverty Alleviation in Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *Asian Social Science*, 16(5), 72. <https://doi.org/10.5539/ass.v16n5p72>
- Nuwa, T. C. (2019). *Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)*. Universitas Airlangga.
- Rahim, M., Tahir, M., & Rumbia, W. A. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. *The Winners*, 15(1), 23. <https://doi.org/10.21512/tw.v15i1.633>
- Retnowati, E. (2018). MAKNA BUDAYA TRADISIONAL BELU BAGI MULTIKULTURALISME: TINJAUAN FILSAFAT. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 175. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.504>
- Sawir, M., & Maradona, Z. A. (2023). Evaluasi Program RESPEK dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo. *Journal of Government and Politics*.

